

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD, yakni sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Prioritas dan rencana kerja pembangunan tersebut menjadi landasan dalam penyusunan rencana anggaran tahun 2018. RKPD tahun 2018 menjadi acuan bagi Satuan Kerja Kepemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2018.

Penyusunan RKPD tahun 2018 dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal RKPD, Rancangan Akhir RKPD dan Penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta pendekatan bottom up dan top down. Pendekatan politik diantaranya dilakukan dengan memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses komunikasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang).

Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKPD merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu penyusunan RKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018 mengacu pada arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango 2005-2025 serta diselaraskan dan dilakukan dengan mempertimbangkan arahan kebijakan nasional serta kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo khususnya yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 serta arah kebijakan program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018. Mengingat bahwa saat ini RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2016-2021 sementara dalam proses perancangan, maka penyusunan RKPD Kabupaten Bone Bolango tahun 2018 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah periode 5 (lima) tahun ketiga yang termuat dalam RPJPD 2005-2025.

Arahan prioritas utama pembangunan Kabupaten Bone Bolango pada RPJMD 2016-2021 yang diamanahkan dalam RPJPD 2005-2025 adalah percepatan pembangunan wilayah melalui pembangunan desa sebagai basis pertumbuhan untuk mewujudkan masyarakat maju dan bermartabat menuju Bone Bolango Cemerlang. Arah utama kebijakan pembangunan pada tahapan ketiga tersebut dilakukan melalui percepatan pembangunan desa sebagai basis pertumbuhan, peningkatan kinerja dan kualitas tata kelola pemerintah menuju pemerintahan bersih dan beribawa, peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang semakin bermutu, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan produk unggulan daerah, percepatan pengembangan infrastruktur dasar wilayah untuk pemerataan pembangunan dan mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah, percepatan penataan pusat pemerintahan kabupaten dan kecamatan, pengembangan kawasan strategis, serta pendayagunaan dan pengelolaan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan.

## 1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan formal penyusunan RKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018, didasarkan pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
21. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;

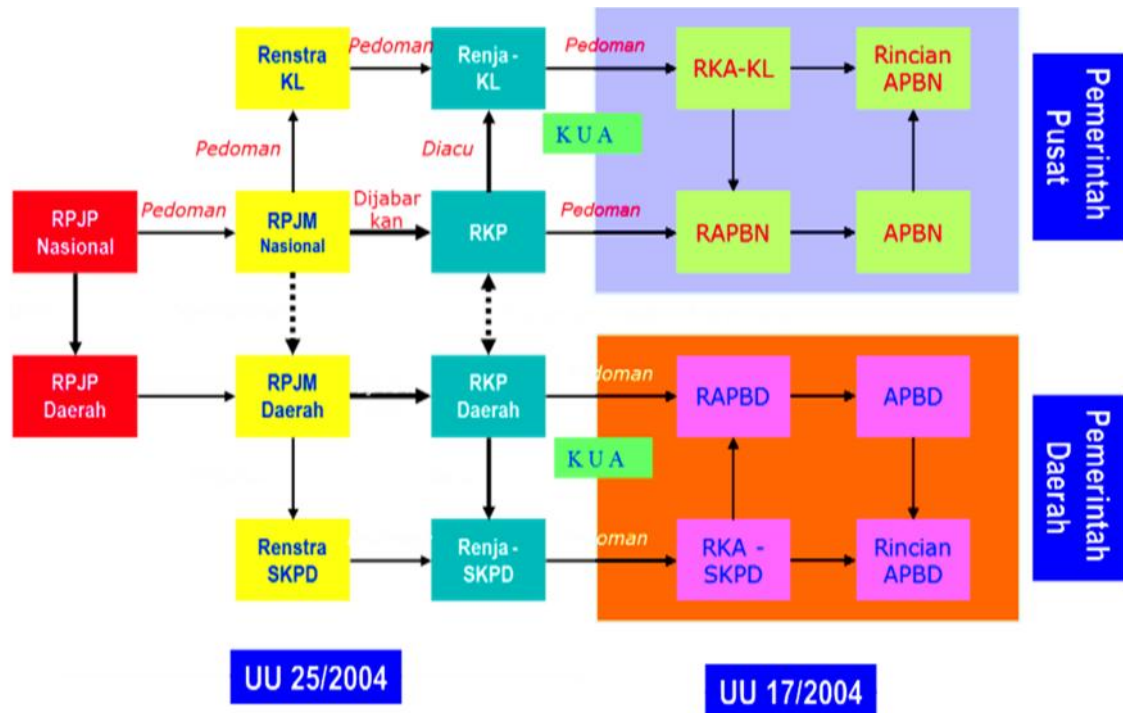
22. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 – 2030;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Bolango tahun 2005 – 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2016. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri No 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-SKPD, (4) RKPD dan (5) Renja-SKPD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hirarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1

Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Secara rinci keterkaitan RKPD 2018 dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yakni sebagai berikut :

- RKPD 2018 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP melalui mekanisme Musrenbang
- RKPD 2018 disusun dengan berpedoman pada arahan RPJM Daerah ketiga (2016-2021).
- RKPD 2018 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tiap SKPD Kabupaten Bone Bolango.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 ini harus memiliki sinkronisasi dengan dokumen RKP Tahun 2018, RKPD Propinsi Tahun 2018 dan RPJM Daerah ketiga (2016-2021). Selain itu kedudukan RKPD Kabupaten tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Bone Bolango tahun 2011-2030.

#### **1.4. Sistematika Dokumen RKPD**

RKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

#### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Berisi tentang hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RTRW nasional, RTRW Propinsi, dan RTRW Kabupaten.

#### **1.4. Sistematika Dokumen RKPD**

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

#### **1.5. Maksud dan Tujuan**

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

## **BAB II.EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

### **2.1. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

### **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.**

Bab ini mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu dan realisasi target indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

### **2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah, isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

## **BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP, RKPD Provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten.

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah.



## **BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Berisi tentang perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD tahun 2018 berdasarkan pada RPJMD ketiga (2016-2021) dalam RPJPD Kab. Bone Bolango tahun 2005-2025.

### **4.2. Prioritas dan Program Pembangunan Tahun 2018**

Berisi gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan prioritas utama pembangunan Kabupaten Bone Bolango pada RPJMD ketiga 2016-2021.

## **BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Berisi rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018

## **BAB VI. PENUTUP.**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017**

Evaluasi hasil kinerja pelaksanaan kebijakan dan program yang didasarkan pada RKPD tahun lalu dan hasil evaluasi atas kinerja akhir masa Jabatan Bupati merupakan bagian penting untuk menilai pencapaian program dan kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dimaksud dilakukan untuk menilai pencapaian kinerja terhadap apa yang telah ditetapkan dengan hasil yang diperoleh pada tahun lalu dan tahun berjalan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tahun rencana 2018.

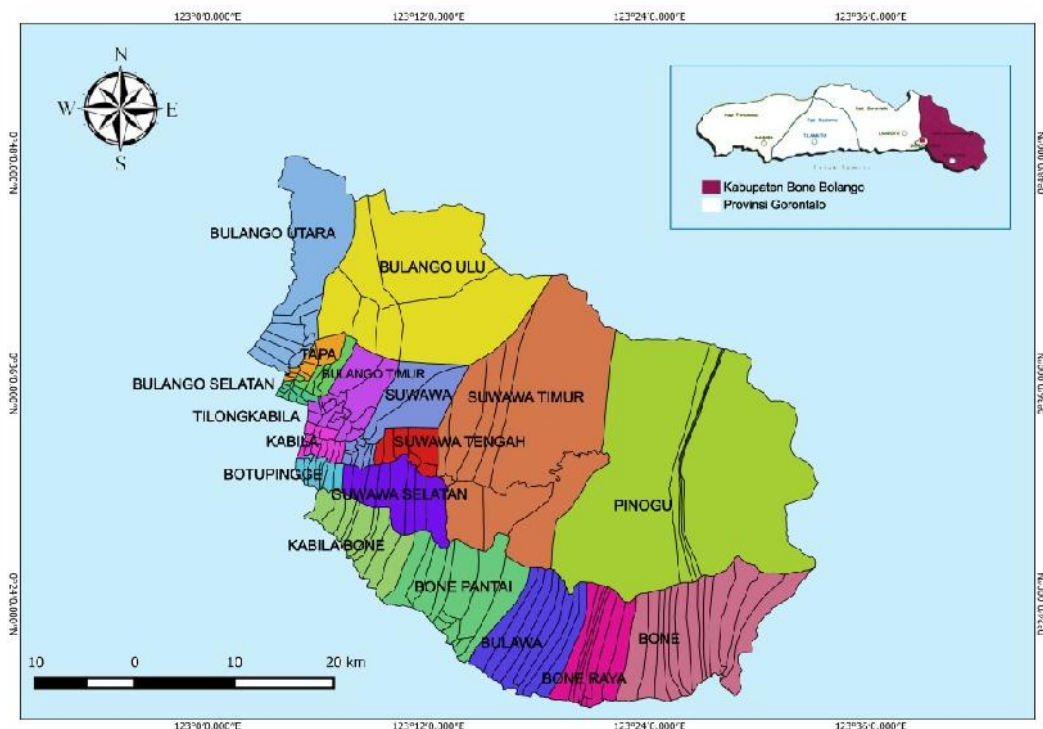
#### **2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Kabupaten Bone Bolango dibentuk berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269). Bertitik tolak Amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 serta mengingat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tanggal 22 Desember yang mengatur Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo yang saat pembentukan hanya memiliki tiga daerah. Atas semangat dan aspirasi seluruh kalangan masyarakat di empat Kecamatan di Kabupaten Gorontalo masing-masing Kecamatan Suwawa, Kabila, Tapa dan Bonepantai dibentuklah Komite Solidaritas Pembentukan Kabupaten Baru (KSPKB). Komite ini berusaha, berjuang menjadikan empat kecamatan ini untuk menjadi suatu daerah Kabupaten. Tepat tanggal 6 Mei 2003 diresmikanlah Kabupaten Bone Bolango sebagai Kabupaten yang keempat di Provinsi Gorontalo sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.

### 2.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1984,58 Km<sup>2</sup> dan luas lautan sebesar 392,68 Km<sup>2</sup> dengan panjang pantai 61 Km. Dengan luas wilayah tersebut maka Kabupaten Bone Bolango memiliki proporsi wilayah 16,24% dari luas Provinsi Gorontalo.

Gambar 2.1  
Peta Wilayah Kabupaten Bone Bolango



Sumber : RTRW Kabupaten Bone Bolango 2011.

### 2.1.2 Luas Wilayah

Kabupaten Bone Bolango memiliki 18 kecamatan, 160 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Pinogu (361,40 Km<sup>2</sup>) dan yang paling kecil wilayahnya adalah Kecamatan Bulango Selatan (9,87 Km<sup>2</sup>). Kecamatan dengan desa terbanyak adalah Kecamatan Tilongkabila dan Kecamatan Bone (14 desa), sedangkan kecamatan dengan desa paling sedikit adalah Kecamatan Bulango Timur serta kecamatan yang mempunyai 5 kelurahan adalah Kecamatan Kabila. Untuk lebih jelas mengenai pembagian wilayah administrasi Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

**Tabel 2.1**  
**Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bone Bolango**

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LUAS ( KM <sup>2</sup> )	PERSENTASE
1.	Tapa	7	64,41	3,25
2.	Bulango Utara	9	176,1	8,87
3.	Bulango Selatan	10	9,87	0,50
4.	Bulango Timur	5	10,82	0,55
5.	Bulango Ulu	6	78,41	3,95
6.	Kabila	12	193,45	9,75
7.	Botupingge	9	47,11	2,37
8.	Tilongkabila	14	79,74	4,02
9.	Suwawa	10	33,51	1,69
10.	Suwawa Selatan	8	184,09	9,28
11.	Suwawa Timur	9	127,80	6,44
12.	Suwawa Tengah	6	64,70	3,26
13.	Kabila Bone	9	143,51	7,23
14.	Bonepantai	13	161,82	8,15
15.	Bulawa	9	111,01	5,59
16.	Bone Raya	10	64,12	3,23
17.	Bone	14	72,71	3,66
18.	Pinogu	5	361,40	18,21
<b>JUMLAH</b>		<b>165</b>	<b>1984,58</b>	<b>100</b>

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango

### 2.1.3 Batas Wilayah

Secara geografis wilayah Kabupaten Bone Bolango terletak antara 00° 18'25" – 00° 48' 21" Lintang Utara dan 123° 03' 41" – 123° 33' 06" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Bone Bolango pada sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Selatan dan Kota Timur Kota Gorontalo, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dan Kecamatan Kota Utara serta Kota Timur Kota Gorontalo.

Secara ekonomi wilayah Bone Bolango sangat berdekatan dengan wilayah Kota Gorontalo sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang berdampak penting bagi perkembangan wilayah Bone Bolango. Dengan aksesibilitas yang tinggi tersebut, pengaruh pembangunan di wilayah Kota Gorontalo memiliki pengaruh langsung bagi mobilitas ekonomi di Kabupaten Bone Bolango.

Wilayah Kabupaten Bone Bolango sebelah timur dan utara umumnya merupakan kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone sebagai kawasan penyangga (buffer area) ekosistem lingkungan. Berdasarkan kondisi ini, lahir sebuah konsep inovatif untuk merencanakan wilayah tersebut sebagai kawasan penyangga (buffer area) dan secara bertahap membuka akses lintas utara selatan melalui berbagai program strategis antara lain pembukaan jalan Tapa – Atinggola, membangun jalan lingkar dalam rangka pengembangan berbagai wilayah kawasan yang berpotensi untuk meningkatkan produktivitas sumber daya alam antara lain sektor pertanian dan peternakan serta perkebunan. Disamping itu, terdapat beberapa wilayah yang berpotensi pengembangan kawasan kepariwisataan daerah.

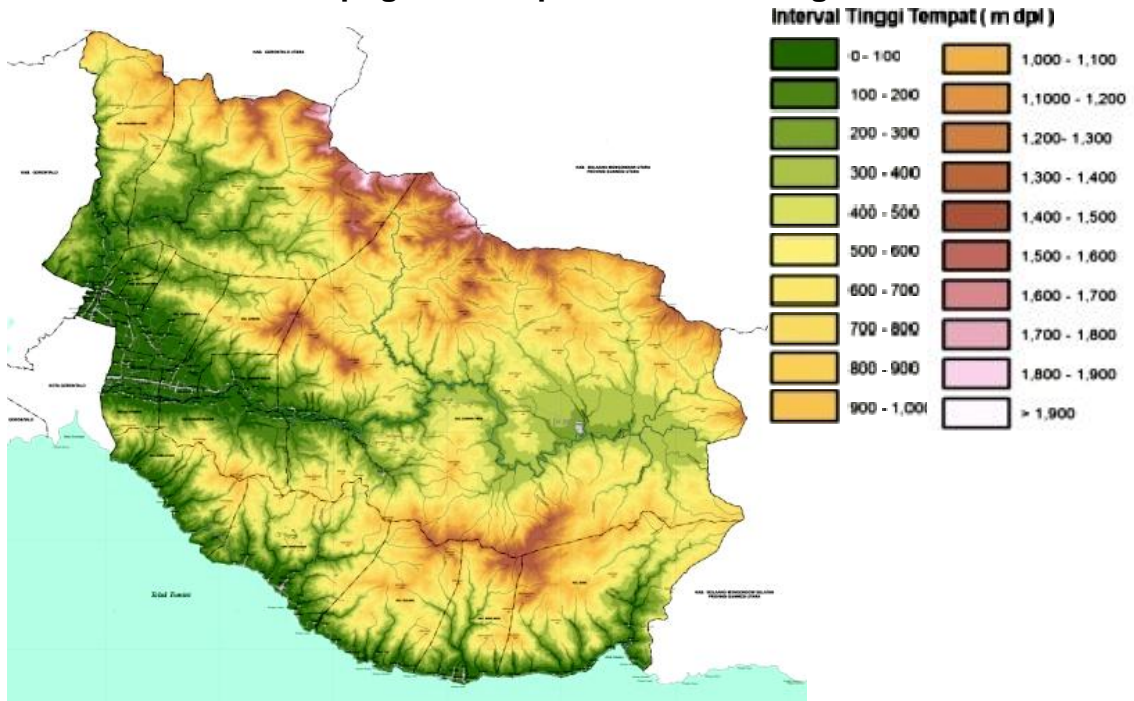
#### **2.1.4 Topografi**

Sebagian besar wilayah Bone Bolango merupakan daerah dataran tinggi (pegunungan) dengan kondisi topografi yang terbagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yakni :

- a. Kondisi lahan dengan permukaan dataran tinggi (bergunung) atau berada pada kemiringan lereng di atas 40%. Persebaran lahan berada di Kecamatan Suwawa, Bonepantai, Kabila dan Bulango Utara.
- b. Kondisi lahan dengan relief berbukit (bergelombang) dengan tekstur morfologi sedang. Persebaran lahan sebagian besar berada di setiap Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango.
- c. Kondisi dengan relief permukaan rendah. Persebaran lahan berada di Kecamatan Tapa, Suwawa dan Kabila.

Gambar: 2.2

Peta Topografi Kabupaten Bone Bolango



Tabel 2.2  
Ketinggian Daerah Kabupaten Bone Bolango  
dari Permukaan Laut

KETINGGIAN DARI PERMUKAAN LAUT	LUAS (Ha)
25 – 100 meter	14,41
100 – 500 meter	48,65
500 – 1000 meter	27,85
> 1000 meter	9,09

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Kotamobagu, Sulawesi, skala 1:250.000, (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 1997) formasi geologi Kabupaten Bone Bolango dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) formasi, yaitu: aluvium endapan pantai (Qal), aluvium endapan danau (Qvl), Molasa Selebes (Qts), Batuan Gunung Api Pinogu (TQpv), Diorit Bone (Tmb), Batuan Gunung Api Bilungala (Tmbv), dan Anggota Batugamping Formasi Tapadaka (Tmtl).

Wilayah Bone Bolango dilalui oleh beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS). Daerah Aliran Sungai (DAS) terbesar yang melalui wilayah ini adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Bone dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bolango, dimana Kecamatan yang dilalui adalah Kecamatan Suwawa, Kecamatan Kabila dan Kecamatan Tapa. Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) ini adalah  $\pm$  265.000 Ha dengan panjang sungai utama 100 Km yang bermuara ke Teluk Tomini. Kedua DAS ini bermuara pada satu tempat yaitu Teluk Tomini/Teluk Gorontalo. Di samping itu juga ditemukan banyak DAS-DAS kecil lainnya yang umumnya terdapat di hampir seluruh wilayah pegunungan di pinggiran kawasan pantai.

**Gambar : 2.3**  
**Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Bone Bolango**



Sumber : RTRW Kab. Bone Bolango 2011

**Tabel 2.3**  
**Nama-Nama Sungai Besar dan Kecil**  
**Di Kabupaten Bone Bolango**

<b>NAMA SUNGAI</b>	<b>PANJANG (KM)</b>	<b>KECAMATAN YANG DILALUI</b>
Bone	90,00	Suwawa, Botupingge, Kabila
Bolango	40,00	Tapa, Bulango, Tilongkabila
Tambo	3,50	Kabila Bone
Inengo	10,25	Kabila Bone
Kiki	5,00	Kabila Bone
Mlotabu	5,50	Kabila Bone
Aladi	5,00	Kabila Bone
Bututonuo	7,25	Kabila Bone
Olhuta	3,75	Kabila Bone
Oele	4,00	Bone Pantai
Tolotio	6,25	Bone Pantai
Butalo	11,50	Bone Pantai
Bilungala	15,00	Bone Pantai
Tongokiki	6,50	Bone Pantai
Tongodaa	2,75	Bone Pantai
Uabanga	7,75	Bone Pantai, Bone Raya
Tombulilato	20,00	Bone Raya
Ombulo	3,50	Bone Raya
Mamunga Daa	7,00	Bone Raya
Mopuya Daa	5,00	Bone Raya
Mopuya Kiki	3,50	Bone Raya
Tapambudu	3,25	Bone Raya, Bone
Monano	9,50	Bone
Topidaa	3,50	Bone
SogitaDaa	6,50	Bone
Sogita Kiki	5,50	Bone
Taludaa	18,00	Bone

Sumber : Peta Rupa Bumi Indonesia, Tahun 199



### 2.1.5 Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Bone Bolango sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4**  
**Penggunaan Lahan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016**

NO	PENGGUNAAN LAHAN	LUAS ( Ha )
		2016
1.	<b>Hutan</b>	
	1. Taman Nasional	134.156,83
	2. Hutan Lindung	15.718,25
	3. Hutan produksi tetap	836,45
	4. Hutan produksi terbatas	18.803,29
	5. Suaka Alam dan Pelestarian Alam	104.904,72
2.	<b>Hutan Basah</b>	
	1. Sawah yang diolah	2.178,40
	2. Sawah yang belum diolah	-
	3. Tambak	-
	4. Kolam dan Danau	72,00
	5. Rawa-rawa yang ditanami	4,00
3.	<b>Lahan Kering</b>	
	1. Tegalan	7.169
	2. Ladang/huma	6.444
	3. Lahan kering sementara tidak diusahakan	6.444
	4. Perkebunan	15.758
	5. Penggembalaan/ padang rumput	2.936
4.	<b>Bangunan dan lain-lain</b>	
	1. Pekarangan/tanah untuk bangunan	487
	2. Rumah bangunan dan halaman sekitar	7.355
	3. Lain – lain	9.376
<b>Total</b>		<b>332.642,94</b>

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan dan Peternakan Kab. Bone Bolango

(\*) Data masih sementara dalam pengolahan dan perampungan

### 2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana mengacu pada perda No. 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango terbagi dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya memiliki sumberdaya alam yang cukup potensial untuk dikembangkan, terutama pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan pariwisata. Potensi pertanian dan perikanan merupakan sektor yang menjadi prioritas pengembangan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

### 2.1.7 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, penduduk pertengahan tahun 2015 Kabupaten Bone Bolango adalah sebesar 158.550 jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebesar 79.589 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 78.961 jiwa.

Penduduk Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 yang tersebar di 18 kecamatan berjumlah 158.550 jiwa. Kecamatan Kabila dengan Luas daerah 193,45 Km dan ditempati oleh 23.634 penduduk, merupakan kecamatan dengan penduduk paling padat apabila dibandingkan dengan 17 kecamatan lainnya. Sex ratio atau angka perbandingan antar jenis kelamin penduduk tahun 2015 sebesar 101. Artinya bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan.

**Tabel. 2.5.**  
**Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan**  
**Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016**

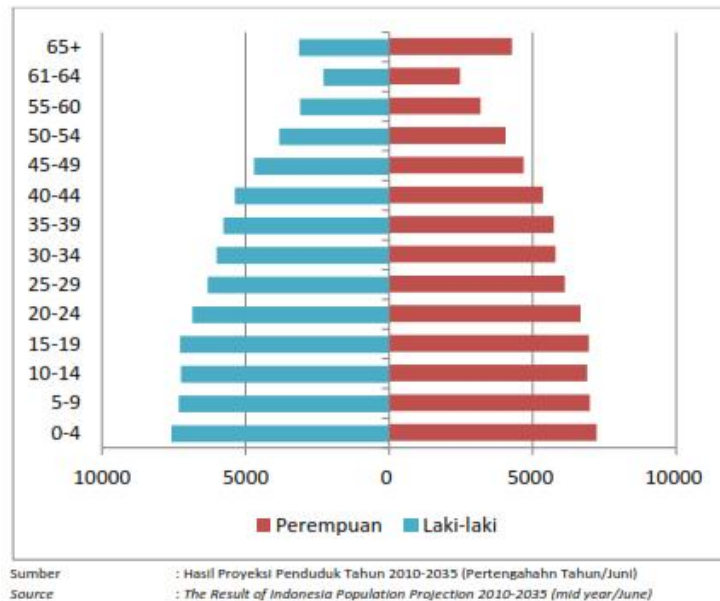
KECAMATAN	LUAS		PENDUDUK		KEPADATAN PENDUDUK (ORANG/KM)
	KM	%	JUMLAH	%	
1. Tapa	64,41	3,25	7521	4,71	117
2. Bulango Utara	176,1	8,87	7870	4,93	45
3. Bulango Selatan	9,87	0,5	10841	6,79	1 098
4. Bulango Timur	10,82	0,55	5652	3,54	522
5. Bulango Ulu	78,41	3,95	4010	2,51	51
6. Kabila	193,45	9,75	23162	14,51	120
7. Botupingge	47,11	2,37	6464	4,05	137
8. Tilongkabila	79,74	4,02	18438	11,55	231
9. Suwawa	33,51	1,69	12625	7,91	377
10. Suwawa Selatan	184,09	9,28	5325	3,33	29
11. Suwawa Timur	127,8	6,44	5364	3,36	42
12. Suwawa Tengah	64,7	3,26	6341	3,97	98
13. Pinogu	406,78	18,21	2034	1,27	5
14. Bonepantai	161,82	8,15	10 905	6,85	67
15. Kabila Bone	143,51	7,23	11206	7,02	78
16. Bone raya	64,12	3,23	6891	4,32	107
17. Bone	72,71	3,66	9686	6,07	133
18. Bulawa	111,01	5,59	5339	3,34	48
<b>Bone Bolango</b>		<b>100</b>	<b>159674</b>	<b>100</b>	<b>80</b>

**Tabel. 2.6.**  
**Jumlah dan Rasio Penduduk Menurut Kecamatan**  
**Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016**

KECAMATAN	PENDUDUK			
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO
1. Tapa	3710	3811	7521	0,98
2. Bulango Utara	3976	3894	7870	1,02
3. Bulango Selatan	5394	5447	10841	0,99
4. Bulango Timur	2780	2872	5652	0,97
5. Bulango Ulu	2079	1931	4010	1,07
6. Kabila	11467	11695	23162	0,98
7. Botupingge	3289	3175	6464	1,03
8. Tilongkabila	9181	9257	18438	0,99
9. Suwawa	6322	6303	12625	1
10. Suwawa Selatan	2700	2625	5325	1,03
11. Suwawa Timur	2759	2605	5364	1,06
12. Suwawa Tengah	3230	3111	6341	1,03
13. Pinogu	1048	986	2034	1,06
14. Bonepantai	5546	5359	10905	1,03
15. Kabila Bone	5770	5436	11206	1,06
16. Bone raya	3520	3371	6891	1,04
17. Bone	4928	4758	9686	1,03
18. Bulawa	2745	2594	5339	1,06
<b>Kab. Bone Bolango</b>	<b>80444</b>	<b>79230</b>	<b>159674</b>	<b>1,01</b>

Sumber data: Capil Bone Bolango 2016

**Grafik 2.1.  
Struktur Umur Penduduk Kab. Bone Bolango  
Tahun 2015**



### 2.1.8 Ketenagakerjaan

Walaupun sektor pertanian masih mendominasi perekonomian Bone Bolango, namun persentase penduduk yang bekerja di sektor tersebut kian menurun. Diduga hal ini dikarenakan adanya alih fungsi lahan sehingga masyarakat beralih ke sektor perdagangan, jasa kemasyarakatan, pertambangan, bangunan, transportasi dan lainnya.

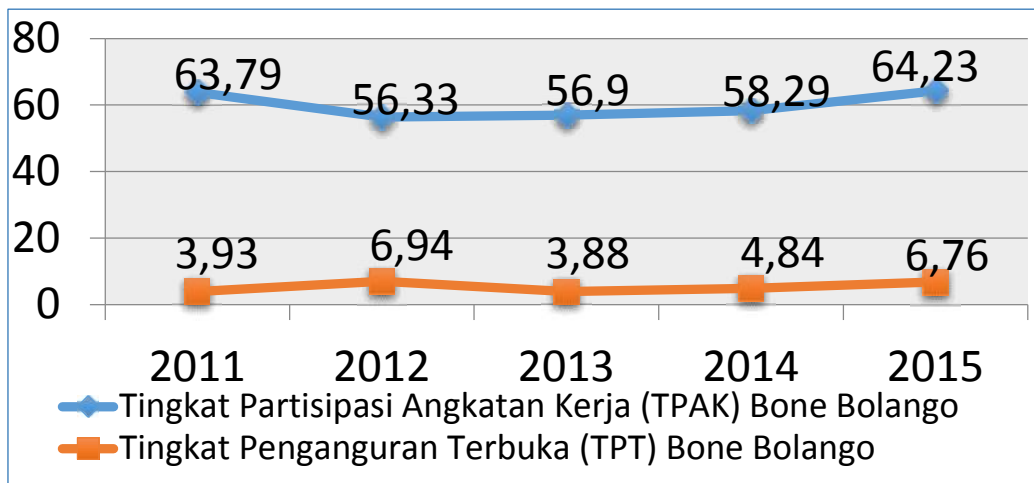
Dalam empat tahun terakhir TPAK Kabupaten Bone Bolango di atas 50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah penduduk Kabupaten Bone Bolango merupakan penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Di tahun 2015, dari 100 orang usia kerja, 64 orang di antaranya tergolong angkatan kerja (yang aktif secara ekonomi).

**Tabel 2.7**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja**  
**Menurut Lapangan Usaha**  
**Periode 2011-2015**

JENIS PEKERJAAN	JUMLAH PEKERJA PER TAHUN (%)				
	2011	2012	2013	2014	2015
1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan	28,43	27,25	28,74	31,64	25,26
2. Industri Pengolahan	7,09	3,52	3,97	4,21	5,29
3. Perdagangan Besar, eceran, rumah makan dan Hotel	13,30	16,54	16,59	15,75	29,47
4. Jasa kemasyarakatan	24,81	25,47	25,93	22,59	21,81
5. Lainnya (pertambangan, listrik, gas, air, bangunan, transportasi dan keuangan)	26,37	27,22	24,77	25,81	28,37
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016

**Grafik 2.2**  
**Tingkat Pengangguran dan Patisipasi Angkatan Kerja**



**Tabel. 2.8**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama**  
**Di Kabupaten Bone Bolango**

<b>JENIS KEG UTAMA</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
I. Angkatan Kerja			
1. Bekerja	56 252	59 913	66 015
2. Penganggur	2 268	3 044	4 783
II. Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, Mengurus Ruta, dan Lainnya)	44 321	45 056	39432
<b>Jumlah</b>	<b>102 841</b>	<b>108 013</b>	<b>110 230</b>

**Tabel. 2.9.**  
**Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama**  
**dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Bone Bolango**

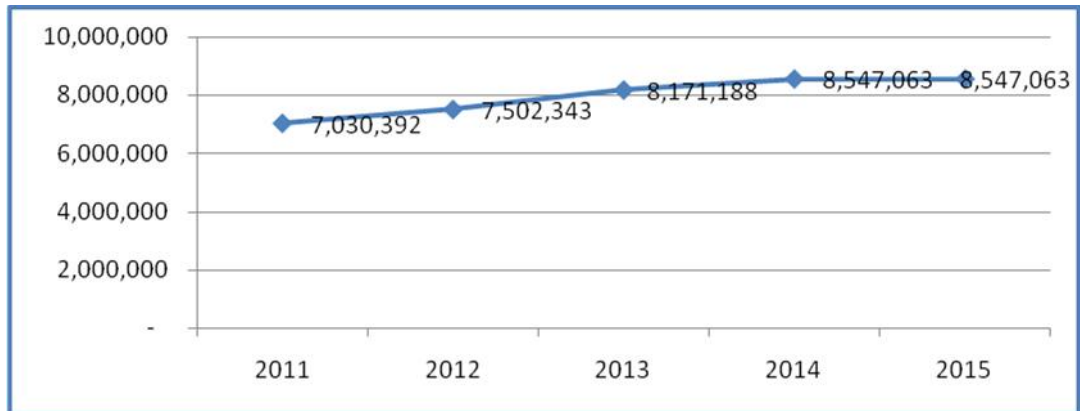
<b>JENIS KEGIATAN UTAMA</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>I. Angkatan Kerja</b>	45 888	24 910	<b>70 798</b>
1. Bekerja	44 067	21 948	66015
2. Penganggur	1 821	2 962	4 783
<b>II. Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>8 888</b>	<b>30 544</b>	<b>39 432</b>
1 Sekolah	5 721	6 729	12 450
2 Mengurus Rumah Tangga	1 493	22 654	24 147
3 Lainnya	1 674	1 161	2 835
<b>Jumlah/ Total</b>	<b>54776</b>	<b>55 454</b>	<b>110 230</b>
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</b>	83.77	44.92	64.23
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>	<b>3.97</b>	<b>11.89</b>	<b>6.76</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

## 2.2 Aspek Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Indikator peningkatan pendapatan masyarakat diperoleh dari data PDRB perkapita kabupaten Bone Bolango yang dirilis oleh BPS Bone Bolango. PDRB perkapita adalah PDRB atas harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan perkapita dapat diartikan pula sebagai penerimaan yang diperoleh rumah tangga yang dapat mereka belanjakan untuk konsumsi yaitu yang dikeluarkan untuk pembelian barang konsumtif dan jasa-jasa, yang dibutuhkan rumah tangga bagi pemenuhan kebutuhan mereka.

**Grafik 2.3.**  
**Perbandingan PDRB Perkapita (jutaan rupiah)**  
**Tahun 2011 – 2015**



Sumber data : BPS Bone Bolango

Tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Bone Bolango dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan yang cukup sebagaimana grafik diatas berada di tahun 2014, dimana kenaikan pendapatan perkapitanya hanya sebesar Rp. 375.875 dibandingkan dengan kenaikan di tahun 2013 sebesar Rp. 668.845.

**Tabel. 2.10.**  
**Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013 s/d 2016**

<b>LAPANGAN USAHA</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015*</b>	<b>2016**</b>
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,39	6,92	5,83	6,94
Pertambangan dan Penggalian	0,72	0,70	(0,21)	(1,96)
Industri Pengolahan	7,65	6,32	5,29	8,13
Pengadaan Listrik dan Gas	7,94	8,92	0,69	9,56
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,21	11,90	6,92	14,76
Konstruksi	11,58	15,97	9,66	8,37
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,53	10,14	8,37	9,27
Transportasi dan Pergudangan	7,00	5,98	7,86	5,82

<b>LAPANGAN USAHA</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015*</b>	<b>2016**</b>
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	5,31	9,04	9,79	9,00
Informasi dan Komunikasi	5,54	7,18	7,60	9,82
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,22	6,75	11,97	19,04
Real Estate	5,86	3,24	4,56	8,83
Jasa Perusahaan	15,56	9,70	7,41	6,05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,15	4,88	4,07	0,27
Jasa Pendidikan	13,25	8,98	7,20	3,77
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,95	6,13	8,77	7,82
Jasa Lainnya	8,32	6,21	4,02	3,57
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>7,63</b>	<b>7,72</b>	<b>6,52</b>	<b>6,61</b>

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango

\*) Angka Sementara

\*\*) Angka Sangat Sementara

### Struktur Ekonomi Daerah

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Bone Bolango masih didominasi dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya sumbangan kategori tersebut terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bone Bolango. Sumbangan terbesar pada tahun 2015 dihasilkan oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kemudian kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, kategori Konstruksi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan kategori Industri Pengolahan. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen.



**Tabel. 2.11**  
**Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bone Bolango**  
**Tahun 2011 – 2015 atas Dasar Harga Berlaku (%)**

	<b>LAPANGAN USAHA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015*</b>	<b>2016**</b>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36,06	35,33	35,66	35,70	36,16
B	Pertambangan dan Penggalian	2,32	2,18	2,02	1,90	1,71
C	Industri Pengolahan	6,03	6,02	6,22	6,22	6,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	9,88	10,38	11,24	11,70	11,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,23	11,66	11,98	12,32	12,70
H	Transportasi dan Pergudangan	1,16	1,15	1,11	1,11	1,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,04	1,02	1,01	1,05	1,07
J	Informasi dan Komunikasi	1,99	1,88	1,83	1,81	1,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,03	2	1,97	2,04	2,24
L	Real Estat	2,83	2,8	2,63	2,58	2,63
M,N	Jasa Perusahaan	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	13,73	13,33	12,46	11,69	11,69
P	Jasa Pendidikan	4,47	4,78	4,66	4,63	4,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	4,91	5,11	4,9	4,99	5,01
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,15	2,2	2,13	2,08	2,00
<b>PRODUK</b>	<b>DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 2.2.1 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang menjabarkan tingkat stabilitasi ekonomi pada strategi daerah. Inflasi di Kabupaten Bone Bolango selama lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Tahun 2013 sebesar 6%, tahun 2014 mencapai 7% serta tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 5% - 7% dan 5%. Pada tahun 2017 diprediksi inflasi pada angka 5% - 7%, dan di tahun 2018 proyeksi inflasi kemungkinan akan sama dengan tahun 2017, akan tetapi pergerakan inflasi tersebut masih akan berada dalam kisaran dibawah dua digit. Prediksi tersebut didasarkan pada asumsi kemungkinan naiknya harga BBM dan pengurangan subsidi BBM sehingga akan memicu pergerakan harga pada komoditas-komoditas pokok lainnya.

## 2.2.2 PDRB Perkapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita, PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Pada tahun 2015, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Bone Bolango mencapai 20,49 juta Rupiah perkapita pertahun, hal ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Bone Bolango rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar 20,49 juta rupiah selama tahun 2015. Pertumbuhan PDRB perkapita atas dasar harga konstan tahun 2015 mencapai 5,08 persen dibandingkan tahun 2014, sedikit mengami perlambatan dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2014 (6,20 persen).

**Tabel 2.12.**  
**PDRB Perkapita Kab. Bone Bolango Menurut Lapangan Usaha (Rp)**  
**Tahun 2011 – 2015**

<b>LAPANGAN USAHA</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014*</b>	<b>2015**</b>
<b>Nilai PDRB (Miliar Rp)</b>					
a. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	1.939,08	2.175,27	2.424,75	2.768,30	3.137,78
b. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010	1.838,62	1.975,88	2.126,54	2.290,61	2.439,87

LAPANGAN USAHA	2011	2012	2013	2014*	2015**
<b>PDRB per Kapita (Ribu Rp)</b>					
a. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	13.401,17	14.820,66	16.276,65	18.321,70	20.486,13
b. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010	12.706,89	13.462,15	14.274,89	15.160,16	15.929,59
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	5,32	5,94	6,04	6,2	5,08
Jumlah Penduduk (Jiwa)	144.695	146.773	148.971	151.094	153.166
Pertumbuhan Jumlah Penduduk	1,52	1,44	1,5	1,43	1,37

\*) Angka Sementara

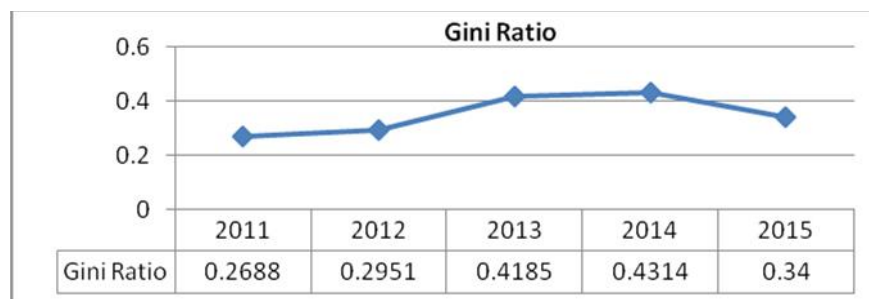
\*\*) Angka Sangat Sementara

Sumber BPS Kab. Bone Bolango

### 2.2.3 Indeks Gini/Tingkat Kemerataan

Tingkat pemerataan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pemerataan distribusi pendapatan yang sering diukur dengan koefisien gini dan persentase kemiskinan. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan yang ditentukan oleh Bank Dunia (World Bank) adalah  $G < 0,40$  berarti ketimpangan rendah, antara  $0,40 \leq G < 0,50$  berarti ketimpangan sedang dan  $G > 0,50$  berarti ketimpangan tinggi. Gambaran koefisien gini atau Gini Ratio di Kabupaten Bone Bolango, seperti terlihat pada Tabel dibawah ini:

**Grafik 2.4.**  
**Gini Ratio Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015**

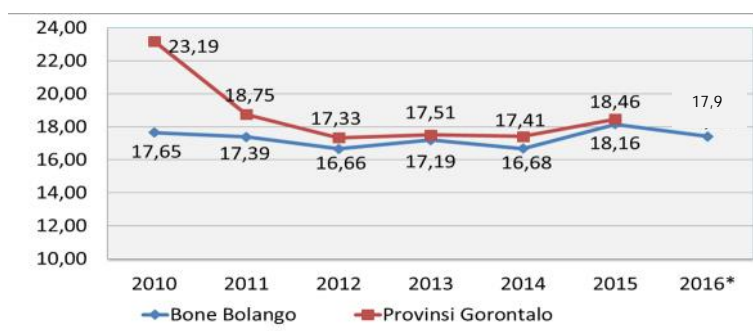


Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dimana pada tahun 2011 dan 2012 kondisi gini ratio Kabupaten Bone Bolango berada pada angka  $< 0,40$  yang berarti memiliki tingkat ketimpangan yang rendah, sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 angka gini ratio  $> 0,40$  yang berarti memiliki tingkat ketimpangan yang sedang yaitu 0.4314. Pada tahun 2015 angka gini ratio kembali menurun dan berada  $< 0,40$  yakni 0.34 yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah.

## 2.2.4 Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

**Grafik 2.5**  
**Trend Kemiskinan Tahun 2010 – 2016\***



Sumber data :BPS Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa trend penurunan angka kemiskinan dari tahun 2011 sampai dengan 2014 cenderung positif, namun di tahun 2015 angka kemiskinan naik menjadi. Angka kemiskinan tahun 2016 sebesar 17,9%.

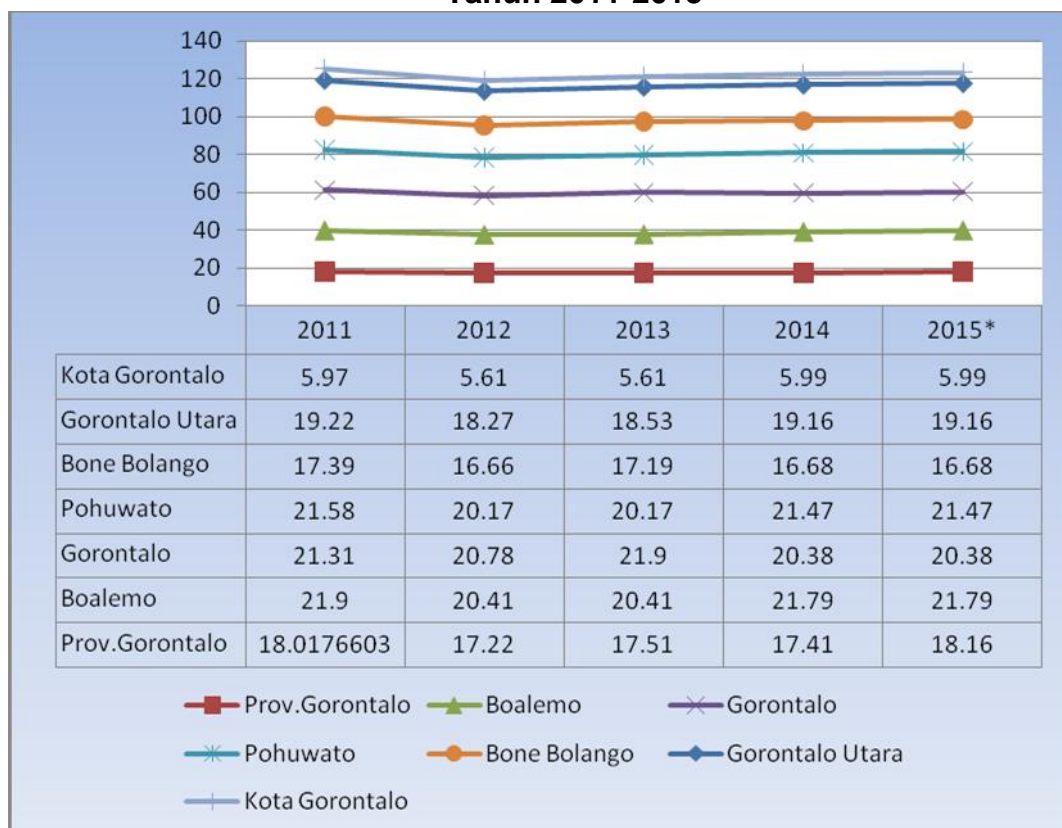
Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan yang menunjukkan nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Angka kemiskinan ditargetkan pada tahun 2016 ditargetkan turun sejumlah 0,24% atau menjadi 16,44% dari proporsi penduduk miskin sebesar 16,68% pada tahun 2016.

Kenaikan angka kemiskinan pada tahun 2016 tersebut tidak sesuai target dengan meningkatnya angka garis kemiskinan yang pada setiap tahun mengalami kenaikan akibat faktor-faktor eksternal seperti inflasi pada komoditas bahan makanan dan komponen konsumsi masyarakat lainnya. Menurut data Bank Indonesia, faktor kenaikan bahan bakar minyak dan gas elpiji serta

keterbatasan supply beberapa komoditas bahan makanan pokok adalah pemicu utama terjadinya inflasi yang berdampak pada kenaikan angka garis kemiskinan. Selain laju inflasi faktor penyebab meningkatnya angka kemiskinan dikarenakan program yang direncanakan tidak tepat sasaran (berdasarkan hasil temuan BPK)

Beberapa program yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan tersebut antara lain Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (JAMKESPRA) disamping JAMKESMAS, bantuan RASKIN, bantuan Rumah Layak Huni, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan beasiswa bagi masyarakat miskin, bantuan usaha mikro, kecil dan menengah, bantuan ternak dan redistribusi ternak, bantuan benih, pupuk dan alat mesin pertanian, bantuan benih, pakan serta sarana prasarana perikanan, bantuan bagi korban bencana, bantuan usaha perempuan, serta kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program SKPD.

**Grafik 2.6.**  
**Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Kota**  
**Tahun 2011-2015**



Sumber data : BPS Bone Bolango

Dilihat dari kemampuan daerah menyediakan lapangan kerja bagi penduduk Bone Bolango menunjukkan kecenderungan yang positif. Target yang ditetapkan pada akhir tahun 2015 yang diharapkan dibawah 16,44% belum dapat dicapai atau cenderung naik 0,24% menjadi 16,68%. Berdasarkan hasil kajian BPS Kabupaten Bone Bolango, bertambahnya jumlah pengangguran tersebut utamanya disebabkan terjadinya penambahan jumlah penduduk usia kerja yang baru menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMA/SMK dan Madrasah Aliyah namun belum terserap oleh dunia usaha.

## 2.3 Kesejahteraan Sosial dan Layanan Umum

### 2.3.1 Pendidikan

Beberapa aspek utama yang menjadi parameter utama mengukur perkembangan kesejahteraan masyarakat yakni aspek pendidikan, aspek kesehatan, kepemilikan asset lahan serta kesempatan kerja masyarakat yang dapat menjamin penghidupan masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable livelihood*). Beberapa capaian kinerja pendidikan di Kabupaten Bone Bolango dalam lima tahun terakhir, yakni sebagai berikut:

#### 1. Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah dari kurun waktu 2014 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan. Tahun 2014 Angka Rata-rata Lama Sekolah 12,33 dan di tahun 2016 sebesar 13,02. Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bone Bolango ini dapat dimaknai bahwa penduduk Bone Bolango semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

URAIAN	2014	2015	2016
Angka Rata-rata Lama Sekolah	12,33	12,76	13,02

Data Sumber : BPS Kabupaten Bone Bolango

#### 2. Angka Partisipasi Kasar

Tingkat partisipasi pendidikan untuk pada semua jenjang pendidikan terus mengalami perbaikan walaupun pada jenjang pendidikan SMP dan SMA masih berada dibawah 100%. Artinya masih cukup besar jumlah anak

usia sekolah SMP dan SMA yang belum dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tersebut.

**Tabel 2.13.**  
**Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan**  
**Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015**

URAIAN	TAHUN (%)		
	2014	2015	2016
<b>ANGKA PARTISIPASI KASAR</b>			
TINGKAT SD	91,44	102,45	91,32
TINGKAT SMP	75,91	81,45	87,6
TINGKAT SMA	62,49	70,50	78,37

Sumber Data : Dikbud Kabupaten Bone Bolango

### 3. Angka Partisipasi Murni

APM adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sedangkan kegunaan atau tujuan pengukuran APM adalah **untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah**. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. APM menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada **tabel 2.15** berikut ini.

**Tabel 2.14.**  
**Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan**  
**Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014-2016**

URAIAN	TAHUN (%)		
	2014	2015	2016
<b>ANGKA PARTISIPASI MURNI</b>			
TINGKAT SD	79,82	87,23	76,56
TINGKAT SMP	55,11	52,31	55,33
TINGKAT SMA	52,13	47,62	52,17

Sumber Data : Dikbud Kabupaten Bone Bolango

#### 4. Angka Kelulusan

Angka kelulusan menjadi salah satu indikator atau tolak ukur tingkat keberhasilan sekolah dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Angka kelulusan tinggi bisa pula dianggap sebuah prestasi sehingga kebanggaan bagi sekolah yang bersangkutan. Tidak sampai disitu, angka kelulusan yang tinggi bisa juga menjadi bahan promosi untuk menarik minat calon siswa baru. Tidak mengherankan angka kelulusan ini menjadi begitu penting dan berharga bagi sekolah, terlebih apabila diumumkan sebagai sekolah dengan tingkat kelulusan atau nilai tertinggi maka euforia akan nampak jelas sekali.

Jika keberhasilan didefinisikan sebagai pencapaian tingkat kelulusan tertinggi (100%), maka setiap sekolah yang mampu mencapai nilai kelulusan 100% bisa dikatakan sebagai sekolah yang berhasil. Logikanya untuk bisa dikatakan sebagai sekolah yang berhasil maka sekolah harus mencapai tingkat kelulusan 100%, jika sebaliknya apabila sekolah tidak mampu mencapai angka kelulusan 100% maka sekolah bersangkutan dikatakan tidak berhasil. Angka Kelulusan menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada **tabel 2.15** berikut ini.

**Tabel 2.15**  
**Angka Pendidikan yang Ditamatkan menurut Jenjang Pendidikan**  
**Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2012-2016**

<b>ANGKA PENDIDIKAN YANG DITAMATAN</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	105,83	100	103	103,56
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	98,8	100	100	92,44
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99,73	98,8	99,8	98,61	101,12



## Kesehatan

Beberapa capaian kinerja bidang kesehatan di Kabupaten Bone Bolango selama lima tahun terakhir, yakni sebagai berikut:

### 1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Keadaan saat lahir merupakan faktor penting yang berhubungan signifikan dengan kelangsungan hidup bayi, faktor waktu pemberian ASI pertama kali merupakan faktor dominan yang berhubungan dengan kelangsungan hidup bayi.

**Tabel 2.16.**  
**Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)**  
**Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014-2016**

<b>ANGKA KELANGSUNGAN HIDUP BAYI</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	14	14	16

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango

### 2. Angka Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup penduduk adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup dapat diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu.

Rate atau rata-rata umur spesifik dari kematian, besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu, dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu. Harapan hidup berbeda dengan lama hidup.

Usia harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Oleh karenanya, biasanya di negara-negara maju harapan hidupnya tinggi karena pada umumnya tingkat kesehatan ibu dan bayinya tinggi. Sebaliknya,

di negara berkembang biasanya relatif rendah karena buruknya tingkat kesehatan.

**Tabel 2.17.**  
**Angka Usia Harapan Hidup**  
**Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015**

ANGKA USIA HARAPAN HIDUP	2011	2012	2013	2014	2015
	70,81	70,81	70,86	70,91	70,96

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango

### 3. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk atau malnutrisi adalah suatu bentuk terparah akibat kurang gizi menahun. Selain akibat kurang konsumsi jenis makanan bernutrisi seimbang, gizi buruk pada anak juga bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan gangguan pencernaan atau gangguan penyerapan zat makanan yang penting untuk tubuh.

Pada anak yang memiliki status *gizi buruk* biasanya akan terganggunya pertumbuhan tubuh secara fisik contohnya anak akan beresiko tumbuh kecil (kerdil). Kemudian dalam perkembangan mental anak beresiko mengalami gangguan kontrol emosi dan perasaan.

Banyak faktor yang bisa mengakibatkan gangguan nutrisi pada anak seperti pola makan anak dan kurangnya pengetahuan ibu tentang pemberian jenis makanan yang seimbang, bisa juga karena adanya penyakit atau kondisi tertentu yang menyebabkan tubuh tidak mampu mencerna dan menyerap makanan secara sempurna.

**Tabel 2.18.**  
**Pravelensi Gizi Buruk**  
**Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014-2016**

PERSENTASE BALITA GIZI BURUK	2014	2015	2016
	0,45%	0,50%	0,55%

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango

### 2.3.2 Pertanahan

Lahan memiliki arti lebih luas dari pada makna tanah, mengingat tanah hanya merupakan salah satu aspek dari lahan. Dalam hal pemanfaatan lahan, polanya lebih dekat ke arah pendayagunaan dan sekaligus pengaturan fungsi ketatalaksanaan lahan.

Pengertian lahan disini adalah pemanfaatan lahan khususnya sawah dalam menghasilkan pendapatan. Kondisi sekarang lahan pertanian banyak yang beralih fungsi mengikuti pertumbuhan penduduk dan kebutuhan dalam perkembangan ekonomi (eksternal) serta berlakunya sistem warisan keluarga (internal). Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya produksi pertanian dan sekaligus mengurangi pendapatan petani.

Salah satu fenomena yang cukup intens terjadi dalam pemanfaatan lahan adalah adanya alih fungsi (konversi) lahan. Fenomena ini muncul seiring makin tinggi dan bertambahnya tekanan kebutuhan dan permintaan terhadap lahan, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor nonpertanian akibat penambahan penduduk dan kegiatan pembangunan.

Luas lahan pertanian di Indonesia semakin lama mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beralihnya kepemilikan lahan dan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan maupun pertokoan. Kepemilikan lahan per keluarga tergolong terendah didunia, terutama sawah dan perkebunan.

Lahan pertanian merupakan komponen utama yang diperlukan dalam membangun suatu usaha pertanian. Lahan pertanian yang dimiliki juga harus dalam skala yang luas. Sama halnya dengan ke-enam sub sector usaha pertanian yang mengalami penurunan dalam selang waktu 10 tahun, Data dari BPS dalam kurun waktu sepuluh tahun (2003-2013) juga menunjukkan luas lahan pertanian di Indonesia tetap tidak mengalami peningkatan yaitu 25 juta hectare dari program pemerintah yang mengusahakan lahan pertanian baru seluas 100.000 hectare setiap tahunnya. Masalah luas kepemilikan lahan yang sempit menyulitkan para petani untuk menyangga kehidupan keluarganya. Tipologi skala usaha petani di Indonesia masih kecil sebesar 70% dengan kepemilikan lahan dibawah setengah hektare. Inilah penyebab petani Indonesia enggan keluar dari garis kemiskinan. Pada kenyataannya petani banyak petani yang merasa kesulitan untuk memperoleh modal dengan cara

kredit, terutama petani yang hanya memiliki lahan yang sempit terpaksa menyewakan tanahnya dan mereka memilih menjadi buruh tani

Penyebab utama kemiskinan petani adalah karena kepemilikan lahan yang relatif sempit, atau biasa disebut sebagai petani gurem. Data BPS menunjukkan, rumah tangga petani gurem tahun 2013 sebanyak 14,25 juta rumah tangga atau sebesar 55,33 persen dari rumah tangga pertanian pengguna lahan. Rata-rata mereka memiliki lahan di bawah 0,25 ha. Kondisi kepemilikan lahan di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada table berikut ini.

**Tabel 2.19.**  
**Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan**  
**Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015**

PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMILIKI LAHAN (%)	2011	2012	2013	2014	2015
	NA	NA	NA	0,1	0,1

### 2.3.3 Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.

Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja.

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.

**Tabel 2.20.**  
**Rasio Penduduk yang Bekerja**  
**Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015**

<b>RASIO PENDUDUK YANG BEKERJA</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	63,79	56,33	56,9	58,29	NA

## 2.4 Aspek Pelayanan Umum

### 2.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

#### A. Pendidikan

Beberapa indikator perkembangan kinerja pendidikan lainnya di Kabupaten Bone Bolango antara lain:

- Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013, demikian pula untuk APS SMP/MTs;
- Kondisi ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah untuk tingkat SD/MI pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013, akan tetapi untuk SMP/MTs mengalami penurunan;
- Meningkatnya kualitas bangunan sekolah serta tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memadai dapat mewujudkan suasana yang nyaman bagi siswa dan guru dalam melakukan proses belajar mengajar;
- Meningkatnya daya kreativitas dan kompetensi siswa melalui lomba kreativitas bagi siswa;
- Meningkatnya kompetensi guru dalam penyusunan kurikulum pendidikan karakter melalui pelaksanaan workshop guru dalam rangka pemantapan pendidikan karakter;
- Meningkatnya layanan pendidikan luar sekolah setara SD, SMP, dan SMA dengan terlaksananya pembelajaran paket A, paket B, dan paket C;
- Meningkatnya kompetensi guru dalam pembelajaran, melalui workshop dan pembinaan guru lewat forum KKG/MGMP.

Untuk capaian indikator kinerja bidang pendidikan dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.21.**  
**Capaian Kinerja APM, APK dan APS**

URAIAN	TAHUN (%)		
	2014	2015	2016
<b>ANGKA PARTISIPASI MURNI</b>			
TINGKAT SD	79,82	87,23	76,56
TINGKAT SMP	55,11	52,31	55,33
TINGKAT SMA	52,13	47,62	52,17
<b>ANGKA PARTISIPASI KASAR</b>			
TINGKAT SD	91,44	102,45	91,32
TINGKAT SMP	75,91	81,45	87,6
TINGKAT SMA	62,49	70,50	78,37
<b>ANGKA PUTUS SEKOLAH</b>			
TINGKAT SD	0,37	0,81	0,14
TINGKAT SMP	0,79	0,79	0,16
TINGKAT SMA	0	0	0,37
<b>ANGKA BUTA HURUF 15-44 THN</b>	1,22	1,10	Na
<b>ANGKA MELEK HURUF</b>	96,5	98,9	Na

*Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango*

Banyaknya sekolah yang menampung siswa TK sederajat sebanyak 302 sekolah Sedangkan jumlah sekolah yang dipakai untuk belajar siswa SD sederajat sebanyak 140 sekolah. Jumlah sekolah yang dipakai untuk belajar siswa SMP sederajat sebanyak 44 sekolah. Sedangkan jumlah sekolah yang dipakai untuk belajar siswa SMA sederajat sebanyak 21 sekolah

Jumlah murid yang masih belajar di tingkat TK sederajat di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2015 berjumlah 7 844 murid yang diajar oleh 398 orang guru. Sedangkan di tingkat SD sederajat, sejumlah 18,804 murid diajar oleh 1,410 guru, ditingkat SMP sederajat jumlah murid mencapai 7,523 siswa dengan jumlah pengajar 747 guru, dan pada tingkat SMA sederajat jumlah murid mencapai 6184 siswa dengan diajar oleh 617 orang guru

**Tabel 2.22.**  
**Banyaknya Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid - Guru TK**  
**/Raudhatul Athfal (RA)/ Bustanul Athfal (BA) Tahun 2014/2015**

KECAMATAN	SEKOLAH	MURID			GURU			RASIO MURID-GURU
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
Tapa	10	130	147	277	3	32	35	7
Bulango Utara	9	156	163	319	0	42	42	7
Bulango Selatan	7	140	137	277	1	27	28	9
Bulango Timur	4	62	59	121	4	10	14	8
Bulango Ulu	7	82	92	174	0	15	15	11
Kabila	14	256	293	549	0	46	46	11
Botupingge	7	131	99	230	0	20	20	11
Tilongkabila	12	225	214	439	0	37	37	11
Suwawa	11	180	191	371	1	34	35	10
Suwawa Selatan	5	61	68	129	0	12	12	10
Suwawa Timur	4	59	63	122	0	6	6	20
Suwawa Tengah	5	69	72	141	0	14	14	10
Pinogu	2	25	34	59	0	2	2	29
Bone Pantai	13	160	169	329	0	39	39	8
Kabila Bone	8	128	115	243	8	14	22	11
Bone Raya	4	33	39	72	0	7	7	10
Bone	8	148	151	299	0	22	22	13
Bulawa	7	101	77	178	0	19	19	9
<b>Jumlah</b>	<b>137</b>	<b>2 146</b>	<b>2 183</b>	<b>4 329</b>	<b>17</b>	<b>398</b>	<b>415</b>	<b>10</b>

**Tabel 2.23.**  
**Banyaknya Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru**  
**Sekolah Dasar Negeri (SD) Menurut Kecamatan Tahun 2014/2015**

KECAMATAN	SEKOLAH	MURID			GURU			RASIO MURID-GURU
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
Tapa	8	486	488	1 408	15	59	74	13
Bulango Utara	8	503	416	919	20	60	80	11
Bulango Selatan	7	539	467	1 006	9	70	79	13
Bulango Timur	4	265	207	472	8	31	39	12
Bulango Ulu	6	308	286	594	24	28	52	11
Kabila	15	1 385	1 351	2 736	20	150	170	16
Botupingge	4	351	300	651	8	37	45	14
Tilongkabila	9	836	836	1 672	17	84	101	17
Suwawa	8	714	694	1 408	13	65	78	18
Suwawa Selatan	5	370	346	716	14	32	46	16
Suwawa Timur	4	387	310	697	7	34	41	17

KECAMATAN	SEKOLAH	MURID			GURU			RASIO MURID-GURU
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
Suwawa Tengah	6	379	346	725	11	38	49	15
Pinogu	2	173	136	309	6	12	18	17
Bone Pantai	13	750	813	1 563	31	89	120	13
Kabila Bone	11	701	514	1 315	27	56	83	16
Bone Raya	5	402	378	780	10	36	46	17
Bone	9	661	652	1 313	13	64	77	17
Bulawa	5	357	338	695	9	40	49	14
<b>Jumlah</b>	<b>129</b>	<b>9 567</b>	<b>8 978</b>	<b>18 545</b>	<b>262</b>	<b>985</b>	<b>1 247</b>	<b>15</b>

**Tabel. 2.24.**  
**Banyaknya Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan Tahun 2014/2015**

KECAMATAN	SEKOLAH	MURID			GURU			RASIO MURID-GURU
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1. Tapa	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bulango Utara	3	148	154	302	13	28	41	7
3. Bulango Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bulango Timur	2	394	360	754	9	53	62	12
5. Bulango Ulu	3	102	114	216	6	21	27	8
6. Kabila	2	380	450	830	11	47	58	14
7. Botupingge	1	122	156	278	7	21	28	10
8. Tilongkabila	2	257	219	476	7	37	44	11
9. Suwawa	3	384	407	791	18	62	80	10
10. Suwawa Selatan	2	57	40	97	9	9	18	5
11. Suwawa Timur	2	91	93	184	6	17	23	8
12. Suwawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Pinogu	1	52	63	115	9	4	13	9
14. Bone Pantai*)	3	281	257	538	12	19	31	17
15. Kabila Bone	3	193	234	427	14	23	37	12
16. Bone Raya	1	196	194	390	3	9	12	33
17. Bone	3	210	242	452	6	19	25	18
18. Bulawa	1	89	129	218	5	10	15	15
<b>JUMLAH</b>	<b>32</b>	<b>2 956</b>	<b>3 112</b>	<b>6 068</b>	<b>135</b>	<b>379</b>	<b>514</b>	<b>12</b>



**Tabel 2.25.**  
**Banyaknya Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru**  
**Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Menurut Kecamatan 2014/2015**

KECAMATAN	SEKOLAH	MURID			GURU			RASIO MURID-GURU
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1. Tapa	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bulango Utara	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Bulango Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bulango Timur	1	236	321	557	12	28	40	14
5. Bulango Ulu	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kabila	1	353	593	946	17	36	53	18
7. Botupingge	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Tilongkabila	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Suwawa	2	332	380	712	20	29	49	14
10. Suwawa Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Suwawa Timur	1	60	54	114	6	11	17	7
12. Suwawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Pinogu	1	8	5	13	1	0	1	13
14. Bone Pantai	1	225	281	506	13	15	28	18
15. Kabila Bone	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bone Raya	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Bone	1	120	145	265	7	8	15	17
18. Bulawa	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>1334</b>	<b>1779</b>	<b>3113</b>	<b>76</b>	<b>127</b>	<b>203</b>	<b>15</b>

**Tabel 2.26.**  
**Banyaknya Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru**  
**Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Menurut Kecamatan**

KECAMATAN	SEKOLAH	MURID			GURU			RASIO MURID-GURU
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1. Tapa	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bulango Utara	1	210	222	432	16	24	40	11
3. Bulango Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bulango Timur	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Bulango Ulu	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kabila	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Botupingge	1	200	205	405	13	25	38	11
8. Tilongkabila	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Suwawa	1	518	404	922	17	40	57	16
10. Suwawa Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Suwawa Timur	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Suwawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0

KECAMATAN	SEKOLAH	MURID			GURU			RASIO MURID-GURU
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
13. Pinogu	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bonepantai	1	87	64	151	7	13	20	8
15. Kabila Bone	1	13	17	30	9	6	15	2
16. Bone Raya	1	116	152	268	6	10	16	17
17. Bone	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bulawa	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>1144</b>	<b>1064</b>	<b>2208</b>	<b>68</b>	<b>118</b>	<b>186</b>	<b>12</b>

**Tabel 2.27.**  
**Angka Putus Sekolah tahun 2014 - 2016**

ANGKA PUTUS SEKOLAH	2014	2015	2016
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,37	0,81	0,14
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,38	0,79	0,16
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0	0	0,37

Capaian kinerja peningkatan mutu tenaga pendidik dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.28.**  
**Jumlah Guru yang telah memiliki Ijazah S1**

JENJANG SEKOLAH	JUMLAH GURU YANG MEMILIKI IJAZAH S1 THN 2014	JUMLAH GURU YANG MEMILIKI IJAZAH S1 THN 2015	PERSEN
SD/MI	699	788	1,12
SLTP/MTs	133	538	4,04
SMA/MA	325	419	1,28
<b>Jumlah</b>	<b>1.157</b>	<b>1.745</b>	<b>1,50</b>

Berdasarkan data diatas diperoleh ada kenaikan guru yang memiliki kompetensi S1 dan bersertifikasi pada tahun 2015 berjumlah 1.745 orang dibandingkan tahun 2014 sebanyak 1.157 orang.

## **B. Pelayanan Kesehatan**

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data angka harapan hidup di suatu daerah berguna untuk mengevaluasi

kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus di ikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, mencakup gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator/ penilaian derajat kesehatan suatu negara dan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program-program kesehatan. Angka Harapan Hidup disebut juga lama hidup manusia didunia.

Target indikator kinerja utama yang pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 69,25% dengan realisasi 70.7% dengan kinerja pencapaian sebesar 102,09% dengan kategori **Sangat Baik**.

Angka Harapan Hidup disebut juga lama hidup manusia didunia. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator kinerja utama yang pada tahun 2011 sampai dengan 2015 mencapai 70,7%.

**Grafik 2.7**  
**Perbandingan Angka Harapan Hidup**  
**Tahun 2011 – 2015**

URAIAN	TAHUN		
	2014	2015	2016
ANGKA KEMATIAN IBU (PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP)	157	374	318
ANGKA KEMATIAN BAYI (PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP)	14	14	16
ANGKA KEMATIAN BALITA (PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP)	1,97	5	1
PRAVALENSI GIZI BURUK	0,45%	0,50 %	0,55 %
CAPAIAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE UNTUK JAMINAN KESEHATAN BAGI SELURUH RAKYAT (TAHUN 2013-2016)	100%		

Sumber data :Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango

Ada beberapa hal yang menyebabkan indikator penurunan / peningkatan kinerja angka harapan hidup adalah sebagai berikut :

*a. Angka Kematian Ibu Melahirkan*

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Angka kematian ibu juga merupakan salah

satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millenium. Angka kematian ibu melahirkan merupakan satu indikator kinerja keberhasilan daerah dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Pada tahun 2015 angka kematian ibu melahirkan ditargetkan sebesar 102 orang per 100.000 kelahiran dengan realisasi sebesar 374 per 100.000 kelahiran dengan jumlah kematian ibu melahirkan sebanyak 33 orang. Penyebab Angka Kematian Ibu Melahirkan disebabkan karena beberapa kinerja pencapaian SPM seperti yang diuraikan dibawah ini yakni Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebesar 21,56% dengan target 92% sehingga kinerja pencapaian sasaran sebesar 23,44%.

*b. Angka Kematian Balita*

Angka kematian balita pada tahun 2015 ditargetkan 16,2 per 1000 KLH. Berdasarkan data diperoleh realisasi sebesar 11,23 per 1000 KLH atau 13 Balita meninggal dari 17.541 KLH. Berdasarkan data di atas diperoleh kinerja sebesar 186,9%.

Adapun program-program yang telah menunjang untuk meningkatkan kinerja angka harapan hidup adalah

- a. Kunjungan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, serta mendapatkan 90 tablet Fe selama periode kehamilannya
- b. mengoptimalkan kinerja petugas BPLKB dalam memantau serta melakukan pelayanan bagi ibu hamil, pelayanan KB dan anak Balita
- c. Pemberian Vitamin A serta nutrisi bagi BALITA
- d. Mengoptimalkan Pos layanan pengaduan cepat (quick respon) melalui SMS center di Dinas Kesehatan.

Adapun program yang sangat efektif untuk dilakukan kedepan untuk menaikan angka harapan hidup sesauai dengan target yang tetapkan adalah

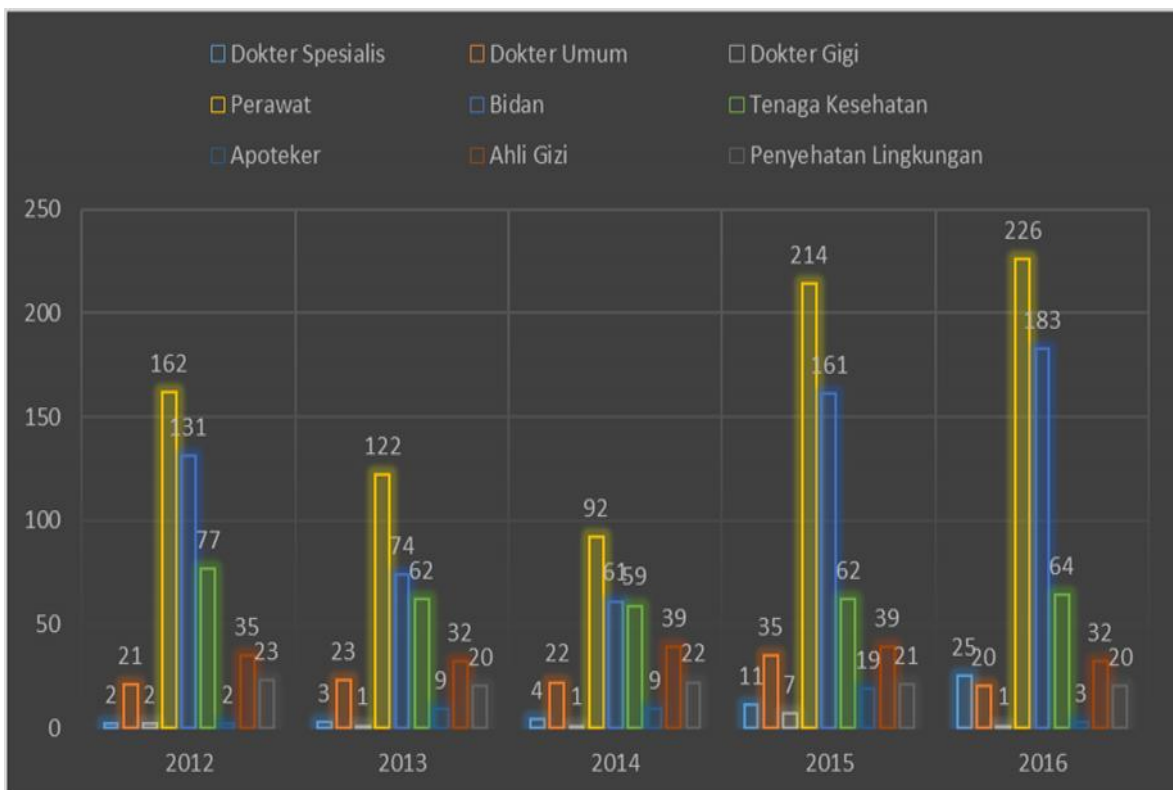
- a. Mengoptimalkan kinerja petugas dengan melakukan pemantauan, monitoring terhadap kinerja layanan terhadap BALITA melalui pertemuan-pertemuan untuk membahas perkembangan kinerja pelayanan bagi anak BALITA baik ditingkat masyarakat, pelayanan di puskesmas dan koordinasi ditingkat kabupaten, provinsi maupun nasional
- b. Mengoptimalkan koordinasi dengan Pihak pemerintah desa dan kecamatan setempat untuk mengoptimalkan layanan SMS Center.
- c. *Sarana Kesehatan dan SDM Kesehatan*

Sarana kesehatan yang terdapat di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 terdiri dari 2 unit Rumah Sakit yang dibantu oleh 20 unit Puskesmas. Tenaga medis dan paramedis adalah sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam dunia kesehatan. Dengan bantuan mereka akan sangat menolong dalam penanganan kesehatan masyarakat. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango menunjukkan bahwa pada tahun 2015, jumlah tenaga medis adalah 288 orang terdiri dari 53 dokter, 71 perawat, 153 bidan, dan 11 farmasi. Sedangkan banyaknya tenaga non-medis adalah sebanyak 113 orang.

**Tabel 2.29.**  
**Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Bone Bolango**  
**Tahun 2012 - 2016**

NO	TENAGA KESEHATAN	JUMLAH TENAGA KESEHATAN (ORANG)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dokter Spesialis	2	3	4	11	25
2.	Dokter Umum	21	23	22	35	20
3.	Dokter Gigi	2	1	1	7	1
4.	Perawat	162	122	92	214	226
5.	Bidan	131	74	61	161	183
6.	Tenaga Kesehatan	77	62	59	62	64
7.	Apoteker	2	9	9	19	3
8.	Ahli Gizi	35	32	39	39	32
9.	Penyehatan Lingkungan	23	20	22	21	20

**Grafik 2.8.**  
**Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Bone Bolango, 2012 - 2016**



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango

**Tabel 2.30.**  
**Jumlah Fasilitas Kesehatan  
 Di Kabupaten Bone Bolango**

TAHUN	RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT BERSALIN	PUSKESMAS	POSYANDU	KLINIK KESEHATAN	POLIN DES	POSKES DES
2012	2	0	19	217	3	--	87
2013	2	0	20	198	5	1	101
2014	2	0	20	206	5	2	108
2015	2	0	20	206	5	1	109

**Tabel 2.31.**  
**Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja Dan Sarana Yankes**  
**Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016**

<b>UNIT KERJA</b>	<b>DOKTER</b>	<b>PERAWAT</b>	<b>BIDAN</b>	<b>FARMASI</b>
Bulango Selatan	2	5	9	0
Bulango Timur	1	3	3	0
Bulango	1	3	6	1
Bulango Ulu	0	3	7	1
Tapa	2	4	2	0
Toto Utara	1	5	4	0
Tilongkabila	1	4	4	0
Kabila	1	5	11	0
Suwawa	1	1	5	1
Ulantha	0	0	4	0
Suwawa Tengah	1	2	3	0
Suwawa Selatan	1	2	9	0
Dumbayabulan	2	2	9	0
Pinogu	1	1	5	0
Botupingge	1	5	8	0
Kabila Bone	1	2	8	0
Bone Pantai	0	3	12	0
Bulawa	1	2	10	0
Tombulilato	2	3	8	0
Bone	1	1	11	0
RSUD Toto Kabila	16	146	35	11
RSUD Tombulilato*)	4	19	7	2
Dinas Kesehata Kab.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>KAB. BONE BOLANGO</b>	<b>41</b>	<b>107</b>	<b>226</b>	<b>16</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Bone Bolango

### C. Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Prasarana Perdagangan

Kegiatan koperasi dan UMKM mencakup hampir seluruh lapangan usaha dan tersebar di seluruh kecamatan dan desa, bahkan desa terpencil, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan koperasi dan UMKM yang menyentuh kegiatan ekonomi sebagian besar masyarakat menjadi pilihan yang strategis dalam kerangka pembangunan daerah, distribusi pendapatan dan tenaga kerja serta memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

**Tabel 2.32**  
**Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dirinci per Kecamatan**  
**Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015**

KECAMATAN	KUD	KPN	KSU	KSP	KO PER TA	KOP WAN	KOP KON	KOP PRO	KOPPE PABRI	KOPP ONTRE N	JUM LAH
1. Tapa	1	3	4	2	0	0	0	0	0	1	11
2. Bulango Utara	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	4
3. Bulango Selatan	0	0	5	3	3	0	0	0	0	0	11
4. Bulango Timur	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
5. Bulango Ulu	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3
6. Kabila	1	4	10	6	3	0	1	0	1	0	26
7. Botupingge	1	1	1	3	0	0	0	0	0	1	7
8. Tilongkabila	1	1	10	2	3	0	0	1	0	0	19
9. Suwawa	0	2	6	2	3	1	0	0	0	0	13
10. Suwawa Selatan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
11. Suwawa Timur	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2
12. Suwawa Tengah	1	0	1	3	0	0	0	0	1	0	6
13. Pinogu	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
14. Bone Pantai	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	6
15. Kabila Bone	0	0	4	0	1	0	1	0	0	0	6
16. Bone raya	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3
17. Bone	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3
18. Bulawa	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>Kab. Bone Bolango</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>53</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>123</b>
<b>2014</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>51</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>121</b>

Keterangan :



KUD : Koperasi Unit Desa, KSP : Koperasi Simpan Pinjam, KOPKON : Koperasi Konsumen  
 KPN : Koperasi Pegawai Negeri, KOPWAN : Koperasi Wanita, KOPPRO : Koperasi Produsen  
 KSU : Koperasi Serba Usaha, KOPERTA : Koperasi Tani, KOP.PEPABRI : Koperasi Purn. ABRI  
 KOPPONTREN : Koperasi Pondok Pesantren.

Sumber :Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bone Bolango

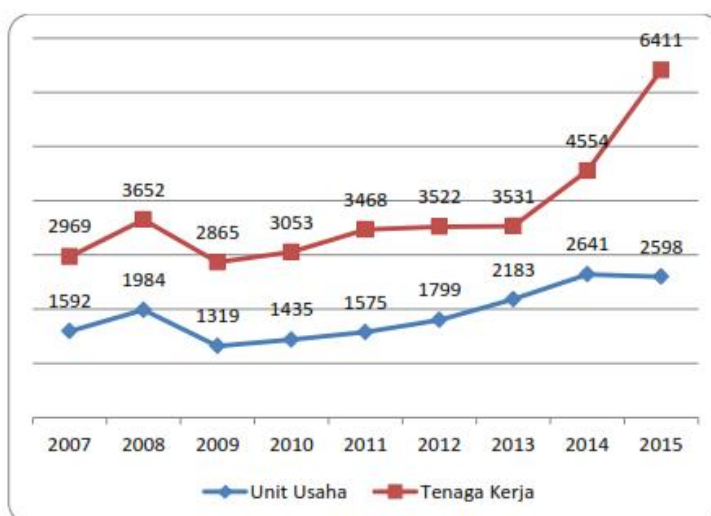
**Tabel 2.33.**  
**Perkembangan UMKM Kabupaten Bone Bolango**  
**Tahun 2012 – 2015**

UMKM	2012	2013	2014	2015	2016
- Usaha Mikro	14,200	15,609	17,261	19,499	22,091
- Usaha Kecil	2	4	7	11	18
- Usaha Menengah	1	2	3	6	10
<b>JUMLAH</b>	<b>14,203</b>	<b>15,615</b>	<b>17,271</b>	<b>19,516</b>	<b>22,119</b>

**Tabel 2.34.**  
**Wirausaha Baru (WUB) UMKM Kabupaten Bone Bolango**  
**Tahun 2012 – 2015**

UMKM	2012	2013	2014	2015	2016
- Usaha Mikro	1,409	1,652	2,238	2,591	2,844
- Usaha Kecil	2	3	4	7	7
- Usaha Menengah	1	1	3	4	4
<b>JUMLAH</b>	<b>1,412</b>	<b>1,656</b>	<b>2,245</b>	<b>2,603</b>	<b>2,855</b>

**Grafik 2.7.**  
**Perkembangan Sektor Industri**  
**di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2007 - 2015**



Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil, dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango

**Tabel. 2.35.**  
**Perkembangan Sektor Industri**  
**di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2007 - 2015**

<b>TAHUN</b>	<b>UNT USAHA</b>	<b>TENAGA KERJA (ORANG)</b>
2007	1 592	2 969
2008	1 984	3 652
2009	1 319	2 865
2010	1 435	3 053
2011	1 575	3 468
2012	1 799	3 522
2013	2 183	3 531
2014	2 641	4 554
2015	2 598	6 411

**D. Prasarana Perdagangan**

**Tabel. 2.36.**  
**Jumlah Pasar Menurut Jenis dan Kecamatan**  
**di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015**

<b>KECAMATAN</b>	<b>PASAR</b>			<b>JUMLAH</b>
	<b>IMPRES</b>	<b>NON IMPRES</b>	<b>BANGDES</b>	
1. Tapa	1	0	1	2
2. Bulango Utara	0	0	2	2
3. Bulango Selatan	0	0	0	0
4. Bulango Timur	0	0	1	1
5. Bulango Ulu	0	0	1	1
6. Kabila	1	0	1	2
7. Botupingge	1	0	0	1
8. Tilongkabila	0	0	1	1
9. Suwawa	1	0	1	2
10. Suwawa Selatan	0	0	0	0
11. Suwawa Timur	0	0	1	1
12. Suwawa Tengah	1	0	0	1
13. Pinogu	1	0	0	1
14. Bone Pantai	0	0	2	2
15. Kabila Bone	0	0	1	1
16. Bone raya	0	0	1	1
17. Bone	1	0	0	1
18. Bulawa	0	0	1	1
<b>Kab. Bone Bolango</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>21</b>
<b>2014</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>22</b>

*Sumber : Dinas Koperindag dan UMKM Kab. Bone Bolango*

**Tabel 2.37.**  
**Jumlah Pasar, toko dan Kios Menurut Kecamatan**  
**Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015**

KECAMATAN	PASAR	TOKO		KIOS
		PERMANEN	NON PERMANEN	
1. Tapa	2	0	35	6
2. Bulango Utara	2	0	0	4
3. Bulango Selatan	0	0	0	42
4. Bulango Timur	1	0	0	20
5. Bulango Ulu	1	0	0	3
6. Kabila	2	0	0	107
7. Botupingge	1	0	0	337
8. Tilongkabila	1	0	0	37
9. Suwawa	2	0	0	18
10. Suwawa Selatan	0	0	0	42
11. Suwawa Timur	1	0	0	11
12. Suwawa Tengah	1	0	0	10
13. Pinogu	1	0	0	7
14. Bone Pantai	2	0	14	29
15. Kabila Bone	1	0	9	83
16. Bone raya	1	0	7	46
17. Bone	2	0	9	83
18. Bulawa	1	0	8	61
<b>Kab. Bone Bolango</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>946</b>
<b>2014</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>

*Sumber : Dinas Koperindag dan UMKM Kab. Bone Bolango*

#### **E. Aparatur Pemerintahan**

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango mencatat Pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango berjumlah 4.235 pegawai, dengan komposisi 1.518 pegawai laki-laki dan 2.717 pegawai perempuan. Dilihat dari pendidikan terakhir terbanyak yang ditamatkan adalah Diploma IV/S1 sebanyak 46,26 persen, sedangkan yang tamat S2 hanya 3,40 persen.

**Tabel . 2.38.**  
**Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bone Bolango, 2015**

<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
SD	16	2	18
SMP	18	9	27
SMA	436	692	1 131
SMK	119	139	258
DI/ <i>Diploma 1</i>	38	127	165
DII/ <i>Diploma 2</i>	33	94	165
DIII/ <i>Diploma 3</i>	175	489	664
S1	700	1 259	1 959
S2	102	42	144
S3	0	0	0
<b>Jumlah/ Total</b>	<b>1 518</b>	<b>2 717</b>	<b>4 235</b>

Sumber: Badan Kepegawaian dan DIKLAT  
Kabupaten Bone Bolango

#### **F. Pertanian**

Berdasarkan Data BPS (2015) Bone Bolango memiliki luas lahan pertanian sebesar 2.053,40 Ha. Menurut pengairannya, sebagian besar sawah menggunakan sistem irigasi teknis yaitu mencapai 93,31 persen. Pada tahun 2016, produksi padi sawah yang tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 27 568,48 ton.

**Tabel 2.39**  
**Luas Lahan, Produksi Dan Produktifitas Pertanian Tahun 2014 – 2016**

<b>URAIAN</b>		<b>TAHUN</b>		
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
PADI SAWAH	LUAS LAHAN (HA)	2.547,00	4.411,00	4.489,00
	PRODUKSI (TON)	14.513,00	27.568,00	25.587,30
	PRODUKTIFITAS (TON/HA)	58,00	67,00	57,00
JAGUNG	LUAS LAHAN (HA)	2.510,00	2.523,00	6.567,00
	PRODUKSI (TON)	10.655,00	12.051,00	30.208,20
	PRODUKTIFITAS (TON/HA)	48,00	32,00	46,00
UBI KAYU	LUAS LAHAN (HA)	21,70	25,00	62,00
	PRODUKSI (TON)	127,10	125,00	334,80
	PRODUKTIFITAS (TON/HA)	54,00	54,00	54,00
UBI JALAR	LUAS LAHAN (HA)	7,00	11,00	22,00
	PRODUKSI (TON)	33,00	55,00	125,40
	PRODUKTIFITAS (TON/HA)	57,00	57,00	57,00

URAIAN		TAHUN		
		2014	2015	2016
KACANG TANAH	LUAS LAHAN (HA)	43,00	9,00	12,00
	PRODUKSI (TON)	85,50	60,01	132,00
	PRODUKTIFITAS (TON/HA)			11,00
CABAI	LUAS LAHAN (HA)	113,71	113,70	275,00
	PRODUKSI (TON)	113,9	113,90	275,90
	PRODUKTIFITAS (TON/HA)	10,00	10,00	11,00

### G. Perikanan dan Kelautan

Perkembangan capaian kinerja di sektor perikanan dan kelautan selang 3 (tiga) tahun terakhir, yakni sebagai berikut:

**Tabel 2.40.**  
**Data Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bone Bolango**  
**Tahun 2014 – 2016**

NO.	JENIS IKAN	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH	
		Vol. (Ton)	Nilai (Rp.000)	Vol. (Ton)	Nilai (Rp.000)	Vol. (Ton)	Nilai (Rp.000)
1	tuna	368,2	7.472.040	465,1	9.304.998	485,2	11.205.186
2	madidihang	1061,3	21.851.544	1359,9	27.198.420	1418,7	32.723.845
3	kwee	627,6	4.992.750	674,4	5.395.489	703,6	6.489.064
4	cakalang	2146,7	15.065.350	2175,6	15.229.072	2269,8	18.355.543
5	kenyar	648,3	3.401.384	696,6	3.686.034	726,8	4.431.574
6	tongkol	2.143,7	11.528.237	2173,9	11.870.847	2268,3	14.297.581
7	tenggiri	209,2	1.543.384	224,8	1.672.265	234,6	2.010.448
8	layang	3115,4	16.743.273	3151	17.206.121	3287,6	20.724.998
9	julung-julung	18	53.998	20,4	61.080	21,3	73.453
10	ikan terbang	24	71.998	27,2	81.440	28,4	97.938
11	selar	2906,2	14.581.212	2926,1	14.630.772	3053	17.638.819
12	cumi-cumi	571,9	4.544.354	589,5	4.886.232	615,1	5.872.338
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.841</b>	<b>101.849.524</b>	<b>14.485</b>	<b>111.222.770</b>	<b>15.112</b>	<b>133.920.787</b>

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango, 2017

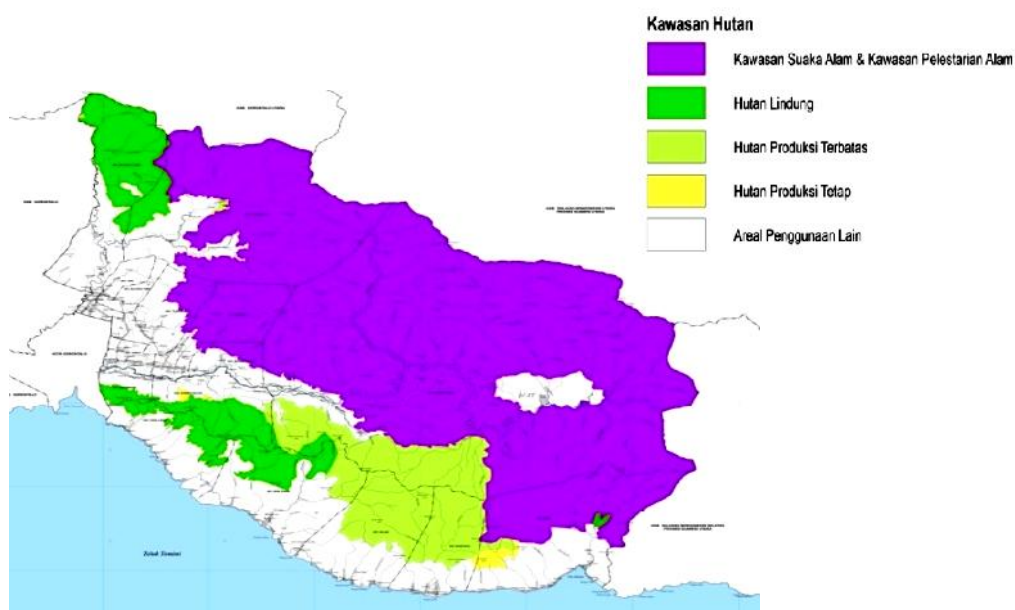
**PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA  
TAHUN 2014- 2016**

NO.	TAHUN	JENIS KOMUDITAS BUDIDAYA					JUMLAH
		IKAN NILA (Ton)	IKAN LELE (Ton)	IKAN MAS (Ton)	IKAN KERAPU (Ton)	UDANG (Ton)	
1	2014	1080,42	140	12	10	0,2	1242,62
2	2015	292	50	5	0,3	0	347,3
3	2016	390,68	160	8	0,22	0,1	559
<b>TOTAL</b>		<b>1763,1</b>	<b>350</b>	<b>25</b>	<b>10,52</b>	<b>0,3</b>	<b>2148,92</b>

**H. Kehutanan**

Hutan merupakan salah satu sumber daya yang penting, tidak hanya dalam menunjang perekonomian daerah tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem bumi.

**Gambar. 2.4.  
Peta Kawasan Hutan Kabupaten Bone Bolango**



Walaupun belum sampai ketinggian yang rusak parah, namun kerusakan hutan di daerah Bone Bolango cukup mengkhawatirkan. Pada beberapa tahun terakhir ini, Kota Gorontalo mengalami banjir akibat kiriman air dari aliran sungai Bone maupun sungai Bolango yang diakibatkan degradasi ekosistem hutan di daerah Bone Bolango. Salah satu dampak kerusakan hutan lainnya

adalah jumlah satwa yang terancam punah. Kondisi hutan ini diperparah lagi dengan masih berlangsungnya pola perombakan/perambahan kawasan hutan untuk berbagai kepentingan sektor pembangunan lain, batas-batas kawasan yang perlu direkonstruksi. Luas kawasan hutan Kabupaten Bone Bolango 140.098,40 Ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 325/Menhut/II/2010. Adapun potensi sumber daya hutan di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.41.**  
**Perkembangan Sumberdaya Hutan di Kabupaten Bone Bolango**  
**Tahun 2011 s/d 2015**

NO	JENIS HUTAN	POTENSI (Ha)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Hutan Lindung	15.718,25	15.718,25	25.490,09	21.177,35	15.718,25
3	Hutan Produksi Terbatas	18.803,29	18.803,29	18.829,35	18.829,35	18.803,29
4	Hutan Produksi Tetap	836,45	836,45	835,85	835,85	836,45
5	Hutan Produksi Konversi	NA	NA	NA	NA	NA
6	Hutan Taman Nasional	104.740,1	104.740,1	104.893,7	104.893,7	104.904,72

*Sumber Data: BPKH VII XVI Gorontalo, (SK Menteri Kehutanan Nomor 325/Menhut/II/2010)*

**Tabel 2.42.**  
**Produksi Hasil Hutan Non HPH di Kabupaten Bone Bolango**  
**Tahun 2011 s/d 2015**

PRODUKSI HASIL HUTAN	SATUAN	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1. Kayu Bulat	M <sup>3</sup>	134,13	134,13	83,40	17,05	-
2. Kayu Gergajian	M <sup>3</sup>	NA	NA	NA	NA	-
3. Kayu Olahan	-	NA	NA	68,64	14,03	-
4. Hasil Hutan Ikutan	-	NA	NA	NA	NA	-
5. Damar	-	NA	NA	NA	NA	-
6. Rotan	TON	58,05	45	145	215	-
7. Gondrukem	-	NA	NA	NA	NA	3
8. Kayu Jati	-	NA	NA	NA	NA	-
9. Terpentin	-	NA	NA	NA	NA	-

*Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Bone Bolango*

**Tabel 2.43.**  
**Luas Lahan Kritis, Reboisasi dan Penghijauan**  
**di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 s/d 2015**

NO	JENIS LAHAN	LUAS LAHAN PER TAHUN (Ha)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Lahan Kritis	105,666	105,666	48.483	48.483	48.483
2.	Lahan Reboisasi	250	500	2.871	2.871	150
3.	Lahan Penghijauan	287	305	1.622	1.797	60
4.	Kebakaran Hutan	2,40	5	NA	10	556,27

*Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Bone Bolango*

## I. Perkebunan

**Tabel. 2.44.**  
**Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango, 2015**

KECAMATAN	TAHUN 2014			TAHUN 2015		
	LUAS PANEN	PRODUKSI	PRODUKTIVITAS	LUAS PANEN	PRODUKSI	PRODUKTIVITAS
1. Tapa	132	538,2	40,57	110,0	582,0	52,91
2. Bulango Utara	339	1 397,20	41,22	320,0	1 600,0	50,00
3. Bulango Selatan	2	10	49,33	46,0	220,8	48,00
4. Bulango Timur	270	1 090,00	40	--	--	--
5. Bulango Ulu	685	3 460,00	50,5	940,0	5 076,0	54,00
6. Kabila	134	597,7	43	34,0	184,0	54,12
7. Botupingge	27	108	40	36,0	128,0	35,56
8. Tilongkabila	128	153,06	11,96	156,0	780,0	5,00
9. Suwawa	114,53	533	46,56	155,0	17,2	1,11
10. Suwawa Selatan	206	765	37,63	214,0	908,4	42,45
11. Suwawa Timur	90	414,5	47,57	174,0	870,0	50,00
12. Suwawa Tengah	35	149,1	42	24,0	125,0	52,08
13. Pinogu	--	--	--	--	--	--
14. Bone Pantai	50	150	30	115,0	605,0	52,61
15. Kabila Bone	--	--	--	--	--	--
16. Bone raya	83	356,9	43	86,0	413,0	48,02
17. Bone	115	489,21	42,3	68,0	326,0	47,94
18. Bulawa	100	443,1	44,1	45,0	216,0	48,00
<b>Kab. Bone Bolango</b>	<b>2 510,53</b>	<b>10 654,97</b>	<b>40,61</b>	<b>2 532,0</b>	<b>12 051,4</b>	<b>47,77</b>

## J. Peternakan

**Tabel 2.45.**  
**Populasi Hewan Ternak (Ekor) Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016**

URAIAN		TAHUN		
		2014	2015	2016
Sapi	Jumlah populasi (ekor)	26.243	27.714	30.368
	Produksi daging			
	Konsumsi			
Kambing	Jumlah populasi (ekor)	4.976	5.046	7.321
	Produksi daging			
	Konsumsi			
Kuda	Jumlah populasi (ekor)	209	237	268
	Produksi daging			
	Konsumsi			

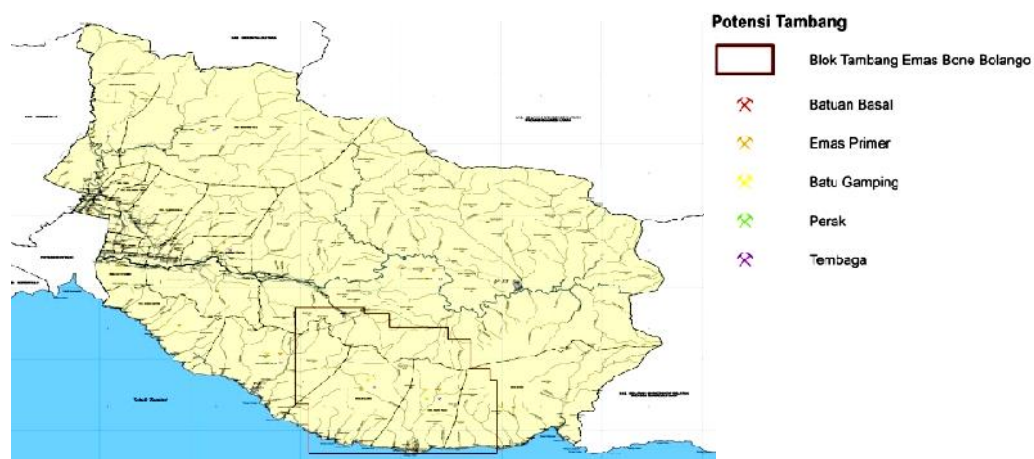


URAIAN		TAHUN		
		2014	2015	2016
Ayam kampung	Jumlah populasi (ekor)	168.026,00	N/A	177.801,00
	Produksi daging			
	Konsumsi			
Ayam ras	Jumlah populasi (ekor)	135.520,00	N/A	200.600,00
	Produksi daging			
	Konsumsi			
Itik	Jumlah populasi (ekor)	10.541,00	N/A	11.579,00
	Produksi daging			
	Konsumsi			

## K. Pertambangan dan Energi

Sektor pertambangan dan energi merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango. Potensi tambang mineral logam dan galian C tersebar pada hampir seluruh wilayah Kabupaten Bone Bolango. Demikian pula potensi energy baik berupa energi panas bumi, energi sumber yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya air serta energy baru dan terbarukan lainnya.

**Gambar. 2.5.**  
**Peta Potensi Pertambangan dan Energi**  
**Kabupaten Bone Bolango**



Sumber : Dok. RTRW Kabupaten Bone Bolango 2011

Potensi pertambangan di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel. 2.46.**  
**Potensi Pertambangan Non Logam**  
**di Kabupaten Bone Bolango**

NO	JENIS TAMBANG	POTENSI NON LOGAM
		2015
1.	Granit (Ton)	N/A
2.	Andesit (Ton)	62.500.000
3.	Batu Gamping ((Ton)	67.000.000
4.	Sirtu (Ton)	24.600.880

*Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango*

**Tabel. 2.47.**  
**Potensi Pertambangan Logam**  
**di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015**

NO.	JENIS TAMBANG	LOKASI (KEC/ DESA)	POTENSI (TON)
1.	Emas	Kecamatan Suwawa Tengah Desa Tapadaa	3,2
		Kecamatan Suwawa Timur Desa Tulabolo	119,310
		Kecamatan Bone Raya Desa Tombulilato Kiri	119,310
		Kecamatan Suwawa Timur Sungai Mak	119,310
		Kecamatan Suwawa Timur Motomboto	119,310
		Kecamatan Suwawa Timur Kayubulan	119,310
2.	Tembaga	Kecamatan Suwawa Tengah Desa Tapadaa	232,200
		Kecamatan Suwawa Timur Desa Kayubulan	1891,500
		Kecamatan Suwawa Timur Motomboto	1891,500
		Kecamatan Suwawa Timur Sungai Mak	1891,500
		Kecamatan Bonepantai Cabang Kiri	1891,500

*Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango*

Perkembangan potensi sumber energi yang dimiliki oleh Kabupaten Bone Bolango yakni:

**Tabel. 2.48.**  
**Perkembangan Potensi Sumber Energi**  
**di Kabupaten Bone Bolango**

NO	JENIS SUMBER DAYA ENERGI	LOKASI (KECAMATAN/DESA)	JUMLAH SUMBER DAYA ENERGI (UNIT)
1.	PLTA	Suwawa Timur	-
2.	PLTU	Kecamatan Kabila Bone	
3.	GEOTERMAL	Suwawa Tengah Suwawa Selatan	
4.	PLTD	-	-
5.	PLTS	Kecamatan Suwawa Timur - Desa Tulabolo Barat, - Desa Tulabolo Timur, - Desa Pinogu - Desa Poduoma Kecamatan Suwawa Selatan - Desa Molintogupo - Desa Bulontala Kecamatan Suwawa Tengah - Desa Tapadaa Kecamatan Kabila Bone - Desa Biluango - Desa Olele Kecamatan Tilongkabila - Desa Tunggulo Kecamatan Bone Pantai - Desa Pelita Hijau	100 Unit 145 Unit 450 Unit 71 Unit  1 Unit 45 Unit  71 Unit  50 Unit 50 Unit  48 Unit  -
6.	PLTMH	Kecamatan Bulango Ulu - Desa Owata Kecamatan Bulango Timur - Desa Kopi Kecamatan Suwawa Timur - Desa Tulabolo (Piko Hydro)	1 Unit  1 Unit  15 Unit

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango

## L. Pariwisata

Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi pengembangan wisata yang sangat besar khususnya wisata yang memanfaatkan sumber daya alam antara lain berupa wisata alam Lombongo, Taman Nasional, Wisata Pantai dan Wisata taman laut. Disamping itu juga sangat potensial untuk pengembangan wisata alam jenis *outbond* (*Hiking, Tracking* dan *Climbing* serta *Arung Jeram /Susur Sungai*). Kabupaten Bone Bolango yang mempunyai garis pantai yang panjang yang terpampang di sepanjang pesisir perairan pantai selatan (teluk tomini) memberikan peluang besar untuk pengembangan wisata pantai khususnya lagi untuk wisata bawah laut yang terletak di Desa Olele, dengan panorama dan kekayaan hayati bawah laut yang sangat menjanjikan serta potensi pariwisata budaya sebagai daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

**Tabel. 2.49.**  
**Daftar Obyek Daya Tarik Wisata Di Provinsi Gorontalo**

<b>NO</b>	<b>NAMA OBYEK</b>	<b>JENIS OBYEK</b>	<b>LOKASI</b>
	<b>KABUPATEN BONE BOLANGO</b>		
1	Air Terjun Taludaa	Wisata alam	Desa Taludaa Kec. Bone Pantai
2	Taman Laut Olele	Wisata bahari	Desa Olele Kec. Kabila Bone
3	Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	Wisata alam	Kec. Suwawa Timur
4	Air Terjun Lombongo I dan II	Wisata alam	Desa Lombongo, Kec. Suwawa Timur
5	Danau Perintis	Wisata alam	Kec. Suwawa
6	Makam Raja-raja Atinggola	Wisata sejarah	Desa Dunggala Kec. Tapa
7	Kebun Binatang Mana Suka	Wisata buatan	Kec. Kabila

**Tabel. 2.50.**  
**Jenis Sarana Wisata, Seni dan Budayadi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 – 2015**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH OBYEK WSATA</b>			<b>JUMLAH SANGGAR SENI DAN BUDAYA</b>
	<b>WSATA ALAM</b>	<b>WSATA BAHARI</b>	<b>WSATABUDAYA SEJARAH</b>	
2011	1	3	3	6
2012	1	3	3	6
2013	8	4	4	6
2014	8	4	4	6
2015	6	4	4	2
2016	7	4	4	2

*Sumber Data : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kominfo Kab. Bone Bolango*

**Tabel. 2.51.**  
**Jumlah Kunjungan Wisatawan pada Setiap Obyek Wisata**  
**di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016**

<b>NO</b>	<b>JENIS OBYEK WSATA</b>	<b>LOKASI (KEC. &amp; DESA)</b>	<b>JUMLAH KUNJUNGAN 2016</b>
1.	Wisata Alam Lombongo	Desa Lombongo Kec. Suwawa	9.500
2.	Wisata Bahari Olele	Desa Olele Kec. Kabila Bone	7.500
3.	Wisata Budaya Makam Raja Atinggola	Desa Dunggala Kec. Tapa	-
4.	Wisata Bahari Botutonuo	Desa Botutonuo Kec. Kabila Bone	14.000
	<b>Jumlah</b>		<b>31.000</b>

*Sumber Data : Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bone Bolango*

### **M. Pelayanan Perdagangan**

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Gorontalo sebagai Pusat Ekonomi Provinsi Gorontalo, perassnan wilayah Bone Bolango sangat berpengaruh untuk menjadi penyangga pertumbuhan wilayah Provinsi Gorontalo. Disamping sebagai wilayah pensuplai komoditas ekonomi juga berperan sebagai pasar bagi komoditas kebutuhan primer. Oleh karena itu, ketersediaan prasarana perdagangan merupakan prasyarat utama bagi wilayah Bone Bolango sebagai penyangga perekonomian wilayah. Perkembangan jasa perdagangan di Kabupaten Bone Bolango tergambarkan melalui perkembangan sarana prasarana perdagangan yang menunjang mobilitas ekonomi masyarakat, yakni sebagai berikut:

**Tabel. 2.52.**  
**Jumlah Pasar Menurut Jenis dan Kecamatan**  
**di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015**

<b>KECAMATAN</b>	<b>PASAR</b>			<b>JUMLAH</b>	<b>PASAR</b>			<b>JUMLAH</b>
	<b>INPRES</b>	<b>NON IMPRES</b>	<b>BANGDES</b>		<b>INPRES</b>	<b>NON IMPRES</b>	<b>BANGDES</b>	
1. Tapa	1	0	1	2	1	0	1	2
2. Bulango Utara	0	0	2	2	-	0	2	2
3. Bulango Selatan	0	0	0	0	-	0	0	-
4. Bulango Timur	0	0	1	1	-	0	1	1
5. Bulango Ulu	0	0	1	1	-	0	1	1
6. Kabila	1	0	1	2	1	0	1	2
7. Botupingge	1	0	0	1	1	0	0	1
8. Tilongkabila	0	0	1	1	-	0	1	1

KECAMATAN	PASAR			JUMLAH	PASAR			JUMLAH
	INPRES	NON IMPRES	BANGDES		INPRES	NON IMPRES	BANGDES	
9. Suwawa	1	0	1	2	1	0	1	2
10. Suwawa Selatan	0	0	0	0	-	0	0	-
11. Suwawa Timur	0	0	1	1	-	0	1	1
12. Suwawa Tengah	1	0	0	1	1	0	0	1
13. Pinogu	1	0	0	1	1	0	0	1
14. Bone Pantai	0	0	2	2	-	0	2	2
15. Kabila Bone	0	0	1	1	-	0	1	1
16. Bone raya	0	0	1	1	-	0	1	1
17. Bone	1	0	1	2	1	0	0	1
18. Bulawa	0	0	1	1	-	0	1	1
<b>KAB. BONE BOLANGO</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>21</b>

Sumber : Dinas Koperindag dan UMKM Kab. Bone Bolango

**Tabel. 2.53.**  
**Jumlah Pasar, toko dan Kios Menurut Kecamatan**  
**Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015**

KECAMATAN	TAHUN 2014				TAHUN 2015			
	PASAR		TOKO	KIOS	PASAR		TOKO	KIOS
	PER MANEN	NON PERMANEN			NON PERMANEN	PERMANEN		
1. Tapa	2	0	35	6	2	0	35	6
2. Bulango Utara	2	0	0	4	2	0	0	4
3. Bulango Selatan	0	0	0	42	-	0	0	42
4. Bulango Timur	1	0	0	20	1	0	0	20
5. Bulango Ulu	1	0	0	3	1	0	0	3
6. Kabila	2	0	0	107	2	0	0	107
7. Botupingge	1	0	0	337	1	0	0	337
8. Tilongkabila	1	0	0	37	-	0	0	37
9. Suwawa	2	0	0	18	2	0	0	18
10. Suwawa Selatan	0	0	0	42	-	0	0	42
11. Suwawa Timur	1	0	0	11	1	0	0	11
12. Suwawa Tengah	1	0	0	10	1	0	0	10
13. Pinogu	1	0	0	7	1	0	0	7
14. Bone Pantai	2	0	14	29	2	0	14	29
15. Kabila Bone	1	0	9	83	1	0	9	83
16. Bone raya	1	0	7	46	1	0	7	46
17. Bone	2	0	9	83	2	0	9	83
18. Bulawa	1	0	8	61	1	0	8	61
<b>Kab. Bone Bolango</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>946</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>946</b>

Sumber : Dinas Koperindag dan UMKM Kab. Bone Bolango

## **2.5 Aspek Daya Saing Daerah**

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestic dan internasional. Pengembangan daerah di kota-kota dan kabupaten-kabupaten di Gorontalo merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing tersebut, walaupun dalam pengembangannya menghadapi permasalahan-permasalahan yang antara lain disebabkan oleh kurang berkembangnya sumberdaya manusia yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya kualitas hidup masyarakat serta kurangnya prasarana dan sarana untuk menunjang kesejahteraan masyarakat

Perbandingan relative tingkat daya saing antar kota/kabupaten tersebut; berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu tingkat perekonomian daerah, ketersediaan infrastruktur dan sumberdaya alam, serta ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia; dilakukan untuk melihat sejauh mana daerah-daerah tersebut memiliki keunggulan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pengembangan daerah.

### **2.5.1 Fokus Kemampuan ekonomi daerah**

#### **a. PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan**

Keadaan perekonomian Kabupaten Bone Bolango terus mengalami peningkatan yang cukup berarti yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp.1.719.662.560.000/Rp.1.719.662.560.000 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp.2.768.411.780.000/Rp.2.290.654.910.000. Artinya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir PDRB Berlaku mengalami kenaikan nilai tambah sebesar Rp.1.048.749.220.000 dan PDRB Konstan mengalami kenaikan nilai tambah sebesar RP. 570.992.350.000

#### **b. PDRB Deflator**

Perbedaan nilai pada PDRB Berlaku dan Konstan pada table 2.68 dan 2.69 yang menyebabkan perbedaan nilai tambah (PDRB Berlaku Rp.1.048.749.220.000 dan PDRB Konstan RP. 570.992.350.000) disebabkan terjadinya inflasi berbagai sector perekonomian pada Kabupaten Bone Bolango, seperti ditunjukkan pada tabel 2.70. Semakin jauh dari tahun dasar 2010 maka secara kumulatif terjadi tinggi terjadinya inflasi (Indeks PDRB Deflator semakin turun dari angka 100). Terjadinya penurunan indeks PDRB

Deflator tidak sama untuk semua sector ekonomi di Kabupaten Bone Bolango. Tercatat pada Tabel 2.70 inflasi kumulatif tertinggi terjadi pada sector Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (Sektor 11)/Sektor Konstruksi (sector 6), sedangkan inflasi terendah bahkan terjadi inflasi negatif atau deflasi terjadi pada sector Konstruksi (sector 4). Namun secara rata-rata dalam perekonomian kalau dilihat dari Tabel 2.70 mengenai perbandingan inflasi antara Kabupaten Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Kabupaten Bone Bolango lebih rendah dari Provinsi Gorontalo (nilai perbandingan = 0,997), Namun ada beberapa sector ekonomi yang mempunyai tingkat inflasi yang lebih tinggi dari sector yang sama dengan inflasi Provinsi Gorontalo, yaitu pada sector-sektor yang mempunyai nilai perbandingan inflasi lebih besar 1 (satu).

c. Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Parsial.

Secara normative pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango harus lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo, karena sebagai wilayah bagian dari Provinsi Gorontalo, maka pasti PDRB Kabupaten Bone Bolango lebih kecil. Berdasarkan Tabel 2.64 dan Grafik 2.12 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 lebih rendah dari pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo. Namun Trend perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango terus meningkat, sedangkan trend pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo menurun, sehingga pada tahun 2014 nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango lebih tinggi dari Provinsi Gorontalo.

Peran Ekonomi sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango, Menunjukkan bahwa peran sector pertanian, kehutanan, dan Perikanan masih sangat tinggi dan terus meningkat terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango yaitu dari 1.59% (setara dengan 23,05%) tahun 2011 menjadi 2.46% (setara dengan 31,88%) tahun 2014. Data ini menunjukkan bahwa kinerja sector pertanian, kehutanan, dan Perikanan masih amat berperan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango. Namun terdapat dua sector ekonomi yang kalau digabungkan memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada sector pertanian,



kehutanan, dan perikanan yaitu Sektor Konstruksi dan Sektor Ekonomi Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Gabungan kedua sector tersebut memberikan sumbangan ekonomi 1,95% (setara dengan 28,24%) tahun 2011 menjadi 2,78% (setara dengan 35,94%) tahun 2014. Bahkan padatahun 2014 jumlah sumbangan sektor-sektor jasa lainnya dalam perekonomian Kabupaten Bone Bolango telah meningkat sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango.

terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo walaupun masih relative kecil namun terus mengalami peningkatan tahun demi tahun. Pada tahun 2011 sumbangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango sebesar 0,77% dari 7,71% pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo (setara dengan 9,97%) dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 0,85% dari 7,27% pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo (setara dengan 11,65%). Hal ini menunjukkan bahwa walaupun Provinsi Gorontalo mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi namun Kabupaten Bone Bolango justru meningkat, sehingga sumbangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango semakin besar.

Secara umum dilihat pada ekonomi sektoral, walaupun sumbangan ekonomi Kabupaten Bone Bolango masih kecil namun sumbangan ekonomi sektoral cukup sampai dengan sangat berarti terhadap pertumbuhan ekonomi sektoral Provinsi Gorontalo, dan berpotensi terus meningkat, sehingga perlu penanganan yang lebih baik dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango.

#### **A. Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Secara relatif, Kabupaten Bone Bolango menempati urutan kedua setelah Kota Gorontalo dan masih berada diatas Provinsi Gorontalo 66,83 dalam hal perkembangan kualitas sumber daya manusia. Kota Gorontalo mempunyai angka IPM tertinggi se-provinsi Gorontalo, dan termasuk pada kategori IPM tinggi (kisaran 74-75). Begitu juga dengan besarnya PDRB Perkapita dan angka pertumbuhan ekonominya. Untuk IPM Bone Bolango, termasuk kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Gorontalo termasuk dalam kategori IPM sedang karena berada pada kisaran 64-65.

**Tabel 2.54.**  
**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota**  
**Se - Provinsi Gorontalo**

KABUPATEN/KOTA	2012	2013	2014	2015
Kab. Boalemo	61,11	61,71	62,18	62,86
Kab. Gorontalo	62,22	62,22	62,90	63,63
Kab. Pohuwato	60,48	61,38	61,74	62,50
<b>Kab. Bone Bolango</b>	<b>65,13</b>	<b>65,82</b>	<b>66,03</b>	<b>66,83</b>
Kab. Gorontalo Utara	60,71	61,60	61,92	62,55
Kota Gorontalo	74,06	74,43	74,97	75,62
Prov. Gorontalo	64,12	64,70	65,17	65,86

## B. Sektor Basis

**Table 2.55.**  
**Analisis Sektor Basis dan Daya Saing**

LAPANGAN USAHA	LQ Harga Konstan					Harga Konstan			Kategori
	2010	2011	2012	2013	2014	LQ Share	LQ Shift	LQ Trend	
Jasa Perusahaan	1,08	1,10	1,19	1,28	1,32	1,22	2,16	1,77	A
Konstruksi	0,81	0,81	0,81	0,85	0,91	0,85	1,09	1,28	A
Jasa Lainnya	1,19	1,20	1,22	1,24	1,25	1,23	1,48	1,20	A
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,40	1,41	1,44	1,44	1,41	1,43	1,54	1,08	A
Jasa Pendidikan	1,13	1,13	1,17	1,17	1,12	1,11	1,18	1,06	A
Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mbbil dan Sepeda Motor	1,17	1,16	1,14	1,13	1,15	1,16	1,16	1,01	A
Industri Pengolahan	1,52	1,51	1,50	1,50	1,50	1,52	1,51	0,99	A-
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,39	1,39	1,46	1,47	1,43	1,38	1,36	0,99	A-
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,97	0,96	0,96	0,95	0,95	0,97	0,92	0,95	A-
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,45	0,47	0,49	0,52	0,54	0,52	0,94	1,82	B
Jasa Keuangan dan Asumsi	0,43	0,46	0,52	0,52	0,53	0,48	0,72	1,50	B
Informasi dan Komunikasi	0,68	0,76	0,74	0,72	0,71	0,68	0,73	1,08	B
Pengadaan Listrik dan Gas	0,61	0,59	0,60	0,60	0,58	0,61	0,64	1,05	B
Real Estate	1,54	1,52	1,48	1,44	1,37	1,43	0,89	0,62	C
Pertambangan dan Penggalian	1,61	1,61	1,57	1,54	1,49	1,57	0,86	0,55	C
Transportasi dan Pergudangan	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,15	0,75	D
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,55	0,54	0,51	0,49	0,50	0,52	0,34	0,66	D

Berdasarkan hasil analisis LQ, LQ share, LQ shift, dan LQ trend yang dituangkan pada table 2.75 yang mengulas tentang keunggulan komperatif, keunggulan kompetitif, serta trend perkembangan relative maka sector ekonomi Kabupaten Bone Bolango dapat dikategorikan kedalam empat macam, yaitu:

**Kategori Baik-Baik:** 1. Jasa Perusahaan; 2. Konstruksi; 3. Jasa Lainnya; 4. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib; 5. Jasa Pendidikan; 6. Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 7. Industri Pengolahan; 8. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 9. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Namun tiga sector terakhir walaupun dalam kategori baik-baik, berpeluang mundur jika tidak di jaga.

**Kategori Buruk-Baik:** 1. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 2. Jasa Keuangan dan Asuransi; 3. Informasi dan Komunikasi; 4. Pengadaan Listrik dan Gas. Sektor-sektor tersebut walaupun dalam kategori non basis namun mempunyai daya saing yang baik sehingga berpotensi untuk berkembang dengan baik.

**Kategori Baik-Buruk:** 1. Real Estate; 2. Pertambangan dan Penggalian. Sektor pada kategori ini adalah sektor basis namun mempunyai daya saing yang menurun, sehingga perlu mendapat perhatian.

**Kategori Buruk-Buruk:** 1. Transportasi dan pergudangan; 2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sektor-sektor dalam kategori ini adalah sector non basis dan mempunyai daya saing lemah, dan mempunyai trend perkembangan relative menurun, sehingga sector-sektor tersebut harus mendapat perhatian penuh.

Secara umum dilihat dari nilai LQ, LQ share, LQ shift, dan LQ trend perekonomian sektoral Kabupaten Bone Bolango mempunyai masa depan yang cukup baik dan berpotensi berperan dalam perekonomian Provinsi Gorontalo, namun masih terdapat beberapa sektor yang harus diperhatikan dan dibina sehingga secara komprehensif dapat meningkatkan keunggulan dan daya saing ekonomi Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo.

## **2.5.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

### **A. Infrastruktur Jalan**

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menempatkan sektor ini sebagai sektor strategis karena dampaknya bagi pertumbuhan dan mobilitas ekonomi masyarakat disamping mewujudkan keseimbangan dan konektivitas antar wilayah serta dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang lebih baik di masa mendatang. Beberapa masalah mendasar pada aspek infrastruktur jalan antara lain masalah kondisi kualitas jalan dengan kondisi kurang baik,

ketersediaan dan pertumbuhan jalan baru yang masih rendah, keterbatasan akses menuju wilayah terpencil dan terisolasi, konektivitas wilayah yang kurang begitu baik, akses jalan menuju bagian utara dan akses menuju wilayah pesisir yang belum terbangun serta akses menuju kawasan strategis yang masih terbatas.

Data perkembangan jalan berdasarkan status jalan menurut kewenangannya dan sumber pembiayaannya dibedakan ke dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Tahun 2014, panjang jalan negara di Kabupaten Bone Bolango tercatat 89,898 kilometer, sedangkan panjang jalan provinsi dan kabupaten berturut-turut adalah 101,4 kilometer dan 325,18 kilometer.

**Tabel 2.56.**  
**Status Ruas Jalan dalam Wilayah Kab. Bone Bolango**

<b>STATUS JALAN</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Jalan Nasional	89,898	89,898	89,898
Jalan Provinsi	101,400	101,400	101,400
Jalan Kabupaten	325,180	325,180	325,180
<b>Jumlah</b>	<b>516,478</b>	<b>516,478</b>	<b>516,478</b>

**Tabel 2.57.**  
**Klasifikasi Permukaan Jalan dalam Wilayah Kab. Bone Bolango**

<b>KONDISI JALAN</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Jalan Aspal	323.808	323.808	344,267
Jalan Kerikil	0,400	0,400	0,400
Jalan Tanah	192.270	192.270	171,811
<b>Jumlah</b>	<b>516,478</b>	<b>516,478</b>	<b>516,478</b>

**Tabel 2.58.**  
**Kondisi Jalan di Kabupaten Bone Bolango**

<b>KONDISI JALAN</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Baik	247,768	323.808	344,267
Sedang	50.150	34,450	31,172
Rusak	87,070	41,040	39,401
Rusak Berat	131,490	117,180	101,638

## B. Fasilitas Air Bersih

Salah satu aspek dasar yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu ketersediaan akses air minum bagi seluruh masyarakat secara layak dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyediaan sarana prasarana air bersih menjadi agenda strategis tahunan yang dilakukan. Hingga tahun 2015, capaian kinerja penyediaan air minum yang dapat diakses oleh masyarakat yakni:

- 57,95% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan;
- 67,07% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak- perkotaan;
- 44,30% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak-perdesaan.

**Tabel 2.59.**  
**Sarana Air Bersih dan Sistem Perpipaan Kab. Bone Bolango**  
**Tahun 2013 - 2014**

<b>SARANA AIR BERSIH</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
SR Air Minum Perkotaan Terpasang (PDAM)	7.294	9.742	11.765
Cakupan Akses Air Bersih	57,95%	62%	70%

Sumber : PDAM Kab. Bone Bolango

## C. Fasilitas Sanitasi

Hingga tahun 2016, capaian kinerja sanitasi yang terkait dengan ketersediaan sanitasi layak yang dapat diakses masyarakat, yakni sebagai berikut:

**Tabel 2.60.**  
**Fasilitas Sanitasi Kab. Bone Bolango**  
**Tahun 2014 - 2016**

<b>Fasilitas Sanitasi</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Cakupan Akses Sanitasi Layak	47,94%	55,3%	60%

#### D. Fasilitas Listrik

Ketersediaan energy listrik masih merupakan salah satu issu penting di Kabupaten Bone Bolango. Hingga tahun 2016, rasio elektrifikasi Kabupaten Bone Bolango baru mencapai 75%.

**Tabel 2.61.**  
**Penyediaan Energi Listrik Tahun 2014-2016**  
**Kabupaten Bone Bolango**

NO	KEGIATAN	REALISASI		
		2014	2015	2016
1	Rasio Elektrifikasi	72%	75%	75%
2	Listrik Terbangun (SR)	733	1061	N/A

#### E. Perumahan

**Grafik . 2.8.**  
**Perkembangan Kinerja Bidang Perumahan**  
**Di Kabupaten Bone Bolango**



Sumber Data : Kantor Perumahan Kab. Bone Bolango

**Tabel. 2.62.**  
**Bantuan Rumah Bagi Masyarakat**  
**Di Kabupaten Bone Bolango**

NO	JENIS BANTUAN	TAHUN ANGGARAN					TOTAL
		2011	2012	2013	2014	2015*)	
1	BSPS	100	1823	2090	1542	827	6382
2	HUNIAN PANTAS ( APBD KAB )	N/A	N/A	25	31	103	159
3	RTLH ( APBN )	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100
4	BEDAH KAMPUNG	N/A	N/A	50	N/A	N/A	50
5	BBR	N/A	N/A	50	N/A	540	590

*Sumber Data : Kantor Perumahan Kab. Bone Bolango*

**Tabel 2.63.**  
**Perkembangan Rumah Layak Huni**  
**Di Kabupaten Bone Bolango**

PERKEMBANGAN RUMAH LAYAK HUNI	2011	2012	2013	2014	2015
	8319	8419	10242	12457	14030

*Sumber Data : Kantor Perumahan Kab. Bone Bolango*

Berikut ini adalah gambaran capaian kinerja Kabupaten Bone Bolango. tahun 2016 beserta interpretasi capaiannya:

## **2.6 Evaluasi Sasaran –sasaran pembangunan RPJMD**

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.



Pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/ kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, tetapi juga harus menyajikan data dan informasi relevan lainnya bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tahun 2016 menunjukkan hasil sebagai berikut :

➤ Sasaran Strategis 1 :

Capaian kinerja kebijakan “Bone Bolango Cemerlang” melalui strategi meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan dasar yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja Misi pertama dalam dokumen RPJMD Bone Bolango Tahun 2016-2021 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Sehat Cerdas dan Sejahtera “. Sasaran strategi ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari table di atas terlihat, bahwa dari 5 indikator dari sasaran strategis 1 ini rata-rata mencapai 99%, dimana 3 (empat) indikator memperoleh capaian 90%-100% dengan kategori nilai capaian **sangat tinggi**, walaupun disatu sisi sub indikator yakni Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI hanya mencapai 87,3%. Pencapaian ke-3 indikator tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

**a. Angka Putus Sekolah**

Penurunan Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SD yang ditargetkan sebesar 0,14% dengan realisasi 0,14% dengan capaian sebesar 100% sedangkan untuk Jenjang Pendidikan SMP ditargetkan sebesar 0.16 dengan realisasi 0.16 atau 100%, atau rata-rata 0,2%, sehingga capaian kinerja Angka Putus Sekolah kabupaten Bone Bolango sebesar 100% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Perkembangan angka penurunan APS dapat dilihat perkembangannya dalam realisasi capaian Angka Putus Sekolah pada 3 tahun terakhir.

Perkembangan angka APS dari tahun 2014 – 2016 menunjukkan angka yang fluktuatif. Berdasarkan tabel diatas maka capaian APS dari tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2015 dan tahun 2014.

## **b. Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.

Capaian APM Kabupaten Bone Bolango ditahun 2016 menunjukkan kinerja yang baik. Pada tahun 2016 APM untuk jenjang pendidikan SD 87,68% dan jenjang SMP 54.61 dengan realisasi masing-masing jenjang pendidikan SD dan SMP adalah 76,56% dan 55,33% atau rata-rata 65,9%, sehingga capaian kinerja APM kabupaten Bone Bolango sebesar 94,31%. Peningkatan Angka APM yang ditargetkan sebesar 19,12% dengan realisasi 17,88% dengan capaian sebesar 94,31% dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Pada tahun 2016 Angka Partisipasi Murni untuk tingkat SD menurun dibandingkan pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena banyak penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di luar Kabupaten yang menjanjikan fasilitas lebih baik sekolah pemerintah maupun swasta. Kondisi ini terjadi juga karena secara geografis, terdapat 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Bone Bolango yang posisi wilayahnya berbatasan langsung dengan Kota Gorontalo. Beberapa kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Kabila, Kecamatan Tapa, Kecamatan Tilongkabila, dan Kecamatan Bulango Selatan.

Sedang untuk tingkat SMP mengalami peningkatan karena Sarana prasarana dan fasilitas untuk SMP yang sudah meningkat dan mampu bersaing dengan fasilitas SMP dari luar kabupaten. Salah satu instrument yang sangat mendukung antara lain dibangunnya 4 (unit) SMP di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2016, sehingga kehadiran SMP baru tersebut dapat memperluas daya tampung siswa SMP serta mendekatkan anak-anak usia sekolah SMP untuk mengakses sarana prasarana pendidikan di wilayah Kecamatan Bulango Selatan serta beberapa kecamatan sekitar. Beberapa SMP yang dibangun pada tahun 2016 serta penambahan Ruang Kelas Lama tersebut, antara lain:

1. SMP Bulango Selatan (Baru)
2. SMP 2 Suwawa Timur
3. SMP 1 Suwawa
4. SMP Bulawa.

### **c. Angka Rata-rata Lama Sekolah**

Angka Rata – rata Lama Sekolah (RLS) adalah salah satu indicator dalam komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya.

Angka rata–rata lama sekolah merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk. Capaian RLS tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Angka rata–rata lama sekolah dari kurun waktu 2014 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan. Tahun 2014 Angka Rata-rata Lama Sekolah 7,76 dan di tahun 2016 sebesar 7.90. Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bone Bolango ini dapat dimaknai bahwa penduduk Bone Bolango semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Namun demikian perlu menjadi perhatian untuk pengembangan strategi yang lebih efektif.

#### ➤ Sasaran Strategi 2

Indikator kinerja cakupan masyarakat miskin yang terlayani Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan social yang bersifat wajib dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau yang dibayarkan oleh pemerintah.

Strategi meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila dan Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato. Dari table di atas terlihat, bahwa target indikator dari sasaran strategis 2 sebesar 98.2% dengan realisasi mencapai 100% sehingga capaian kinerja sebesar 101.8%, kategori nilai capaian **Sangat Tinggi**.

Dari segi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kabupaten Bone Bolango telah menjangkau semua masyarakat atau "universal Health coverage", sebagai program prioritas pemerintah daerah yang dibuktikan dengan peserta Jaminan

Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sebanyak 62.113 jiwa yang tersebar di 20 PKM dan rumah sakit serta yang mendapat rujukan sebanyak 1.800 jiwa.

Program JKN selain membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal juga membantu kegiatan operasional Puskesmas dalam menunjang kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Sebagai bentuk apresiasi menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan memberikan penghargaan JKN Award 2016 kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagai terbaik I dalam JKN Award di level Provinsi Gorontalo. Adapun yang menjadi indikator penilaian JKN Award oleh BPJS Kesehatan, diantaranya kepesertaan meliputi cakupan kepesertaan JKN-KIS dibandingkan jumlah penduduk, dan cakupan jumlah kepesertaan Jamkesda dibandingkan jumlah penduduk yang belum terdaftar. Selanjutnya, ketepatan pembayaran iuran (jumlah dan waktu) meliputi iuran PNS, iuran Pemda, dan iuran Jamkesda. Kemudian, fasilitas kesehatan meliputi rasio kecukupan fasilitas kesehatan (Faskes), dan entri P-Care oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Dalam indikator penilaian JKN Award 2016 ini, Kabupaten Bone Bolango meraih terbaik I dengan total poin penilaian 96,99.

➤ Sasaran Strategis 3

Dari pengukuran capaian kinerja atas keikutsertaan pemuda dalam kegiatan daerah pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015, dimana target yang telah ditetapkan hanya sebesar 28% atau 14.446 pemuda ternyata melebihi target sampai 31% atau 16.000 pemuda, sehingga masuk dalam kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam rangka peningkatan kualitas diri, selain sebagai seorang individu maupun tim yang bisa berkiprah diajari perlombaan dan pertandingan, pemuda Bone Bolango juga aktif di organisasi kepemudaan. Pemerintah berusaha memberikan fasilitas kepada pemuda yang mau aktif di organisasi.

➤ Sasaran Strategis 4

Dalam rangka mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, pemerintah berupaya melakukan kegiatan pembangunan. Upaya tersebut pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin tertentu.

Untuk mencapai sasaran diatas telah ditetapkan indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu Persentase perempuan yang menduduki jabatan public.

Capaian kinerja kebijakan “Bone Bolango Cemerlang” melalui strategi pemberdayaan perempuan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkiprah sesuai dengan kemampuannya serta memiliki kesempatan yang sama dalam menduduki jabatan publik merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja.

Pada Tahun 2016 ditargetkan persentase perempuan yang menduduki jabatan public adalah 18,64% atau 523 pegawai perempuan, namun yang terealisasi sebesar 10,19% atau 291 pegawai perempuan dengan persentase kinerja sebesar 54,7% dengan kategori **Rendah**.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran indikator kinerja persentase perempuan yang menduduki jabatan public, capaian kinerja tahun 2015 masih lebih tinggi tingkat pencapaian yaitu 15,25% dari capaian tahun 2016 sebesar 10,19% sebanyak 291 orang. Jika dibandingkan dengan komposisi pegawai bone bolango, pegawai perempuan sebesar 65,20%. Total Jabatan yang ada di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2016 adalah 635 jabatan dan yang diduduki oleh perempuan sebesar 45,83%.

➤ Sasaran Strategis 5

Sasaran kelima dari Misi Pertama adalah meningkatkan perlindungan perempuan anak melalui indikator : persentasi penurunan kasus pelanggaran hak-hak perempuan dan anak.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran indikator kinerja persentase penurunan kasus pelanggaran hak-hak perempuan dan anak, capaian kinerja tahun 2015 lebih rendah tingkat pencapaian yaitu 188 kasus yang tertangani sedang dari realisasi tahun 2016 yang tertangani sebesar 164 kasus atau turun 24 kasus, dimana target 2016 adalah penurunan penanganan kasus sebesar 13 kasus, dengan persentase kinerja sebesar 184,6% dengan kategori **Sangat Tinggi**.

Meski konsekuensi hukumannya cukup berat, dan kalangan pemerintah maupun masyarakat sipil di Kabupaten Bone Bolango pun telah bekerja keras mengatasinya dengan menghabiskan dana serta sumber daya lainnya, namun kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di negeri ini justru bertambah gawat dan mengkhawatirkan. Sepertinya para pelaku kekerasan itu tidak takut sedikit pun.

➤ Sasaran Strategis 6

Terbukanya akses layanan perlindungan sosial masyarakat miskin					
Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2015	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi	
% Penurunan Rumah Tangga miskin	%	18,16	< 17,1	17.4**	98.2
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>98.2</b>

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran indikator kinerja persentase penurunan rumah tangga miskin, capaian kinerja tahun 2016 lebih tinggi tingkat pencapaian yaitu 17.4% (Angka Sangat Sementara) dari target yang telah ditetapkan sebesar < 17,1%, dengan persentase kinerja sebesar 98,2% dengan kategori **Sangat Tinggi**.

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Bone Bolango dalam kurun waktu lima tahun (2011-2015) menunjukkan stagnasi penurunan angka kemiskinan, bahkan terkoreksi pada tahun 2016 (BPS 2015). Kondisi kemiskinan di Bone Bolango perlu perhatian serius pasalnya proporsi Penduduk dengan Tingkat Konsumsi di Bawah Garis Kemiskinan di daerah ini (21.05 persen) berada di atas propinsi Gorontalo (17.41 persen) dan jauh diatas target penurunan proporsi penduduk miskin Nasional (10.96 persen) dan Target MDGs (7.75 Persen). Sepanjang periode 2008-2013 angka kemiskinan turun 3,3 persen atau hanya tidak cukup 1 persen pertahun (0.8 persen). Angka kemiskinan terendah yang pernah di capai dalam kurun waktu 2008-2012 hanya terjadi pada tahun 2010 yakni 18.87 persen setelah itu naik 21.05 persen tahun 2015. Seiring angka kemiskinan angka Kesenjangan kemiskinan menunjukkan trend yang fluktuatif meskipun demikian tahun 2012 indeks kedalaman kemiskinan turun menjadi 2.8 persen dari tahun sebelumnya

yakni 4.4 tahun 2011. Oleh karena itu Dalam rangka mewujudkan target yang telah ditetapkan diperlukan upaya sistematis yang bersifat komprehensif. Hal ini untuk memastikan bahwa upaya tersebut akan mampu menyentuh setiap elemen masyarakat miskin.

Dalam kurun waktu Lima Tahun Kabupaten Bone Bolango (2010-2015) Kondisi kemiskinan menurun hingga separuh sejak tahun 2013, namun cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir (2010-2015). Kondisi kemiskinan Kabupaten Bone Bolango berpengaruh dominan terhadap kondisi kemiskinan pada tingkat provinsi. Grafik menunjukkan kecenderungan secara linier kondisi kemiskinan Kabupaten Bone Bolango dengan Provinsi Gorontalo. Jika dilihat dari kinerja peningkatannya, tren kemiskinan di kabupaten Bone Bolango menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja setiap tahunnya.

Data Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015 menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan atas kondisi kemiskinan dengan data sebelumnya yakni PPLS 2011. Jumlah Rumah Tangga maupun Individu dengan Status kesejahteraan 40 persen terendah di kabupaten Bone Bolango.

Mencermati perkembangan antar waktu kondisi kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2010-2016 kondisi kemiskinan belum menunjukkan perbaikan berarti, (Grafik). Praktis lebih dari lima tahun terakhir Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango tanpa pola dan progresivitas kebijakan yang jelas dan konsisten, Kondisi kemiskinan lebih dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan nasional yang tidak disertai dengan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan di daerah.

#### ➤ Sasaran Strategis 7

Capaian kinerja strategi tersedianya sarana dan prasarana penunjang konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja Misi kedua dalam dokumen RPJMD Bone Bolango Tahun 2016-2021 yaitu “Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan desa sebagai penopang pertumbuhan wilayah berbasis lingkungan hidup “. Sasaran strategi ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan. Dari table di atas terlihat, bahwa indikator dari sasaran strategis 7 ini mencapai 101.4%, dengan kategori nilai capaian **sangat tinggi**

Indikator kinerja utama persentase peningkatan kondisi jalan baik adalah sebagai penunjang aksesibilitas wilayah merupakan indikator kinerja utama yang mengukur tingkat pencapaian kinerja pemerintah kabupaten Bone Bolango dalam penyediaan sarana prasarana jalan yang memadai.

Untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas dan mobilitas penduduk yang semakin tinggi diperlukan prasarana berupa jalan dan jembatan yang baik. Prasarana jalan yang baik akan memperlancar aksesibilitas penduduk dalam melakukan aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat baik berupa pendistribusian barang maupun kelancaran jangkauan akses ke kantong-kantong produksi.

Tahun 2016 ditargetkan total panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah 71% dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 368,373 km yaitu sepanjang 261,545 km kondisi baik. Dinas Pekerjaan Umum melalui Program Kegiatan Tahun 2016 telah melaksanakan kegiatan peningkatan jalan sebesar 45,5 km maka realisasi kondisi jalan baik Kabupaten Bone Bolango tahun 2016 mengalami peningkatan jalan baik sebesar 66,67% dari total panjang jalan kabupaten yaitu sepanjang 245,603 km jalan kabupaten dengan kondisi baik saat ini. Sehingga diperoleh capaian kinerja kondisi jalan baik tahun 2016 sebesar 93, 91% dengan predikat capaian kinerja kategori **SANGAT TINGGI**.

➤ Sasaran Strategis 8

Dari hasil pengukuran kinerja cakupan rumah layak huni sesuai target tahun 2016 adalah 74,5% atau sebanyak 25.092 rumah layak huni dari total rumah di Kabupaten Bone Bolango sebesar 34.373 unit rumah. Realisasi tahun 2016 telah dibangun 591 unit rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), maka capaian rumah layak huni sampai dengan tahun 2016 sebesar 26.044 rumah atau mencapai 75,77%. Sehingga capaian kinerja cakupan rumah layak huni tahun 2016 adalah sebesar 101.7%, dengan kategori predikat capaian kinerja **sangat tinggi**.

Berdasarkan data Kantor Perumahan dan Pengembangan Kawasan Kabupaten Bone Bolango jumlah total rumah yang tersebar di Kecamatan sebanyak 34.373 unit. Jumlah rumah layak huni sebanyak 25.07 (74,5%) unit dan rumah tidak layak huni 18.411 unit.



➤ **Sasaran Strategis 9**

Jaringan irigasi (sekunder) kondisi baik tahun 2016 ditargetkan mencapai 58% yaitu sepanjang 5800 meter kondisi baik dari total jaringan irigasi sepanjang 10.000 meter. Tahun 2016 jaringan irigasi yang diperbaiki adalah sepanjang 3728 meter ditambah dengan pembangunan jaringan irigasi baru sepanjang 2000 meter sehingga total panjang jaringan irigasi yang dibangun dan diperbaiki adalah sepanjang 5728 meter dengan total panjang irigasi sekunder sepanjang 10.000 meter. Dengan demikian capaian realisasi diperoleh sebesar 57,28 %. Dari realisasi 57,28% diperoleh **capaian kinerja** tahun 2016 sebesar **98,76%** dengan kategori capaian kinerja **sangat tinggi**.

Dengan jaringan irigasi kondisi baik sampai dengan tahun 2016 sebesar 57,28% diperoleh total cakupan layanan seluas 2.730 Ha dengan luas areal layanan irigasi kondisi baik seluas 2.177,40 Ha atau sebesar 79,76 % dan luas areal layanan irigasi yang kurang baik adalah seluas 552,60 Ha atau sebesar 25,38 %.

➤ **Sasaran Strategis 10**

Untuk pencapaian sasaran 10 yaitu terciptanya penataan ruang yang memiliki Daya tampung dan daya dukung lingkungan menggunakan indikator kinerja utama peningkatan jumlah ruang terbuka hijau (RTH) buatan yang dibangun dengan target tahu 2016 adalah 10 titik RTH terbangun. Dari hasil realisasi tahun 2016 setelah dilakukan pendataan bahwa terdapat 12 titik RTH yang terbangun di tahun 2016. Sehingga capaian kinerja tahun 2016 melampaui target dengan capaian kinerja 120 % dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**.

Ke-12 titik ruang terbuka hijau yang terbangun tahun 2016 yaitu ruang terbuka hijau yang dibuat oleh Badan Lingkungan Hidup sebanyak 4 titik yang berlokasi di RTH taman kantor bupati Bone Bolango, RTH di samping kantor inspektorat, RTH di rumah dinas Bupati, RTH yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 6 titik yang berlokasi : RTH di Center Point, RTH median jalan Alun-Alun, RTH trotoar alun-alun, RTH lapangan Ipot Kecamatan Tapa, RTH Kecamatan Botupingge, dan RTH di lapangan Kecamatan Bone, RTH yang dibangun oleh kantor Bappeda yaitu RTH halaman kantor Bappeda serta RTH yang dibangun oleh Kantor Camat Pinogu yaitu RTH Kecamatan Pinogu.

Dari realisasi yang diperoleh tahun 2016 sebanyak 12 titik RTH, ditambahkan dengan realisasi sampai dengan tahun 2015 18 titik, maka total RTH yang dibuat sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 30 titik.

Mengapa ruang terbuka hijau buatan ini merupakan indikator sangat penting dalam rangka pencapaian sasaran 10 Terciptanya Penataan Ruang yang Memiliki Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan. Secara definitife, Ruang Terbuka Hijau (Green Openspaces) adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau budidaya pertanian. Selain itu untuk meningkatkan kualitas atmosfir, menunjang kelestarian air dan tanah. RTH di tengah-tengah kota juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap kota.

Kegunaan dari RTH adalah diperlukan untuk kesehatan, arena bermain, olahraga dan komunikasi publik. Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 30 % dari luas wilayah. Ruang terbuka hijau yang dibuat di Kabupaten Bone Bolango tahun 2016 telah memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bone Bolango. Ini dibuktikan dengan semakin banyak masyarakat berkunjung dan memanfaatkan RTH ini sebagai tempat interaksi sosial, taman bermain dan sebagai tempat foto-foto selfie. RTH yang paling banyak dikunjungi saat ini di Kabupaten Bone Bolango adalah Center Point. Pada umumnya pengunjung Center Point adalah remaja yang ingin foto selfie atau sekedar duduk santai dan menjadi tempat pertemuan para kawula muda. Yang menarik pada RTH Center Point ini adalah gapura Center Point yang berupa gerbang yang ditiru dari bangunan terkenal di paris yaitu bangunan Arch de Triomphe (Gerbang Kemenangan), sehingga menjadi lokasi faforit bagi kawula muda di Bone Bolango maupun se Provinsi Gorontalo.

#### ➤ Sasaran Strategis 11

Untuk pencapaian sasaran strategis ke 11 yaitu terwujudnya kemandirian desa menggunakan indikator kinerja berkurangnya jumlah desa tertinggal serta indikator jumlah desa maju. Dari hasil realisasi tahun 2016 dengan menggunakan data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Gorontalo, ternyata jumlah desa tertinggal dan desa maju di Kabupaten Bone Bolango tidak mengalami perubahan berdasarkan data di tahun 2015 yaitu jumlah desa sangat tertinggal/tertinggal tetap sebanyak 105 desa dan desa maju sebanyak 1 desa. Sehingga capaian kinerja tahun

2016 tidak mencapai target dengan rata-rata capaian kinerja hanya 61.90% dengan kategori capaian **rendah**.

Berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Gorontalo, maka status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun Provinsi Gorontalo Tahun 2016, digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.64.**  
**Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun**  
**Provinsi Gorontalo Tahun 2016**

NO.	STATUS DESA	BOALEMO	GORONTALO	POHUWATO	BONE BOLANGO	GORONTALO UTARA	TOTAL
1	Desa Mandiri	0	0	0	0	0	0
2	Desa Maju	2	2	7	3	2	14
3	Desa Berkembang	51	82	52	62	26	265
4	Desa Tertinggal	26	100	41	88	87	349
5	Desa Sangat Tertinggal	3	7	1	7	8	29
<b>Jumlah Total</b>		<b>82</b>	<b>191</b>	<b>101</b>	<b>160</b>	<b>123</b>	<b>657</b>
<b>IDM Provinsi Gorontalo</b>		<b>0.6062</b>	<b>0.5906</b>	<b>0.6088</b>	<b>0.5740</b>	<b>0.5695</b>	<b>0.5898</b>

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa untuk Kabupaten Bone Bolango, persentase status desa yang dominan adalah jumlah desa tertinggal sebanyak 59%, tertinggi ke-2 setelah Kabupaten Gorontalo Utara.

Indeks Desa Membangun, atau disebut IDM, dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan sebagaimana tertuang dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 (RPJMN 2015 – 2019), yakni mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 5000 Desa dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 Desa pada tahun 2019. Sasaran pembangunan tersebut memerlukan kejelasan *lokus* (Desa) dan status perkembangannya. Indeks Desa Membangun tidak hanya berguna untuk mengetahui status perkembangan setiap Desa yang lekat dengan karakteristiknya, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai instrumen untuk melakukan targeting dalam pencapaian target RPJMN 2015 –2019 dan koordinasi K/L dalam pembangunan Desa.

### ➤ Sasaran Strategis 12

Capaian kinerja strategi meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja Misi ketiga dalam dokumen RPJMD Bone Bolango Tahun 2016-2021 yaitu “Mewujudkan perekonomian Daerah yang berdaya saing, merata dan Berkeadilan“. Dari table di atas terlihat, bahwa indikator dari sasaran strategis 12 ini realisasinya masih menggunakan data 2015, hal ini disebabkan karena BPS Bone Bolango baru merilis data pertumbuhan ekonomi, gini ratio dan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) nanti pada bulan Juli 2017, walaupun realisasinya baru menggunakan data tahun 2015, namun pemerintah Kabupaten optimis bahwa target capaian indikator di tahun 2016 akan tercapai bahkan cenderung meningkat. Capaian kinerja dari ke-3 indikator ini sebesar 94.3%, dengan kategori nilai capaian **sangat tinggi**.

#### a. Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu daerah. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku setiap tahunnya. Khusus pada pengukuran capaian kinerja indikator pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum bisa menyajikan data capaian kinerja tersebut. Hal ini disebabkan data pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 belum dirilis oleh BPS Bone Bolango, sehingga dalam mengukur indikator kinerja pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilakukan. Pemerintah kabupaten Bone Bolango telah bersurat secara resmi kepada pihak BPS untuk meminta data pertumbuhan ekonomi tahun 2016 namun jawaban BPS belum bisa mempublikasikan data tersebut. BPS kabupaten Bone Bolango akan merilis data pertumbuhan ekonomi tahun 2016 pada tahun 2017 nanti.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bone Bolango, pertumbuhan ekonomi dari tahun 2013 dan 2014 cenderung meningkat tetapi pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi kabupaten bone bolango menurun.

Dari hasil pengukuran kinerja pertumbuhan ekonomi sesuai target tahun 2016 adalah 7,1 sedangkan Realisasi tahun 2016 masih menggunakan angka sementara yaitu realisasi tahun 2015 yakni 6,52. Sehingga capaian kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2016 adalah sebesar 91,83%, dengan kategori predikat capaian kinerja *tinggi*.

Pencapaian kinerja Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango dipengaruhi dari berbagai sector, salah satunya dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dirumuskan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 6,52.

Beberapa instrument yang dilakukan dalam upaya mendukung pencapaian kinerja pertumbuhan ekonomi, tidak terlepas dari instrument kebijakan anggaran yang banyak dialokasikan pada sektor-sektor ekonomi produktif dan unggulan seperti, pengembangan kawasan Kawasan Pariwisata Botutonuo dan Lombongo, Pengembangan Pertanian Organik, Padi, Jagung, Pengembangan Industri Olahan Kopi, Aren, Kerawang, Pengembangan Budidaya Perikanan. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango

Penyediaan sarana prasarana ekonomi sebagai simpul pertumbuhan Perbaikan kinerja tersebut juga dipengaruhi oleh perbaikan infrastruktur dasar wilayah yang diarahkan pada pengembangan ibu kota kecamatan, pusat pemukiman dan pusat produksi.

#### **b. Gini Ratio membaik**

Indikator kinerja utama Gini Ratio meningkat adalah ukuran pemerataan pendapatan yang di hitung berdasarkan kelas pendapatan. Keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten Bone Bolango selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran.

Keberhasilan diberbagai bidang dan sector pembangunan yang diukur dengan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yang tinggi ternyata sering kali diikuti dengan ketimpangan antara golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan kesenjangan atau ketimpangan antar daerah (yang maju dan yang tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan dan antar wilayah dapat memunculkan masalah kecemburuan social, kerawanan disintegrasikan wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam.

Pada tahun 2016, realisasi gini ratio mencapai angka 0,40 atau 100% dibandingkan target yang ditetapkan. Dengan capaian ini, kinerja yang dicapai telah masuk criteria tinggi, bila disandingkan dengan target akhir RPJMD dengan predikat capaian kinerja kategori **sangat tinggi**.

Tingkat pemerataan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pemerataan distribusi pendapatan yang sering diukur dengan koefisien gini dan persentase kemiskinan. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan yang ditentukan oleh Bank Dunia (World Bank) adalah  $G < 0,40$  berarti ketimpangan rendah, antara  $0,40 < G < 0,50$  berarti ketimpangan sedang dan  $G > 0,50$  berarti ketimpangan tinggi.

Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dimana pada tahun 2011 dan 2013 kondisi gini ratio Kabupaten Bone Bolango berada pada angka  $> 40$  yang berarti memiliki tingkat ketimpangan yang sedang, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 angka gini ratio  $< 40$  yang berarti memiliki tingkat ketimpangan yang rendah yaitu 0.366. Pada tahun 2016 diproyeksikan angka gini ratio kembali naik namun tetap berada  $< 40$  yakni 0.392 yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah.

#### c. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

Walaupun sektor pertanian masih mendominasi perekonomian Bone Bolango, namun persentase penduduk yang bekerja di sektor tersebut kian menurun. Diduga hal ini dikarenakan adanya alih fungsi lahan sehingga masyarakat beralih ke sektor perdagangan, jasa kemasyarakatan, pertambangan, bangunan, transportasi dan lainnya. Dalam empat tahun terakhir TPAK Kabupaten Bone Bolango di atas 50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah penduduk Kabupaten Bone Bolango merupakan penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Di tahun 2014, dari 100 orang usia kerja, 58 orang di antaranya tergolong angkatan kerja (yang

aktif secara ekonomi). Dan dari 100 penduduk yang aktif secara ekonomi, 95 orang di antaranya bekerja, dan sisanya menganggur.

Pada tahun 2016, realisasi tingkat pengangguran terbuka mencapai angka 6.76 atau 92,2% dibandingkan target yang ditetapkan. Namun data ini masih menggunakan data tahun 2015 karena data TPT akan dirilis BPS nanti pada bulan Juli 2017. Dengan capaian ini, bila disandingkan dengan target akhir RPJMD dengan predikat capaian kinerja kategori **sangat tinggi**.

➤ Sasaran Strategis 13

Strategi untuk mencapai sasaran peningkatan pertumbuhan UMKM dilakukan melalui penguatan ekonomi dan pelatihan pengembangan kewirausahaan. Dalam kegiatan penguatan ekonomi bantuann yang diberikan dalam bentuk bahan – bahan sebagai dasar pembuatan kue sebanyak 2 paket. Bantuan modal sebenarnya telah disediakan namun karena terbentur dengan permendagri no 14 tahun 2016 dimana penerima bantuan sosial harus berbadan hukum sedang UMKM di kabupaten bone bolango bisa dibilang belum memiliki badan hukum.

Dari tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan UMKM di bone bolango sangat pesat, dari yang ditargetkan hanyaa 0,15% tetapi bisa terealisasi sampai dengan 15,14% atau sebanyak 2.909 UMKM. Pertumbuhan yang terlalu cepat ini mengindikasikan adanya kesalahan dalam pengumpulan data. Hal ini disebabkan pada saat pendataan SKPD terkaait tidak menggunakan indikatif yang mana yang bisa masuk dalam UMKM.

➤ Sasaran Strategis 14

Pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Dilihat dari kondisi wilayahnya, hampir seluruh wilayah Kabupaten bone bolango berpotensi untuk diolah menjadi lahan pertanian dan peternakan. Namun demikian terdapat beberapa kendala dalam pengembangan pertanian, diantaranya ketersediaan lahan pertanian terbatas, factor alam yang sering mengalami banjir ,longsor dan hama serta minat petani yang semakin menurun.

Produksi pertanian padi di kabupaten Bone Bolango terjadi penurunan hasil, dilihat dari tabel diatas bahwa capaian kinerja atas realisasi pencapaian produksi padi dari kondisi capaian tahun 2015 sebesar 25.257,14 ton, dan target tahun 2016 meningkat sebesar 2,9% dari kondisi awal atau sebesar 25.989,60 ton atau pencapain kinerja sebesar 69,34%. Hal ini berarti dalam meningkatkan presentasi produksi

pertanian padi sebesar 2,9% dari 25.257,14 ton hanya tercapai 69,34% dengan kriteria **sedang**.

Sementara itu, Produksi pertanian jagung di kabupaten Bone Bolango terjadi peningkatan produksi yang sangat besar dibandingkan tahun sebelumnya. Dilihat dari tabel diatas bahwa capaian kinerja atas realisasi pencapaian produksi jagung dari kondisi capaian tahun 2015 sebesar 11.890,25 ton, dan target tahun 2016 meningkat sebesar 7,5% dari kondisi awal atau sebesar 11.890,25 ton atau pencapain kinerja sebesar 383,92%. Hal ini berarti dalam meningkatkan presentasi produksi pertanian padi sebesar 2,9% dari 11.890,25 ton telah melebihi target dan mencapai 383,92% dengan **Sangat Tinggi**.

➤ Sasaran Strategis 15

sasaran strategis 15 ini realisasinya masih 0, karena pada tahun 2016 belum dianggarkan kegiatan pembangunan pasar harian. Beberapa alasan mendasar akan disampaikan pada uraian dibawah ini.

Distribusi barang-barang kebutuhan pokok masyarakat di kabupaten Bone Bolango berjalan cukup lancar berkat peran adanya pasar tradisional, dimana pasar tradisional yang tersedia baru berjumlah 22 buah yang terdiri dari Pasar Inpres 7 buah, Pasar Non Inpres 3 buah dan Pasar bandes 12 buah.

Sampai saat ini pembangunan pasar tradisional menjadi pasar sentral di kabupaten Bone Bolango masih dalam tahap proses peralihan dari pasar mingguan menjadi pasar harian dan pembangunannya sampai saat ini terus dipacu untuk melengkapi kekurangan yang ada. Dari 22 (Dua puluh dua) pasar tradisional yang tersebar diseluruh kabupaten Bone Bolango sampai saat ini, baru 9 (Sembilan) pasar yang telah direvitalisasi yakni pasar Minggu Alale, Pasar Jumat Tumbuhe, Pasar kamis Tapa, pasar selasa Kabila, Pasar Rabu Suwawa, pasar senin Bongoime, Pasar Bone pantai, pasar Tombilato dan pasar Botupingge. Tahun 2016 revitalisasi pasar kamis Tapa dan pasar didesa Pangi Kecamatan Suwawa Timur. Padahal terciptanya pasar rakyat yang bersih, tertib aman dan nyaman turut mendukung roda perekonomian masyarakat.

Pasar sentral yang berlokasi di kecamatan Kabila dan Kecamatan Tapa adalah pusat perdagangan tradisional yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik pedagang maupun pembeli diharapkan dapat beroperasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kedepan. Selama ini pasar Selasa di desa Olohuta di Kecamatan kabila



beroperasi setiap hari Selasa dirasa sangat kurang efektif karena selama satu minggu hanya satu kali pasar yaitu hari Selasa, kemudian diupayakan beroperasi di hari Sabtu. Namun seiring dengan penambahan los dan kios yang bersumber dari dana APBN (Tugas Perbantuan) tahun Anggaran 2015, pasar Selasa secara bertahap akan diproyeksi menjadi pasar sentral di kabupaten Bone Bolango.

Pasar Kamis yang terletak di desa Talolubutu kecamatan Tapa beroperasi setiap hari Kamis di rasakan kurang efektif karena selama satu minggu hari pasar hanya satu kali yaitu hari Kamis sehingga diupayakan satu minggu menjadi dua kali yaitu hari Kamis dan Senin. Seiring dengan pengembangan pasar yaitu penambahan los pasar dan kios pasar melalui dana APBN (Tugas Perbantuan) Tahun 2016, pasar Kamis tiga tahun kedepan akan menjadi pasar sentral kedua dan akan dinaikkan statusnya menjadi pasar harian di kabupaten Bone Bolango.

Dalam rangka revitalisasi pasar-pasar tradisional mingguan perlu dilakukan identifikasi dan pendataan secara menyeluruh tentang kondisi pasar-pasar tradisional saat ini. Dari 21 pasar tradisional yang ada, 9 pasar yang dikelola oleh Pemerintah dan 12 pasar yang dikelola oleh masyarakat.

➤ Sasaran Strategis 16

Kewenangan pemerintah kabupaten pada urusan penanaman modal mencakup: Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi ditujukan untuk meningkatkan kualitas promosi investasi dan kerjasama investasi, baik PMA maupun PMDN dan menciptakan dan meningkatkan iklim investasi yang berdaya saing global melalui promosi peluang-peluang investasi yang dapat dilakukan di kabupaten Bone Bolango maupun di Luar Negeri.

Sasaran Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah dengan indikator persentase peningkatan nilai investasi PMA dan PMDN adalah meningkatkan minat investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta investasi Daerah di Kabupaten Bone Bolango serta Peningkatan realisasi nilai investasi PMA dan PMDN serta Investasi Daerah.

Nilai investasi di kabupaten Bone Bolango masih tergolong kecil namun capaian kinerjanya sangat baik, dilihat dari tabel diatas bahwa capaian kinerja atas realisasi investasi PMA dengan kondisi awal Rp.64.475.854.000, dan target tahun 2016 < 50% dapat dicapai dengan melewati target sebesar Rp.94.908.944.000 atau pencapaian kinerja sebesar 294,40%.

Selanjutnya evaluasi dari realisasi investasi dalam negeri dengan kondisi awal sebesar Rp.625.930.650.593, dengan target tahun 2016 < 1% atau sebesar Rp.6.253.053.451 terealisasi sebesar Rp.10.000.000.000 atau dengan pencapaian kinerja sebesar 160%. Hal ini berarti dalam meningkatkan presentasi nilai investasi PMA dan PMDN sebesar 227,2% dengan kriteria **sangat tinggi**.

➤ Sasaran Strategis 17

a. Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan data capaian kinerja, dari target WTP yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka realisasinya WTP atau capaian kinerja mencapai **100%** dengan kategori **sangat tinggi**.

Sudah 3 tahun berturut-turut Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP. Perbandingan capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun 2011-2016 dapat dilihat pada table berikut ini.

**Tabel 2.65**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**  
**Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2011- 2016**

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Predikat	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

- b. Predikat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LHE AKIP).

SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, system penganggaran dan system pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

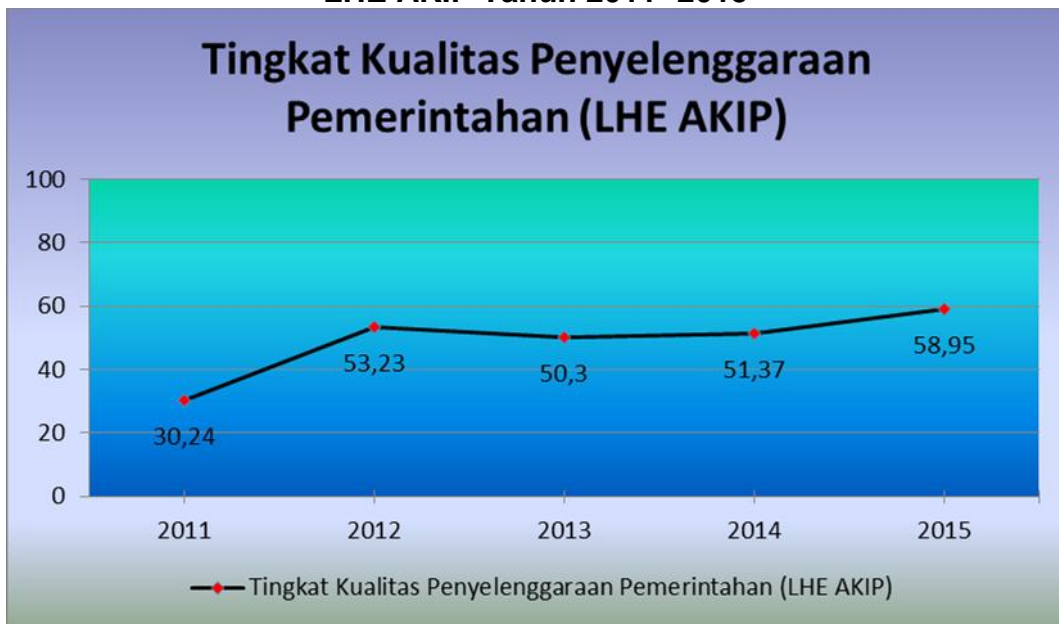
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Berdasarkan pengukuran kinerja tabel diatas dapat digambarkan bahwa dari target CC yang sudah ditetapkan, maka realisasi pencapaian indikator sasaran predikat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah CC dengan kinerja pencapaian sebesar **100%** dengan kategori **sangat tinggi**.

**Tabel 2.66**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**  
**LHE AKIP Tahun 2011- 2015**

<b>Tahun</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan (LHE AKIP)	30.24	53.23	50.3	51.37	58.95

**Grafik 2.11**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**  
**LHE AKIP Tahun 2011- 2015**



c. Nilai LPPD

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah), dan Informasi LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Bagi Pemerintah, LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah. LPPD dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk diberikan kepada Pemerintah Pusat melalui Departemen Dalam Negeri setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pengukuran kinerja tabel diatas dapat digambarkan bahwa dari target Tinggi (Peringkat 155) yang sudah ditetapkan, maka proyeksi realisasi pencapaian indikator sasaran predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah Tinggi (Peringkat 125) dengan kinerja pencapaian sebesar **124%** dengan kategori **sangat tinggi**. Peringkat ini baru proyeksi karena Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (LPPD) baru diserahkan ke Pemerintah Provinsi dan untuk selanjutnya menunggu hasil evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

**Tabel 2.67**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**  
**LPPD Tahun 2011- 2015**

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Peringkat LPPD	320	215	203	155	Pengumuman Bulan April 2017	Tahap penyusunan

d. Prosentase Peningkatan Kapasitas Aparatur (Diklat Struktural)

Dalam konsep *good governance*, Aparatur Sipil Negara adalah penggerak utama birokrasi pemerintahan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Dalam konteks itulah maka dibutuhkan aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap) yang sesuai dengan persyaratan dalam jabatannya, sehingga mampu mewujudkan birokrasi pemerintahan yang berkualitas, kompetitif dan memiliki nilai keunggulan yang tinggi.

Pemenuhan kompetensi untuk menghasilkan aparatur yang profesional dan kompeten tersebut, telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui pelaksanaan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat), baik Diklat struktural, teknis maupun fungsional. Dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi aparatur tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga telah melaksanakan bimbingan teknis, magang (*on job training*) dan mengirimkan aparatur untuk mengikuti pendidikan lanjutan, baik jenjang sarjana (S1), magister (S2) maupun doktoral (S3).

Dari hasil penghitungan atas setiap indikator kinerja sasaran diatas, diperoleh hasil persentase rata - rata capaian kinerja sasaran Tahun 2016 sebesar 98,69%. Dengan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pada sasaran

peningkatan SDM Aparatur yang professional telah berhasil mencapai target kinerjanya dengan **sangat tinggi**. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2015 sebesar 75%, maka capaian kinerja pada sasaran ini, menunjukkan konsistensi peningkatan hasil kinerja yang meningkat pada setiap tahunnya.

➤ Sasaran Strategis 18

Tugas aparatur negara dalam memberikan pelayanan publik masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan media sosial sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dalam latar belakang (bab 1) menyebutkan bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, salah satu upaya untuk dapat dilakukan perbaikan terhadap kualitas layanan pemerintah adalah dengan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap unit-unit layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Dari hasil penghitungan atas setiap indikator kinerja sasaran diatas, diperoleh hasil persentase rata - rata capaian kinerja sasaran Tahun 2016 sebesar 103,3%. Dengan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pada sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah telah berhasil mencapai target kinerjanya dengan **sangat tinggi**. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2016 ini mengalami peningkatan dari sisi parameter atau bidang yang akan disurvei yakni 15 bidang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya hanya 5 parameter/bidang.

**Tabel 2.68**  
**Perbandingan Bidang yang disurvei tahun 2015 dan 2016**

<b>NO</b>	<b>BIDANG TAHUN 2015</b>	<b>BIDANGTAHUN 2016</b>
1.	Pendidikan	Pendidikan
2.	Kesehatan	Kesehatan
3.	Infrastruktur jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum
4.	Penanganan Bencana Alam	Penanggulangan Bencana Alam
5.	Bantuan Bagi Petani/Nelayan	Program Bantuan Lainnya
6.		Kependudukan
7.		Tata Ruang
8.		Sosial
9.		Kelautan dan Perikanan
10.		Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan
11.		Pemberdayaan Ekonomi
12.		Pariwisata
13.		Keluarga Berencana
14.		Perpustakaan
15.		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bone Bolango terhadap layanan pemerintah dan program pembangunan Bone Bolango merupakan akumulasi keseluruhan jenis layanan dan program pembangunan yang dilaksanakan.

**Tabel 2.69**  
**IKM Bone Bolango per Kecamatan**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>IKM</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>KUALITAS</b>
1	Suwawa Timur	73,70%	B	Memuaskan
2	Tapa	72,40%	B	Memuaskan
3	Bulawa	70,60%	B	Memuaskan
4	Bulango Utara	69,60%	B	Memuaskan
5	Bone	69,50%	B	Memuaskan
6	Kabila	68,50%	B	Memuaskan
7	Bulango Selatan	68,40%	B	Memuaskan
8	Kabila Bone	68,40%	B	Memuaskan
9	Tilongkabila	68,00%	B	Memuaskan
10	Suwawa Tengah	67,40%	B	Memuaskan
11	Botupingge	66,30%	B	Memuaskan
12	Suwawa	66,20%	B	Memuaskan
13	Pinogu	65,00%	B	Memuaskan
14	Suwawa Selatan	64,90%	B	Memuaskan
15	Bone Raya	64,10%	B	Memuaskan
16	Bonepantai	62,30%	C	Kurang Memuaskan
17	Bulango Timur	61,10%	C	Kurang Memuaskan
18	Bulango Ulu	61,10%	C	Kurang Memuaskan
	IKM	68,80%	B	Memuaskan

**Tabel 2.70**  
**IKM Kabupaten Bone Bolango per Bidang/SKPD**  
**Penanggung Jawab**

<b>NO</b>	<b>SKPD Penanggungjawab</b>	<b>Bidang</b>	<b>IKM</b>	<b>Kategori</b>	<b>Kualitas</b>
1	Dinas Kesehatan	Puskesmas	82,70%	A	Sangat Memuaskan
2	Rumah Sakit	Rumah Sakit	82,00%	A	Sangat Memuaskan
3	Dinas Dikbud	Pendidikan	81,80%	A	Sangat Memuaskan
4	Dinas Kependu-dukuan dan Capil	Kependudukan	80,80%	B	Memuaskan
5	BPPT dan Penanaman Modal & Dinas PU	Tata Ruang	76,20%	B	Memuaskan
6	Lintas SKPD	Program Bantuan Lainnya	74,90%	B	Memuaskan
7	Dinas Pariwisata	Pariwisata	68,70%	B	Memuaskan
8	Kantor Satpol PP/Badan Kesbang Pol	Ketenteramaan, Ketertibaan Umum dan Perlindungan Masyarakat	67,50%	B	Memuaskan
9	Dinas Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	66,60%	B	Memuaskan
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Pemberdayaan Ekonomi	66,40%	B	Memuaskan
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pertanian dan Ketahanan Pangan	65,40%	B	Memuaskan
12	BKKBN dan PP	KB	65,40%	B	Memuaskan
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanganan Bencana Alam	65,10%	B	Memuaskan
14	Dinas Peternakan	Peternakan	62,80%	B	Memuaskan
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	Perikanan-Kelautan	60,10%	C	Kurang Memuaskan
16	Dinas Sosial dan Naker	Sosial	53,30%	C	Kurang Memuaskan
17	Kantor Perpusta-kaan Dan Arsip Daerah	Perpustakaan	40,80%	D	Tidak Memuaskan
<b>IKM Bone Bolango</b>			<b>68,80%</b>	<b>B</b>	<b>Memuaskan</b>



Dari Tabel 3.39 terlihat bahwa IKM Bone Bolango Tahun 2016 sebesar 68,8% atau kategori B. Dengan demikian secara keseluruhan tingkat kepuasan masyarakat Bone Bolango terhadap pelaksanaan program pembangunan dan layanan publik oleh Pemerintah Daerah Bone Bolango Tahun 2016 adalah berada pada level kualitas memuaskan.

Oleh karena pengukuran IKM Bone Bolango tahun 2016 mencakup 33 (tiga puluh tiga) jenis layanan pemerintahan atau mencakup 15 (lima belas) bidang pembangunan maka untuk memperoleh trend IKM dari tahun 2015 ke tahun 2016 yang obyektif, maka perlu dilakukan perhitungan IKM Bone Bolango tahun 2016 dengan dibatasi hanya pada jenis layanan/program pembangunan yang sama dengan jenis layanan/program pembangunan yang dijadikan indikator perhitungan IKM pada tahun 2015.

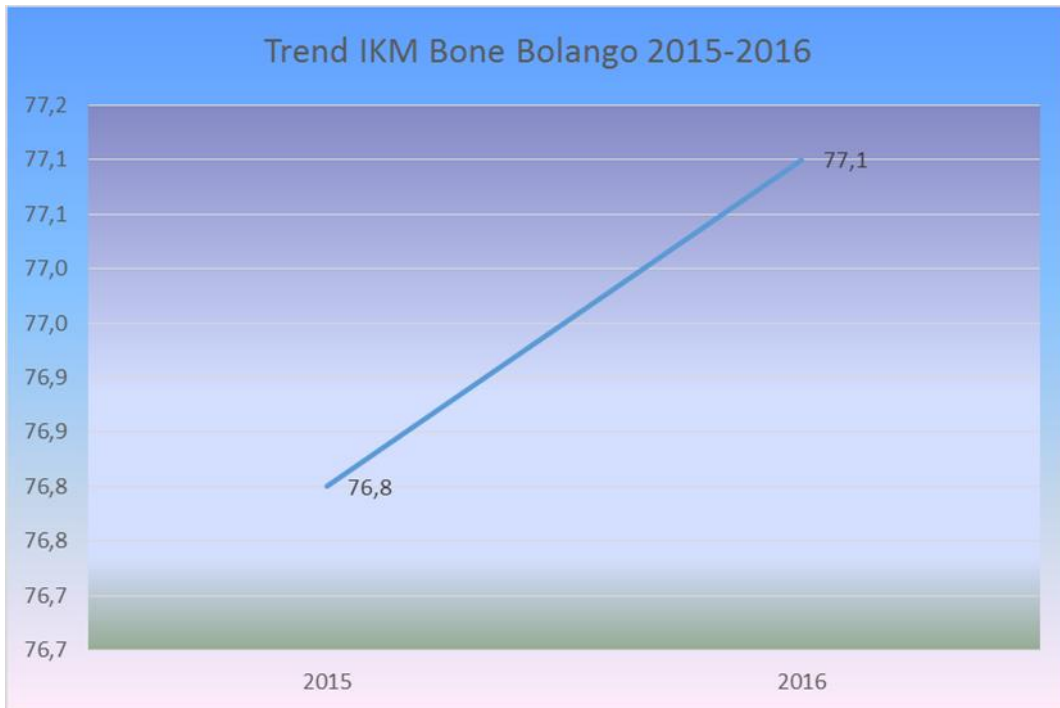
**Tabel 2.71**  
**IKM Kabupaten Bone Bolango tahun 2016 Dengan**  
**7 Program Pembangunan**

NO	JENIS LAYANAN/PROGRAM	2016
1	Penyelenggaraan Pendidikan SD-sederajat	82,4%
2	Penyelenggaraan Pendidikan SMP-sederajat	81,8%
3	Penyelenggaraan Pendidikan SMA-sederajat	81,3%
4	Layanan Kesehatan Puskesmas	82,7%
5	Layanan Kesehatan Rumah Sakit	82,0%
6	Infrastruktur Jalan	71,0%
7	Infrastruktur Jembatan	70,5%
8	Penanggulangan Bencana Alam	65,1%
<b>IKM Bone Bolango</b>		<b>77,1%</b>

Dengan demikian trend IKM Bone Bolango dari tahun 2015 sampai 2016 dapat diperoleh seperti ditunjukkan pada Grafik 3.14

**Grafik 2.12**

**Trend IKM Kabupaten Bone Bolango tahun 2015-2016**



Dari Grafik 3.9 dapat diketahui adanya peningkatan IKM Bone Bolango tahun 2016 walaupun sangat kecil yakni hanya sebesar 0,3 point dibanding IKM tahun 2015.

➤ Sasaran Strategis 19

**a. Persentase Perda yang dihasilkan sesuai dengan target yang direncanakan**

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten Bone Bolango dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas yang ada di Bone Bolango. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundangundangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan capaian kinerja sasaran 19 di atas, terlihat bahwa dari 31 usulan Ranperda baik yang diusulkan melalui prolegda maupun usul inisiatif DPRD, hanya 12 ranperda yang disahkan menjadi perda dengan kinerja pencapaian sebesar **69,7%** dengan kategori ***sedang***.

# **BAB III**

## **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN**

Rancangan kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 serta prospek perekonomian Tahun 2016-2017. Bab ini juga membahas mengenai tantangan perekonomian daerah serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

### **3.1. Kondisi Ekonomi Daerah**

#### ***a. Pertumbuhan Ekonomi***

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango Pada tahun 2016 naik mencapai 7,8 dibanding tahun 2015 sebesar 6,52%. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,72% dibanding tahun 2013 sebesar 7,63%, dan tahun 2012 sebesar 7,47%. Pelambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2015 dipengaruhi oleh terjadinya pelambatan pertumbuhan hampir pada semua sektor utamanya pada sektor primer dan sekunder yang kontribusinya pada pembentukan PDRB sangat besar. Sektor pertanian melambat pertumbuhannya dari 6,9% menjadi 5,8%. Sektor pertambangan penggalian bahkan mengalami pertumbuhan minus sebesar -0,21%. Beberapa sektor yang pertumbuhannya anjlok antara lain sektor listrik dan gas dari 8,87% menjadi 0,69%, sektor pengadaan air dan pengelolaan sampah dari 11,92% menjadi 6,92%, serta sektor konstruksi dari 15,9% menjadi 9,6%. Pergerakan pertumbuhan pada beberapa sektor tersier masih cukup baik walaupun masih cenderung kurang progresif dalam memperkuat struktur ekonomi daerah dalam jangka menengah. Dalam skala regional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango dalam jangka menengah perlu terus diperkuat untuk mencapai pertumbuhan diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo. yang pada tahun 2015 mencapai 6,4%.

**Tabel 3.1.**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013 s/d 2016**

<b>LAPANGAN USAHA</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015*</b>	<b>2016**</b>
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	756 785,65	809 130,89	856 326,32	915 712,76
Pertambangan dan Penggalian	46 247,54	46 572,99	46 473,39	45 562,82
Industri Pengolahan	130 970,39	139 243,24	146 606,35	158 527,96
Pengadaan Listrik dan Gas	899,89	980,13	986,92	1 081,25
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	547,89	613,11	655,56	752,31
Konstruksi	212 839,07	246 823,51	270 660,86	293 325,22
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	246 706,66	271 733,04	294 464,42	321 756,74
Transportasi dan Pergudangan	24 722,89	26 202,48	28 260,92	29 905,32
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	22 685,11	24 734,75	27 157,09	29 602,24
Informasi dan Komunikasi	42 739,33	45 808,36	49 291,78	54 133,5
Jasa Keuangan dan Asuransi	40 511,84	43 244,95	48 422,56	57 642,08
Real Estate	58 011,69	59 889,37	62 622,21	68 153,95
Jasa Perusahaan	2 678,37	2 938,06	3 155,79	3 346,75
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	282 942,74	296 751,72	308 820,75	309 661,27
Jasa Pendidikan	101 166,29	110 252,84	118 193,03	122 643,98
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107 655,6	114 259,12	124 284,43	134 008,61
Jasa Lainnya	48 433,96	51 443,79	53 514,02	55 422,7
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>2 126 544,91</b>	<b>2 290 622,34</b>	<b>2 439 896,4</b>	<b>2 601 239,47</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango

\*angka semetara

\*\*angka sangat sementara

**Tabel 3.2.**  
**Laju Pertumbuhan Riil PDRB atas Dasar Harga Konstan**  
**Menurut Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013 s/d 2016**

LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015*	2016**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,39	6,92	5,83	6,94
Pertambangan dan Penggalian	0,72	0,70	(0,21)	(1,96)
Industri Pengolahan	7,65	6,32	5,29	8,13
Pengadaan Listrik dan Gas	7,94	8,92	0,69	9,56
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,21	11,90	6,92	14,76
Konstruksi	11,58	15,97	9,66	8,37
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,53	10,14	8,37	9,27
Transportasi dan Pergudangan	7,00	5,98	7,86	5,82
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	5,31	9,04	9,79	9,00
Informasi dan Komunikasi	5,54	7,18	7,60	9,82
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,22	6,75	11,97	19,04
Real Estate	5,86	3,24	4,56	8,83
Jasa Perusahaan	15,56	9,70	7,41	6,05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,15	4,88	4,07	0,27
Jasa Pendidikan	13,25	8,98	7,20	3,77
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,95	6,13	8,77	7,82
Jasa Lainnya	8,32	6,21	4,02	3,57
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>7,63</b>	<b>7,72</b>	<b>6,52</b>	<b>6,61</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango

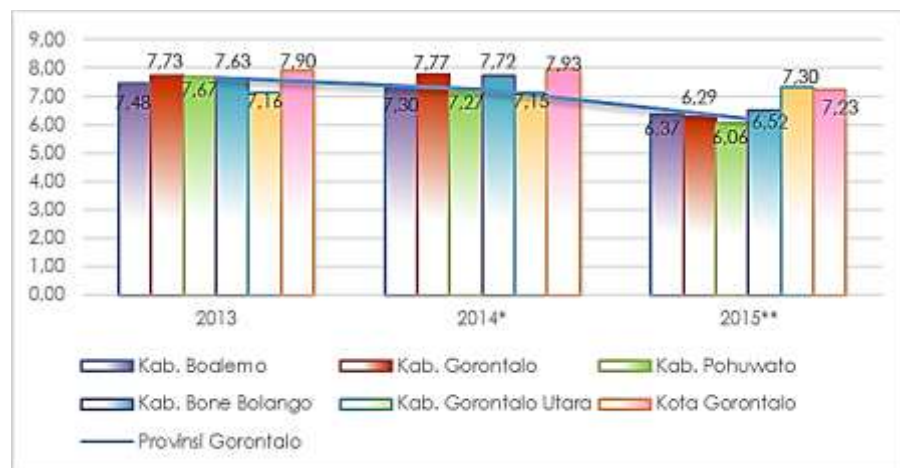
\*angka semetara

\*\*angka sangat sementara

**Tabel 3.3.**  
**Perbandingan PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2015**

LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN EKONOMI				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Boalemo	6,74	7,42	7,48	7,3	6,37
Kabupaten Gorontalo	7,72	7,74	7,73	7,77	6,29
Kabupaten Pohuwato	7,11	7,51	7,67	7,27	6,06
Kabupaten Bone Bolango	6,92	7,47	7,63	7,72	6,52
Kabupaten Gorontalo Utara	7,00	7,13	7,16	7,15	7,30
Kota Gorontalo	7,79	7,88	7,90	7,93	7,23

**Grafik 3.1**  
**Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo**  
**Kabupaten dan Kota Tahun 2013 - 2015**



Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo

**b. Struktur Ekonomi**

Struktur perekonomian Kabupaten Bone Bolango hingga tahun 2015 masih didominasi sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sektoral mencapai 36,7%. Sektor tersier juga semakin memberikan kontribusi cukup besar yang mencapai diatas 45%. Beberapa sektor tersier yang peranannya dominan disumbangkan oleh pertumbuhan sektor jasa konstruksi, perdagangan besar/eceran dan reparasi kendaraan, jaminan sosial, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial lainnya.

Dalam periode terakhir tahun 2015, walaupun terjadi pelambatan pada sektor pertanian, namun kontribusi sektor pertanian masih dominan dalam pembentukan output daerah, sementara sektor sekunder cenderung kurang progresif perannya dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Secara umum, pergeseran tersebut kurang memberikan nilai tambah signifikan terhadap percepatan pembangunan ekonomi daerah serta kurang memberi penguatan terhadap perbaikan struktur ekonomi daerah dalam jangka panjang. Sektor sekunder dan sektor tersier seharusnya secara bertahap semakin meningkat perannya dalam memperkuat pembangunan ekonomi Kabupaten Bone Bolango dalam jangka panjang.

**Tabel 3.4.**  
**Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bone Bolango**  
**Tahun 2012– 2016 atas Dasar Harga Berlaku (%)**

<b>LAPANGAN USAHA</b>	<b>2014</b>	<b>2015*</b>	<b>2016**</b>
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	987 303,28	1 120 200,75	1 268 935,32
Pertambangan dan Penggalian	55 814,34	59 587,63	59 938,19
Industri Pengolahan	172 215,1	195 239,91	222 325,66
Pengadaan Listrik dan Gas	756,47	648,35	814,35
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	757,38	871,3	1 054,58
Konstruksi	311 144,98	367 031,21	413 842,78
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	331 632,74	386 618,82	445 679,73
Transportasi dan Pergudangan	30 634,35	34 775,48	38 010,15
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	27 912,45	32 869,06	37 487,31
Informasi dan Komunikasi	50 539,3	56 645,64	64 783,62
Jasa Keuangan dan Asuransi	54 569,97	64 121,64	78 590,57
Real Estate	72 916,04	80 976,02	92 425,46
Jasa Perusahaan	3 536,39	4 118,2	4 562,64
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	344 990,63	366 933,88	377 122,59
Jasa Pendidikan	129 054,45	145 367,55	157 733,57
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	135 632,86	156 691,44	175 840,91
Jasa Lainnya	58 924,33	65 141,81	70 180,55
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>2 768 335,08</b>	<b>3 137 838,68</b>	<b>3 509 327,97</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango

\*angka semetara

\*\*angka sangat semetara



### c. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan suatu pendekatan dan indikator penting dalam pengukuran kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita Kabupaten Bone Bolango terus mengalami peningkatan dengan capaian Rp.14.820.000 di tahun 2012, pada tahun 2013 naik menjadi Rp. 16.276.000, pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp.18.321.000, serta pada tahun 2015 membaik menjadi Rp. 20.486.000

**Tabel 3.5.**  
**Agregat Produk Domestik Regional Bruto**  
**Dan PDRB Perkapita Kabupaten Bone Bolango**  
**Periode 2011-2015**

<b>LAPANGAN USAHA</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014*</b>	<b>2015**</b>
<b>Nilai PDRB (Miliar Rp)</b>					
a. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	1.939,08	2.175,27	2.424,75	2.768,30	3.137,78
b. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010	1.838,62	1.975,88	2.126,54	2.290,61	2.439,87
<b>PDRB per Kapita (Ribu Rp)</b>					
a. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	13.401,17	14.820,66	16.276,65	18.321,70	20.486,13
b. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010	12.706,89	13.462,15	14.274,89	15.160,16	15.929,59
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	5,32	5,94	6,04	6,2	5,08
Jumlah Penduduk (Jiwa)	144.695	146.773	148.971	151.094	153.166
Pertumbuhan Jumlah Penduduk	1,52	1,44	1,5	1,43	1,37

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango

### d. Tenaga Kerja

Berdasarkan Data BPS Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015, sebesar 25,16% penduduk Bone Bolango bekerja disektor pertanian, diikuti sektor jasa sebesar 21,81%, Sektor Perdagangan sebesar 19,47% dan sisanya pada sektor Industri Pengolahan sebesar 5,19%. Hal ini mengindikasikan bahwasektor pertanian cenderung berperan strategis dalam pengurangan angka pengangguran. Penyerapan tenaga kerja yang cukup besar pada sektor pertanian tersebut sangatlah beralasan mengingat ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Bone Bolango sangatlah besar baik untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan pengembangan usaha perikanan kelautan.

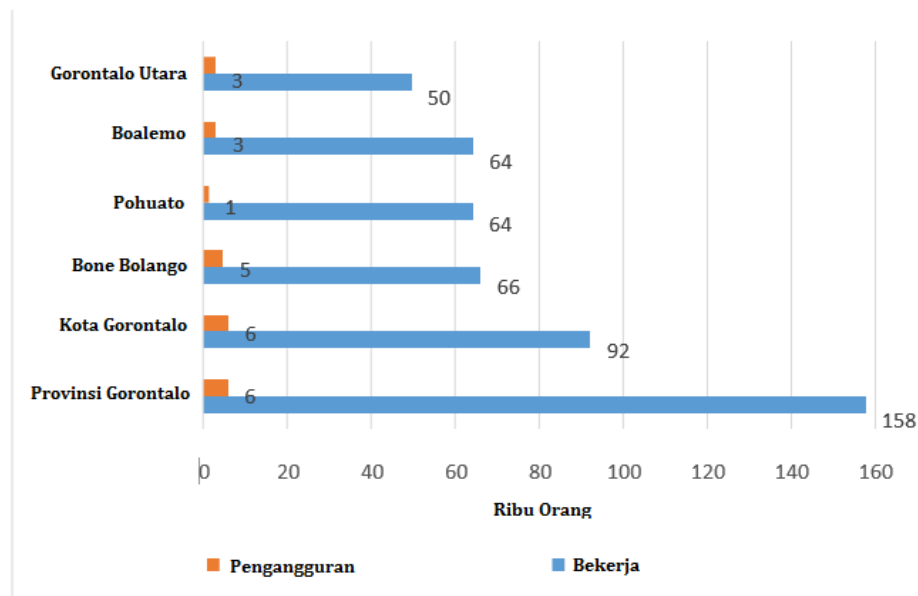
**Tabel 3.6**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja**  
**Menurut Lapangan Usaha**  
**Periode 2010-2015**

JENIS PEKERJAAN	JUMLAH PEKERJA PER TAHUN (%)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan	36,16	28,43	27,25	28,74	25,16	25,16
2. Industri Pengolahan	6,18	7,09	3,52	3,97	5,19	5,19
3. Perdagangan Besar, eceran, rumah makan dan Hotel	11,71	13,30	16,54	16,59	19,47	19,47
4. Jasa kemasyarakatan	22,44	24,81	25,47	25,93	21,81	21,81
5. Lainnya (pertambangan, listrik, gas, air, bangunan, transportasi dan keuangan)	23,50	26,37	27,22	24,77	28,37	28,37
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016

Angka pengangguran Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 5% dibandingkan tahun 2014 sebesar 4,84%.

**Grafik 3.2**  
**Perkembangan Angka Pengangguran Provinsi Gorontalo Kab. Bone Bolango**  
**Tahun 2015**



Sumber : Provinsi Dalam Angka Provinsi Gorontalo Tahun 2016

## **3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah**

### **3.2.1. Tantangan Perekonomian Daerah**

Tahun 2018 merupakan tahun kedua pembangunan jangka menengah ketiga Kabupaten Bone Bolango periode 2016-2021. Beberapa tantangan ekonomi yang akan dihadapi oleh Kabupaten Bone Bolango kedepan adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi daerah yang masih cenderung melambat walaupun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi sekunder dan tersier masih belum menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor industri dan jasa-jasa yang diharapkan menjadi sektor pemberi value added terbesar masih tertinggal dan mengalami penurunan pertumbuhannya. Perkembangan sektor pertanian, perikanan, peternakan, yang mempunyai basis sumber daya terbesar di Kabupaten Bone Bolango belum dibarengi dengan perkembangan sektor sekunder yang mampu memberikan akselerasi lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Dinamika perekonomian nasional yang terkait dengan perkembangan fiskal nasional, moneter, perdagangan serta harga termasuk kebijakan pengendalian harga BBM dan kebutuhan dasar lainnya berdampak signifikan pada perekonomian masyarakat. Langkah langkah untuk mengendalikan inflasi daerah harus tetap menjadi perhatian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
3. Kapasitas fiskal daerah yang masih terbatas, dimana kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih dibawah 10% dalam lima tahun terakhir, sehingga pembiayaan pembangunan daerah lebih didominasi dan mengalami ketergantungan besar pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pendapatan pajak dan retribusi daerah masih dibawah 2% dari total pendapatan daerah.
4. Tahun 2018 merupakan tahun ketiga untuk menjabarkan peran tanggung jawab daerah dalam pencapaian cita-cita nasional (NAWA CITA) yang telah menjadi agenda besar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019. Beberapa target kinerja nasional yang sangat progresif menjadi tantangan utama yang harus terjabarkan dan bersinergi dengan pembangunan daerah.

5. Penggunaan dan penguasaan teknologi pengelolaan produk yang masih sangat rendah, sehingga berdampak pada pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal. Kemampuan daerah untuk menemukenali dan mengembangkan produk unggulan daerah harus terus ditingkatkan dengan mengintegrasikan pengembangan potensi daerah secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir serta melibatkan perguruan tinggi didalamnya.
6. Ketersediaan infrastruktur dasar wilayah masih kurang baik dari aspek kualitas maupun kuantitas yang perlu terus ditingkatkan seiring dengan tuntutan dan dinamika perkembangan wilayah. Infrastruktur tersebut utamanya berkaitan dengan sarana prasarana dasar daerah antara lain infrastruktur transportasi, sarana air bersih, sanitasi, sarana prasarana perhubungan, olahraga, perdagangan dan pariwisata yang merupakan sektor penyumbang pendapatan daerah.
7. Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dengan kompleksitas permasalahan yang terjadi mengharuskan Pemerintah Daerah semakin lebih kreatif dan adaptif dalam memobilisasi sumber daya pembangunan yang dimiliki. Kinerja program kegiatan harus lebih responsif dalam menjawab dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

### **3.2.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018**

Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat diharapkan dapat meningkat dengan pertumbuhan diatas rata-rata laju pertumbuhan inflasi daerah. Walaupun kinerja pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 6,51%, pada tahun 2018 diprediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami pertumbuhan positif kembali diatas 7% dengan asumsi instrumen belanja pembangunan pada sektor publik khususnya sektor yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat serta alokasi belanja pembangunan untuk infrastruktur daerah semakin meningkat dan memberikan stimulus bagi mobilitas ekonomi masyarakat luas.

Demikian pula, walaupun jumlah penduduk miskin kita naik menjadi 18,49% pada tahun 2015, namun jumlah penduduk miskin diharapkan secara bertahap dan berkesinambungan akan tetap dapat diturunkan melalui berbagai strategi dan kebijakan yang terpadu dan komprehensif, baik upaya perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif serta pengembangan fasilitas dasar masyarakat. Pengurangan penduduk miskin ditargetkan dapat ditekan dibawah 15% pada akhir tahun 2018. Pencapaian target tersebut dilakukan melalui berbagai kebijakan program yang lebih *pro poor, pro growth, pro job, dan pro environment* yang diyakini akan semakin dapat memberikan dampak positif bagi penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango.

**Tabel 3.7.**  
**Perbandingan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Gorontalo Tahun 2014 - 2015**

Kabupaten/ Kota	Tahun 2014					Tahun 2015					Perubahan P0	Kenaikan Garis Kemiskinan (%)
	Jumlah Penduduk Miskin	P0	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/ Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	P0	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/ Bulan)		
Boalemo	30,5	20,79	4,24	1,31	292.557	32,19	21,67	4,77	1,45	309.227	0,88	5,7
Gorontalo	77,66	21,05	3,45	0,9	323.578	80,52	21,8	4,55	1,4	343.373	0,75	6,12
Pohuwato	29,85	20,69	3,37	0,77	214.146	32,7	22,43	4,49	1,41	222.996	1,74	4,13
Bone Bolango	25,31	16,68	2,31	0,52	288.741	28,19	18,49	3,66	1,1	304.627	1,81	5,5
Gorontalo Utara	20,15	18,34	3,12	0,8	213.613	21,06	18,93	4,04	1,25	222.054	0,59	3,95
Kota Gorontalo	11,64	5,85	0,76	0,19	376.010	12,18	6,05	0,72	0,15	404.620	0,2	7,61

Penurunan angka pengangguran merupakan salah satu target strategis dalam tahun 2018 yang diproyeksikan dapat ditekan dibawah 4% pertahun. Seiring penurunan tingkat kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berkomitmen untuk memberikan stimulus fiskal yang besar bagi alokasi belanja langsung untuk pelayanan publik serta penciptaan iklim kondusif bagi kemudahan berinvestasi. pemberian bantuan usaha mikro yang ditargetkan akan dapat memberikan efek positif pada pengurangan angka pengangguran di Kabupaten Bone Bolango yang saat ini sekitar 6,76% pada tahun 2016.

**Tabel 3.8**  
**Perkembangan dan Prospek Makro Ekonomi Tahun 2017 dan 2018**  
**Kabupaten Bone Bolango**

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	PDRB Harga Berlaku (jutaan rupiah) PDRB Harga Konstan (jutaan rupiah)	2.424,75 2.126,54	2.768,30 2.290,61	3.137,78 2.439,87	3.570,00 2.527,00	3.810,15 2.740,10	3.810,15 2.740,10
2.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan Tahun tertentu	7,63 %	7,72 %	6,51%	7,0%-7,5%	7,5-7,8%	7,5-7,8%
3.	Tingkat Inflasi	6%	7%	5 - 7%	5%	5% - 7%	5% - 7%
4.	Stuktur PDRB Pendekatan Pengeluaran (Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Investasi dan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri)	Dominasi sektor pertanian 35,33%	Dominasi sektor pertanian 35,66%	Dominasi sektor pertanian 35,70%	Dominasi sektor pertanian <35%	Dominasi sektor pertanian <35%	Dominasi sektor pertanian <35%
5.	Angka Kemiskinan	17,19%	<16%	18,49%	<15,5%	16%	16%
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,88%	4,84%	5%	<4%	<4%	<4%
7.	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan : • PDRB Perkapita (Harga Berlaku) • Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Indeks) • Besaran IPM	16.276.650 0,43 65,82	18.321.700 0,41 66,03	20.486.130 0,41 66,83	>21.100.000 <0,41 >67	>22.300.00 <0,40 >67,5	>22.300.00 <0,40 >67,5
8.	Berbagai macam besaran rasio/perbandingan • Pajak/Retribusi Daerah Terhadap PDRB • Biaya (belanja langsung) Pendidikan/Kesehatan terhadap PDRB • Perbandingan Penerimaan PAD dan Dana Perimbangan thdp PDRB • Struktur Pembiayaan : - Belanja langsung Vs Belanja tak langsung - Belanja Publik dan Aparatur	0,8% 4% 47% 48 : 52 48 : 52	1% 4% 47% 48 : 52 51 : 49	1,2% 5% 49% 48 : 52 51 : 49	>1% >6% 46%-50% 40 : 60 49 : 51	>1,4% >6% 40%-50% 55%-45% 52%-48%	>1,4% >6% 40%-50% 55%-45% 52%-48%

### 3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Tema diatas bertujuan untuk Peningkatan Kualitas Money Follow Program dengan pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial serta dengan memprioritaskan belanja pemerintah untuk pencapaian sasaran prioritas nasional.

Sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai pada akhir tahun 2018 sebagai tahun pertama RPJMN 2015-2019 antara lain :

1. Menurunkan tingkat kemiskinan pada kisaran 9%-10%.
2. Penurunan angka penangguran 5,3%-5,5%.
3. Gini rasio 0,38.
4. Inflasi 4,0%
5. Pertumbuhan ekonomi 5,6%
6. Terbangunnya 5 KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Bolango tahun 2017 tetap menjaga sinergitas dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional serta pencapaian sasaran rencana pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2017 untuk memantapkan perekonomian nasional dalam upaya peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah, perluasan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di daerah, perbaikan infrastruktur dasar wilayah, peningkatan pelayanan publik serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Sinergis dengan kebijakan ekonomi nasional dan regional kedepan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017 diharapkan dapat:

- (1) Meningkatkan daya saing ekonomi dengan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi diatas 7,5% serta penguatan struktur ekonomi daerah kearah pembangunan sektor sekunder melalui pengembangan kinerja sektor-sektor riil yang didukung oleh infrastruktur memadai serta pengembangan komoditas unggulan yang dapat menjadi pendorong berkembangnya ekonomi rakyat dan usaha ekonomi pedesaan. Peningkatan kemampuan

perekonomian daerah diarahkan untuk penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, penyediaan kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan percepatan penanggulangan kemiskinan.

- (2) Meningkatkan daya saing ekonomi regional dengan mendorong perbaikan infrastruktur dasar wilayah yang merata dan berkeadilan khususnya wilayah kecamatan tertinggal, pengembangan pusat-pusat layanan kabupaten dan kecamatan, pengembangan kawasan-kawasan strategis seperti kawasan pendidikan, kawasan minapolitan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan produksi pertanian dan kawasan lainnya yang dapat mendukung akselerasi percepatan pembangunan daerah dalam jangka menengah.
- (3) Meningkatkan investasi daerah dalam mengakselerasi pemanfaatan sumber daya lokal untuk perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui fasilitas kemudahan berinvestasi baik pelayanan perizinan maupun non perizinan, pemberian insentif bagi investor, penyediaan data dan informasi serta menjamin kepastian hukum berusaha dan peningkatan produktivitas guna memperkuat perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberi dampak besar pada pertumbuhan ekonomi.
- (4) Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas utama daerah untuk mendukung kedaulatan pangan nasional serta pengembangan komoditas unggulan daerah yang dapat menjadi sektor base dan prime mover pembangunan daerah. Sektor basis tersebut diprioritaskan pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan serta industri pengolahan yang terintegrasi dengan sektor primer dengan memperhatikan daya dukung wilayah serta keseimbangan ekosistem lingkungan..
- (5) Meningkatkan upaya-upaya perluasan dan percepatan penanggulangan kemiskinan yang ditargetkan pada tahun 2018 dapat ditekan dibawah 14,5%. Perluasan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran menjadi prioritas pada akhir tahun 2018. Harus dilakukan berbagai fasilitasi program dan kegiatan terhadap pemberdayaan masyarakat miskin dalam penyediaan



perumahan atau pemukiman yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), penguatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan usaha ekonomi produktif, fasilitasi sambungan air bersih, bantuan jamban sehat, dan pemasangan listrik gratis bagi masyarakat miskin, memperkuat pelaksanaan Program bantuan beras (RASKIN), PKH, jaminan kesehatan masyarakat, bantuan siswa miskin (BSM), serta pemberian beasiswa berprestasi bagi siswa miskin tapi berprestasi pada jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi.

### **3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2017 sangat dipengaruhi oleh kapasitas anggaran yang tersedia baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan baik DAU, DAK maupun dana bagi hasil serta pendapatan lainnya yang memperkuat APBD Kabupaten Bone Bolango. Untuk itu kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD yang akan bersinergi dengan sumber-sumber pendanaan non APBD seperti APBN, APBD Provinsi Gorontalo, hibah, dana kemitraan swasta atau kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* serta partisipasi masyarakat luas dalam peran aktif mendukung pembangunan daerah`

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, Dana Penyesuaian, Dana Alternatif Khusus dan Dana Bantuan Keuangan. Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan

Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD) dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah.

### 3.4.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Struktur keuangan dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam beberapa periode terakhir menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan walaupun peningkatan pendanaan tersebut masih didominasi oleh transfer pusat ke daerah. Karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus ditingkatkan dengan mendayagunakan dan mengelola potensi sumber daya daerah agar menjadi stimulus utama bagi terciptanya sumber pendapatan daerah yang mendukung pembangunan daerah.

**Tabel 3.9**  
**Ringkasan Struktur APBD Kabupaten Bone Bolango**  
**Realisasi 2016-2017 dan Proyeksi Tahun 2018**

No	URAIAN	Anggaran Tahun 2016	Anggaran Tahun 2017	Estimasi Anggaran Tahun 2018
<b>PENDAPATAN</b>		<b>882.226.435.586,00</b>	<b>869.003.630.134,00</b>	<b>999.354.174.653,00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	62.730.860.873,00	73.857.734.925,00	84.936.395.163,00
1.2	Dana Perimbangan	679.378.911.420,00	636.367.073.000,00	731.822.133.950,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	133.586.810.393,00	158.778.822.209,00	182.595.645.540,00
<b>BELANJA</b>		<b>894.490.826.474,00</b>	<b>902.554.384.974,00</b>	<b>996.585.325.258,88</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	502.322.816.321,00	508.887.060.919,00	543.867.902.596,68
2.2	Belanja Langsung	342.380.906.213,00	393.667.324.055,00	452.717.422.662,20
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>20.264.390.888,00</b>	<b>50.550.745.840,0</b>	<b>58.133.368.066,00</b>
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	16.264.390.888,00	42.050.745.840,00	48.358.368.066,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.000.000.000,00	8.500.000.000,00	9.775.000.000,00
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>.00</b>

Kebijakan keuangan daerah sebagai salah satu elemen strategis kebijakan makro ekonomi diarahkan untuk lebih dapat memberikan stimulus fiskal bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan pelayanan dasar serta upaya perluasan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan anggaran sedapat mungkin dikelola secara efektif dan efisien dengan mengedepankan keseimbangan pendapatan dan belanja daerah. Surplus anggaran yang dapat dimanfaatkan bagi pembentukan dana cadangan untuk membiayai program-program strategis yang sifatnya multiyears secara bertahap akan dikembangkan.

### **3.4.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

#### **3.4.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang dikelompokkan atas :

- a. PAD yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi kepada Kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otsus serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.
- d. Selain sumber pendapatan yang disebutkan diatas, pendapatan lain yang dikelola oleh daerah adalah pendapatan yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dikelola mulai pada tahun 2014 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Perkembangan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah selang tahun 2014 -2017yakni sebagai berikut :

**Tabel 3.10.**  
**Realisasi 2016-2017dan Proyeksi 2018 Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Bone Bolango**

No	Jenis Pendapatan Daerah	Pagu Anggaran Tahun 2016	Pagu Anggaran Tahun 2017	Pagu Anggaran Tahun 2018
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>59,547,484,925.00</b>	<b>73.857.734.925,00</b>	<b>84.936.395.163,00</b>
1.1.1	Pajak Daerah	7,150,000,000.00	9.600.000.000,00	11.040.000.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	3,039,750,000.00	5.900.000.000,00	6.785.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	450,000,000.00	500.000.000,00	575.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	48,907,734,925.00	57.857.734.925,00	66.536.395.163,00
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>636,123,428,012.00</b>	<b>636.367.073.000,00</b>	<b>731.822.133.950,00</b>
1.2.2	Dana Alokasi Umum	495,597,190,000.00	510.601.796.000,00	587.192.065.400,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	119,594,360,000.00	125.765.277.000,00	144.630.068.550,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>186,555,522,649.00</b>	<b>158.778.822.209,00</b>	<b>182.595.645.540,00</b>
1.3.1	Hibah	3,000,000,000.00	7.758.400.000,00	8.922.160.000,00
1.3.2	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	16,860,984,709.00	16.860.984.709,00	19.390.132.415,00
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	54,428,986,000.00	7.500.000.000,00	8.625.000.000,00
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	54,428,986,000.00	522.000.000,00	600.300.000,00
1.3.6	Pendapatan lainnya	108,743,551,940.00	126.137.437.500,00	145.058.053.125,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 + 1.2 +1.3)</b>		<b>882,226,435,586.00</b>	<b>869.003.630.134,00</b>	<b>999.354.174.653,00</b>

Sumber Data : DPPKADKab. Bone Bolango dan Analisis RPJMD 2016-2021

Data diatas menunjukkan bahwa realisasi dan target pendapatan daerah Kabupaten Bone Bolango diprediksi terus meningkat. Peningkatan pendapatan daerah tersebut masih didominasi oleh peningkatan dana transfer daerah melalui dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan dana bagi hasil. Pada tahun 2017 diprediksi Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah akan meningkat signifikan utamanya disebabkan oleh kemungkinan adanya alokasi Dana Insentif Daerah (DID) karena pencapaian kinerja opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta kenaikan Dana Desa secara bertahap sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pada tahun 2018, Pendapatan Daerah diproyeksikan berada dalam kisaran ±Rp 999 milyar atau naik 15% dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar Rp.869 milyar. Proyeksi pendapatan daerah tahun 2018 tersebut setelah mempertimbangkan kemungkinan proyeksi beberapa sumber pendapatan seperti pendapatan asli daerah dan pendapatan lain-lain. Proyeksi PAD tahun 2018 sebesar Rp 84 milyar.

Dengan kondisi kapasitas fiskal daerah yang masih rendah tersebut, diperkirakan peranan dana perimbangan utamanya Dana Alokasi Umum masih merupakan sumber pendapatan yang akan menjadi penopang utama pembangunan daerah. Pada tahun 2018 ditargetkan proporsi dana perimbangan akan naik signifikan sesuai dengan arah kebijakan fiskal nasional yang lebih memperkuat peran dana-dana desentralisasi dalam pembiayaan pembangunan daerah. Ditargetkan kenaikan dana perimbangan kurang lebih mencapai 15%. Peran dan kontribusi pendapatan asli daerah dalam pembiayaan pembangunan terus diperkuat sebagai upaya untuk mengurangi secara bertahap ketergantungan fiskal dalam jangka panjang.

Selain dana perimbangan, peranan lain-lain pendapatan daerah yang sah khususnya pendapatan yang berasal dari pendapatan hibah dan dana darurat serta bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi masih diharapkan akan memberikan kontribusi penting dalam penerimaan daerah, walaupun diprediksi bahwa sumber pendapatan ini besarnya akan cenderung fluktuatif tergantung dengan kondisi dan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Untuk mendukung pembelanjaan daerah dalam rangka pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategis pembangunan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Bone Bolango diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah disamping upaya-upaya ekstensifikasi untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru. Upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut difokuskan pada peningkatan pendapatan asli daerah, mengingat controllability-nya yang tinggi dibanding sumber-sumber pendapatan yang lain. Disamping itu, pendapatan asli daerah merupakan indikator penting bagi penguatan kapasitas fiskal dan derajat kemandirian fiskal daerah.

Beberapa kebijakan strategis yang akan terus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah yakni sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pengelolaan PBB-P2 oleh daerah pada tahun 2018 merupakan amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sehingga manajemen pengelolaannya harus dilakukan secara seksama dengan melakukan revitalisasi penetapan tarif obyek pajak secara proporsional.
- b. Memperkuat kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi pengendali dan pengelola pendapatan daerah dapat memperkuat kelembagaan baik secara struktural maupun fungsional untuk berperan dan bertanggung jawab dalam pengumpulan pajak/retribusi termasuk pengelolaan PBB-P2. Selain itu, pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah harus menjadi bagian integral dalam penguatan kapasitas kelembagaan pengelola pendapatan daerah.
- c. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi dan diversifikasi sumber pendapatan asli daerah, melalui upaya:
  - Merevitalisasi, pendataan subjek dan objek pajak/retribusi daerah termasuk PBB-P2 lebih akurat untuk menjamin bahwa seluruh subjek dan objek yang ada telah resmi ditetapkan sebagai wajib pajak.
  - Melakukan penyesuaian terhadap peraturan daerah atau peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah termasuk yang berkaitan dengan penyesuaian nilai jual objek pajak. Selain itu, menginventarisir potensi sumber-sumber pendapatan baru dan menindaklanjuti dengan penerbitan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah baru sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan mempertimbangkan dampaknya pada terjadinya distorsi pasar.
  - Monitoring dan pengendalian pengumpulan pajak dan retribusi daerah secara kontinu dan berkesinambungan dengan terus membandingkan antara target dan realisasi maupun antara potensi dan target.

- Meningkatkan tertib administrasi dan pengawasan pemungutan sumber- sumber PAD serta menerapkan *reward* dan *punishment* dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.
  - Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha untuk berinvestasi sehingga berdampak pada perluasan potensi objek pajak dan retribusi daerah.
  - Meningkatkan kinerja PDAM, BLU RS. Toto, dan BUMD sebagai kontributor PAD melalui pengelolaan yang profesional, produktif, inovatif dan kompetitif.
  - Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat serta meningkatkan sosialisasi sebagai upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan wajib pajak/retribusi.
  - Meningkatkan mobilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai potensi riil basis pajak/retribusi daerah.
  - Mengembangkan upaya-upaya kreatif dan inovatif dalam manajemen kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku sehingga berdampak positif dalam pencapaian kinerja lain-lain PAD yang sah dalam bentuk pendapatan bunga dan jasa lainnya.
  - Mengintensifkan upaya penanganan tuntutan ganti rugi terhadap pihak terkait sebagai upaya menyelamatkan keuangan daerah.
- d. Mendayagunakan pengelolaan aset-aset daerah.
- Peningkatan PAD juga dapat dicapai melalui pendayagunaan aset yang dimiliki pemerintah daerah. Optimalisasi aset daerah tersebut dapat dilakukan dalam bentuk perbaikan manajemen aset daerah antara lain sarana pariwisata, sarana perdagangan (pasar-pasar tradisional), dan sarana pengolahan air bersih yang potensinya cukup menjanjikan untuk memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Pendayagunaan manajemen aset juga dapat dilaksanakan melalui pola kemitraan dengan masyarakat/dunia usaha atau pengembangan kerja sama antar wilayah.
- e. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral
- Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung setiap strategi dalam upaya peningkatan pendapatan pajak/retribusi daerah dengan basis pembangunan ekonomi. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk

memecahkan permasalahan atas rendahnya elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan pajak/retribusi daerah. Indikator keberhasilan program ini adalah berupa peningkatan kegiatan pembangunan yang mendukung potensi pajak daerah.

- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM bidang keuangan  
Kebijakan ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan atas keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang berhubungan dengan ekstensifikasi dan pelayanan penerimaan pendapatan daerah. Indikator keberhasilan program ini adalah peningkatan kualitas SDM aparat pengelola pajak/retribusi daerah melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang relevan.
- g. Meningkatkan koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada Pemerintah Pusat dengan memberikan dukungan data yang cepat dan valid dalam rangka penetapan alokasi dana perimbangan sehingga alokasi dana perimbangan tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan daerah.
- h. Membantu peningkatan pemungutan pajak pusat seperti PPh dan lain-lain pajak pusat, guna meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil.
- i. Peningkatan pengawasan manajemen pendapatan daerah. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas pengelolaan pendapatan daerah yang dimulai sejak tahap perencanaan termasuk penetapan target pendapatan, potensi objek pajak/retribusi serta tahap pelaksanaan pemungutan pajak/retribusi.

#### **3.4.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah,



bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Realisasi dan proyeksi belanja daerah tahun 2016 s/d 2018 yakni sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif)**  
**Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango**  
**Tahun 2016 s/d Tahun 2018**

No	Jenis Belanja Tidak Langsung	Realisasi Tahun 2016	Pagu Anggaran Tahun 2017	Proyeksi /Target Tahun 2018
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>554,134,124,632.00</b>	<b>508.887.060.919,00</b>	<b>543.867.902.596,68</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	387,547,283,030.00	321.222.031.717,00	353.057.673.394,68
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	5,050,000,000,00	10.247.400.000,00	3.492.600.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8,137,208,000.00	1.000.000.000,00	10.050.000.000,00
2.1.6*)	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-
2.1.7*)	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	152,649,633,602.00	175.917.629.202,00	176.767.629.202,00
2.1.8	Belanja tidak terduga	750,000,000.00	500.000.000,00	500.000.000,00
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>340,356,701,842.00</b>	<b>393.667.324.055,00</b>	<b>452.717.422.662,20</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	50,892,278,850.00	54.848.824.968,00	63.076.148.713,20
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	130,701,961,936.00	159.479.579.214,00	183.401.516.096,00
2.2.3	Belanja Modal	158,762,461,056.00	179.338.919.873,00	206.239.757.853,00
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH 28(2.1 + 2.2)</b>		<b>894,490,826,474.00</b>	<b>902.554.384.974,00</b>	<b>996.585.325.258,88</b>

Sumber Data : DPPKAD Kab.Bone Bolango

Alokasi belanja tidak langsung bukan hanya belanja gaji pegawai tetapi juga belanja yang diperuntukan untuk masyarakat dan kepentingan publik seperti belanja hibah, bantuan sosial dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Belanja publik tahun 2017 ditargetkan semakin lebih baik dari tahun 2017 yang diprediksi sejumlah >55%.

Belanja daerah tahun 2017 akan lebih fokus pada alokasi belanja untuk penguatan pembangunan infrastruktur dasar wilayahserta pembangunan pedidikan dan kesehatan. Anggaran pendidikan diarahkan dengan alokasi minimum 20% dan untuk mendukung fungsi kesehatan minimum 10% dari total belanja daerah serta peningkatan infrastruktur jalan sebesar 10% dari penerimaan pajak daerah. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango akantetap melanjutkan pengalokasian anggaran untuk perluasan dan percepatan penanggulangan kemiskinan, program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan serta perekonomian daerah.

Untuk menjamin efisiensi dan efektifitas pembelanjaan daerah dengan pendekatan kinerja (*performance-based budgeting*) maka belanja program dan kegiatan strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengacu pada indikator kinerja, sasaran program SKPD dan berpedoman pada Renstra dan Renja SKPD sehingga pembiayaan operasional SKPD seperti belanja pegawai (honorarium), belanja telepon, air, listrik dan internet, belanja ATK, belanja sarana dan prasarana perkantoran serta perjalanan luar dan dalam daerah harus sesuai dengan kebutuhan riil, prinsip efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaranprogram dan kegiatan strategis SKPD.

Arah kebijakan belanja daerah tahun 2018 diarahkan pada beberapa prioritas berikut:

1. Kebijakan belanja daerah untuk Periode 2018 masih akan dititikberatkan pada lima Program strategis, yakni pembangunan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur wilayah.
  - 1) Pengurangan rakyat miskin dan pembangunan desa tertinggal
  - 2) Pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan.
  - 3) Percepatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan daerah
  - 4) Peningkatan akses dan mutu pendidikan
  - 5) Peningkatan mutu dan akses layanan kesehatan
2. Alokasi belanja untuk mendukung program prioritas sekurang-kurangnya 70% dari total APBD dikurangi belanja pegawai.
3. Meningkatkan alokasi belanja pada upaya perluasan dan penanggulangan kemiskinan dengan mengurangi rakyat miskin di Kabupaten Bone Bolango melalui kegiatan fasilitasi ekonomi produktif bagi masyarakat miskin seperti

bantuan peternakan (sapi, ayam, dll), penanganan lahan kritis (lahan tidur), fasilitasi sarana dan prasarana budidaya perikanan laut dan air tawar, bantuan fasilitas peralatan produksi dan modal usaha berupa barang bagi usaha mikro kecil menengah dan koperasi, serta penyediaan pemukiman rakyat yang layak huni/hunian pantas yang ditopang oleh penyediaan listrik dan instalasi air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

4. Peningkatan kapasitas pembangunan desa dalam upaya penguatan dan mendukung terwujudnya desa tumbuh daerah maju melalui instrumen Dana Alokasi Desa (ADD) dan Dana Desa serta sumber keuangan lainnya. Pemanfaatan dana desa di prioritaskan untuk mendukung penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar skala desa serta menunjang mobilitas ekonomi masyarakat desa. Tunjangan Penyelenggara Pemerintahan Umum Desa (TPPUD) untuk tahun 2018 akan ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2018 penunjang operasional pemerintah desa akan ditingkatkan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku serta penyediaan sarana prasarana pemerintah desa utamanya kantor desa dan kendaraan operasional akan menjadi prioritas penting.
5. Mengembangkan program afirmatif untuk mendukung percepatan pengurangan rakyat miskin serta pengentasan desa tertinggal melalui instrumen fiskal dengan target sasaran kelompok masyarakat tertentu serta desa-desa sangat tertinggal.
6. Mensinergikan dan mengintegrasikan rencana belanja program kegiatan SKPD dengan rencana program yang dilaksanakan melalui instrumen APBD desa. Pelaksanaan rencana anggaran melalui APBD desa diarahkan pula untuk mendukung pencapaian serta prioritas pembangunan daerah tahun 2018.
7. Mengalokasikan belanja modal minimal 30% dari total belanja langsung untuk kepentingan rakyat dalam upaya peningkatan dan percepatan pembangunan infrastruktur dan belanja pengadaan barang dan jasa yang dapat memberi dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar. Belanja modal untuk pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur

keseluruh wilayah, meningkatkan aksesibilitas wilayah (antar pusat-pusat pemukiman, antar pusat-pusat produksi dan pemasaran), membuka keterisolasian wilayah-wilayah terpencil khususnya Kecamatan Pinogu dan Kecamatan Bulango Ulu, serta penataan kawasan pemerintahan dan kawasan strategis lainnya dengan melakukan perbaikan kualitas infrastruktur pada pusat pemerintahan, peningkatan akses masyarakat terhadap air minum, listrik, sanitasi lingkungan serta infrastruktur pemukiman bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pembangunan infrastruktur irigasi akan terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah.

8. Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan dan pembangunan infrastruktur dasar masyarakat. Belanja untuk penataan infrastruktur wilayah dialokasikan untuk (1) pembangunan atau peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan kabupaten yang dipandang penting dan mendesak termasuk memberikan prioritas khusus untuk pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan pinogu dan bulango ulu serta penyiapan lahan untuk pembukaan jalan lintas Suwawa-Kabila Bone. Disamping itu beberapa jalan desa atau jalan lintas desa yang memberikan dampak luas akan diprioritaskan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (2) Prioritas penataan lingkungan pemukiman meliputi normalisasi sungai, pembangunan drainase, pembangunan sarana air bersih, pembangunan RTH, pembangunan sarana pengelolaan limbah dan persampahan, (3) pengembangan sarana prasarana pemerintahan. Pada tahun 2016 akan dialokasikan anggaran menunjang pembangunan infrastruktur baik berupa penyediaan master plan infrastruktur, perencanaan teknis infrastruktur, dokumen lingkungan serta penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur.
9. Mengalokasikan anggaran pendidikan dengan arah utama untuk mendukung program Bone Bolango Cerdas dengan alokasi minimal 20% dari total belanja daerah tahun 2017 termasuk belanja gaji guru. Belanja ini dialokasikan untuk peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dalam rangka mendukung perbaikan angka partisipasi sekolah, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, angka dan mutu kelulusan siswa,

peningkatanketersediaan dan mutu tenaga pendidikserta ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan. Selain itu, anggaran tersebut dialokasikan untuk pemberian beasiswa siswa dan mahasiswa berprestasi dan kurang mampu, beasiswa bagi guru berprestasi dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan khususnya yang bertugas pada wilayah wilayah terpencil.

10. Mengalokasikan anggaran sektor kesehatan untuk pelayanan yang bermutu dan terjangkau dengan alokasi minimal 10% sesuai amanah UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Alokasi anggaran tersebut diarahkan untuk peningkatan layanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan pemberian jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bone Bolango. Arah belanja sektor kesehatan tersebut diarahkan pula untuk penyediaan fasilitas mobil layanan kesehatan, obat-obatan, alat-alat kesehatan, pembangunan/rehabilitasi Rumah Sakit Toto dan Tombulilato, pembangunan atau rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes, penyediaan operasional Puskesmas, peningkatan kapasitas tenaga medis dan insentif paramedis, perbaikan gizi, pengentasan penyakit menular dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta dukungan pelaksanaan imunisasi daerah untuk mencapai Universal Child Immunization (UCI) dan cakupan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).
11. Meningkatkan alokasi anggaran sektor-sektor ekonomi yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan program-program unggulan daerah serta mengembangkan interkoneksi antar sektor Belanja. pada sektor ini menjadi bagian dari program populer pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango dalam upaya akselerasi pembangunan ekonomi daerah seperti pengembangan wisata lombongo dan danau perintiserta pengembangan kopi pinogu dan pertanian organik sebagai *branding* produk unggulan daerah serta pengembangan gula Aren.
12. Belanja peningkatan kapasitas birokrasi dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui kegiatan penguatan peran kepala daerah dan wakil kepala daerah, penataan manajemen dan administrasi pemerintahan, pembinaan aparatur dan pengembangan karir

ASN, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan baik diklat struktural, fungsional dan diklat teknis, analisis jabatan, pengadaan pegawai, peningkatan kapasitas dalam memberikan pelayanan cepat, mudah, ramah, bernilai dan beradab serta penguatan pemerintahan kecamatan khususnya dalam melaksanakan sebagian kewenangan pelayanan dan perizinan yang dilimpahkan kepada pemerintahan kecamatan. Disamping itu, alokasi belanja pemerintahan diarahkan pula untuk penguatan peran dan fungsi perencanaan, koordinasi pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah serta penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan. Alokasi belanja untuk penataan birokrasi dan tata laksana pemerintahan akan diprioritaskan pula untuk memperbaiki kesejahteraan aparatur berupa perbaikan tunjangan tambahan penghasilan aparatur dengan pembayaran setiap bulan mulai Januari 2016.

13. Mengalokasikan belanja operasional kegiatan pemerintah kecamatan sesuai dengan kebutuhan wilayah berdasarkan alokasi dasar, alokasi proporsional dan alokasi kebutuhan khusus. Pada tahun 2018 program kegiatan pemerintahan kecamatan diprioritaskan untuk mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian program pembangunan termasuk berkenaan dengan kegiatan pembangunan pedesaan melalui APBD Desa serta pembinaan kemasyarakatan.
14. Merumuskan rencana program kegiatan multiyears untuk menjamin efektifitas, efisiensi dan optimalisasi capaian kinerja program khususnya untuk program kegiatan pembangunan skala besar yang pelaksanaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun anggaran.
15. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah melalui penerapan standar analisa belanja dan standar harga serta melakukan pengukuran kinerja program dan kegiatan setiap triwulan sebagai dasar merasionalkan anggaran dalam mengimplementasikan program dan kegiatan serta mengoptimalkan pengawasan baik oleh aparatur pengawasan fungsional dan masyarakat melalui layanan pengaduan masyarakat.
16. Mengefisiensikan belanja aparatur khususnya belanja perjalanan dinas dan operasional kantor pada semua SKPD dengan mengalokasikan kebutuhan

belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI SKPD, yang meliputi kegiatan perencanaan, koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, serta pengendalian & evaluasi.

17. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel khususnya oleh setiap satuan kerja serta penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan standard akuntansi pemerintah.
18. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang serta tambahan belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana dan kejadian darurat yang tidak teralokasikan sebelumnya.
19. Berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu sehingga pelaksanaan anggaran dapat mempercepat pergerakan sektor-sektor riil masyarakat dan dunia usaha.

#### **3.4.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan pembiayaan daerah dapat berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya merupakan salah satu sumber penerimaan pembiayaan yang mendominasi penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Bone Bolango sejak daerah ini dibentuk.

**Tabel 3.12**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah**  
**Tahun 2016 s/d 2017**

No	Jenis Pembiayaan Daerah	Realisasi Tahun 2016	Pagu Anggaran Tahun 2017	Proyeksi/Target Tahun 2018
<b>3.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>44,670,386,793.00</b>	<b>42.050.754.840,00</b>	<b>48.358.368.066,00</b>
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	44,670,386,793.00	42.050.754.840,00	48.358.368.066,00
3.1.2	Pencairan dana cadangan	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-
<b>3.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>4,000,000,000.00</b>	<b>8.500.000.000,00</b>	<b>9.775.000.000,00</b>
3.2.1	Pembentukan dana cadangan			
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	4,000,000,000.00	8.500.000.000,00	9.775.000.000,00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-
<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>		<b>48,670,386,793.00</b>	<b>50.550.754.840,00</b>	<b>58.133.368.066,00</b>

Struktur anggaran untuk pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada tambahan penyertaan modal pada Bank SULUT yang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah, serta penyertaan modal kepada PDAM untuk mendukung peningkatan akses air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penyertaan modal pada BUMD akan dilaksanakan secara lebih selektif dan terarah dengan memperhatikan kemampuan dan kesehatan manajemen pengelolaan BUMD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Arah kebijakan untuk penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2018 dilakukan sebagai berikut:

- ❖ Meminimalisir target SILPA pada tahun 2018 yang antara lain melalui percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik (konstruksi) baik yang bersumber dana DAK maupun sumber-sumber pendanaan APBD lainnya.



- ❖ Pencairan dana cadangan ditargetkan nihil. Hal ini disebabkan bahwa selama ini kebijakan fiskal daerah belum melakukan pembentukan dana cadangan khususnya untuk pembiayaan program-program strategis daerah yang sifatnya multi years.
- ❖ Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan nihil karena Pemerintah Daerah belum memiliki rencana untuk melakukan penjualan beberapa aset daerah yang dipisahkan.
- ❖ Penerimaan pinjaman daerah pada tahun 2018 belum direncanakan, namun dalam jangka menengah akan dikaji pengusulan kebutuhannya dalam rangka mendukung pelayanan publik serta kegiatan daerah yang produktif.

## **BAB IV**

# **PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018**

### **4.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005-2025, Tahun 2018 merupakan tahun Ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Ketiga 2016-2021 yang menitikberatkan pada kelanjutan pembangunan desa sebagai basis pertumbuhan untuk mewujudkan masyarakat maju dan bermartabat menuju Bone Bolango Cemerlang 2021. Sebagai tahun ketiga RPJMD 2016-2021, kebijakan utama pembangunan daerah diarahkan pada:

1. Percepatan pembangunan desa sebagai basis pertumbuhan.
2. Peningkatan kinerja dan kualitas tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan bersih dan berwibawa.
3. Peningkatan kualitas layanan publik.
4. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang semakin bermutu.
5. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
6. Pengembangan produk unggulan daerah.
7. Percepatan pengembangan infrastruktur dasar wilayah untuk pemerataan pembangunan dan mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah.
8. Percepatan penataan pusat pemerintahan kabupaten dan kecamatan, serta pengembangan kawasan-kawasan strategis.
9. Pendayagunaan dan pengelolaan potensi sumber daya alam
10. Pengelolaan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan.

Berdasarkan arah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango 2005-2025, maka Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango

dalam rancangan RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2016-2021, adalah sebagai berikut:

#### A. Visi

##### **“TERWUJUDNYA BONE BOLANGO CEMERLANG”**

**CEMERLANG** dalam makna luas adalah suatu kondisi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bone Bolango yang “*Unggul dan Berdaya saing*” serta masyarakatnya berada pada tingkat peradaban tinggi. **CEMERLANG** dalam makna akronim diterjemahkan kedalam 3 (tiga) pilar utama, yakni:

##### ***CE (Cerdas), MER (Modern), LANG (Gemilang)***

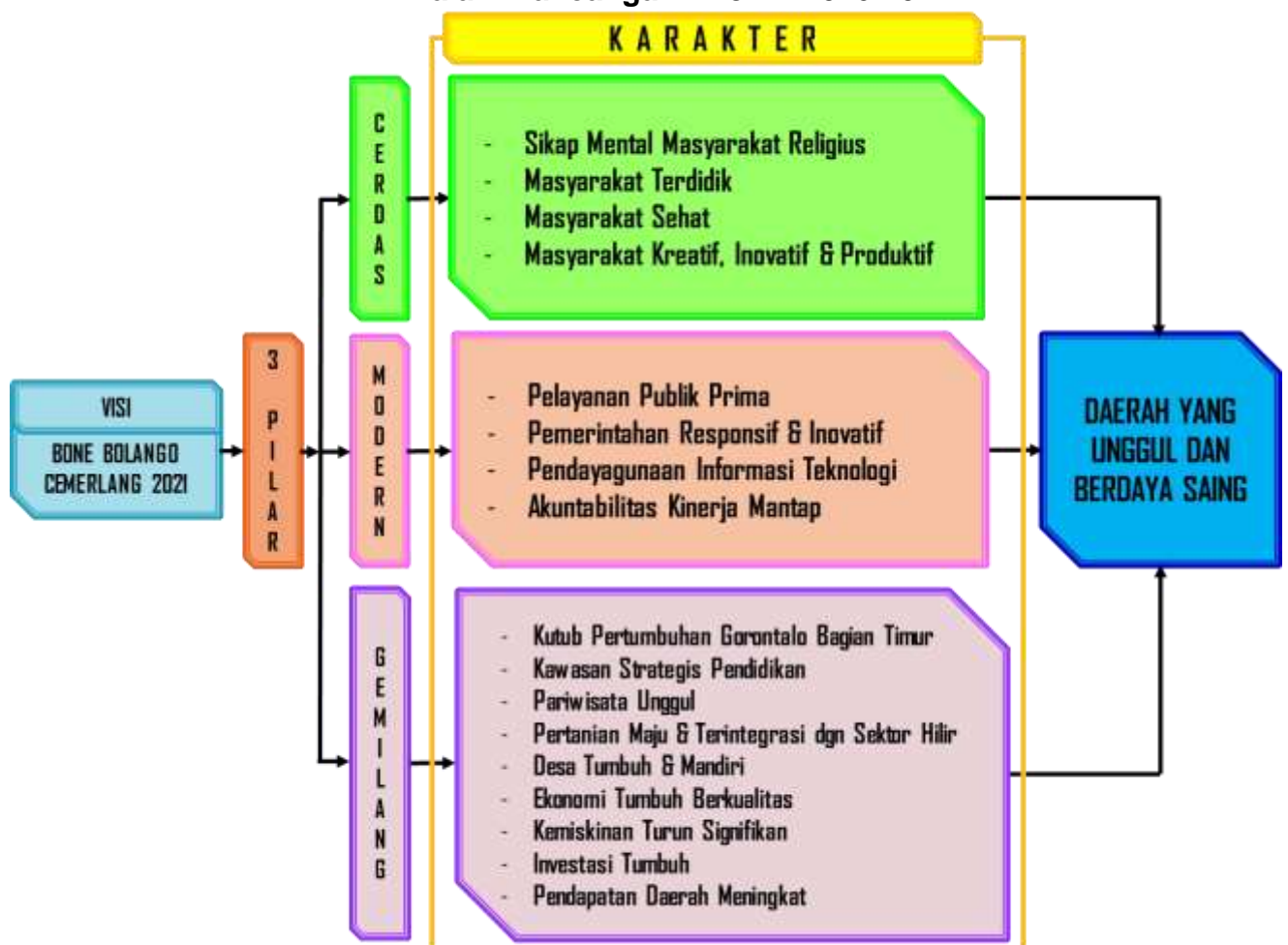
**Cerdas** : Adalah kondisi masyarakat yang menjalani kehidupan sebagai warga negara berlandaskan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani serta memiliki kecerdasan akal budi intelektual, akal budi emosional, dan akal budi spiritual. Kecerdasan tersebut merefleksikan sebuah kondisi masyarakat religius yang senantiasa memahami dan mengamalkan nilai-nilai moral, etika dan agama. Kecerdasan dimaksud juga menggambarkan suatu kondisi masyarakat yang sehat, masyarakat terdidik, serta masyarakat dinamis dengan kreatifitas, inovasi dan produktivitas tinggi.

**Modern** : Adalah kondisi entitas masyarakat Bone Bolango yang memiliki kemajuan peradaban manusia dengan bercirikan kemampuan adaptasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi tersebut terwujud juga dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang selalu memberikan yang terbaik dalam pelayanan publik, pemerintahan yang responsive dan innovative (*Innovative Government*), serta mengedepankan penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai akuntabilitas tinggi (*Accountability*) terhadap tugas dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.

**Gemilang** : Memiliki makna capaian kinerja pelayanan pemerintahan yang diindikasikan dengan suatu kondisi masyarakat sejahtera dari sisi ekonomi dalam konteks kesejahteraan sosial, dan sejahtera dari sisi kebijakan sosial yang memberikan penekanan padapemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan target besar yakni pengurangan rakyat miskin secara konsisten dan berkelanjutan. Dari dimensi wilayah mempunyai makna sebagai wilayah

dengan keunggulan comparative dan keunggulan competitive. Kondisi Bone Bolango gemilang yang ingin diwujudkan dan menjadi komitmen besar seluruh stakeholders pembangunan antara lain cita-cita untuk mewujudkan Bone Bolango sebagai kutub pertumbuhan baru di bagian timur Gorontalo, kawasan strategis pendidikan, kawasan utama pariwisata, serta mempertahankan peran Bone Bolango sebagai kawasan penyangga ekosistem lingkungan (*Green City*). Cita-cita tersebut juga dalam konteks mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kemandirian desa, pertanian yang terintegrasi (*hulu hilir integrated*), peningkatan pertumbuhan investasi dan pendapatan daerah.

**Gambar 4.1.**  
**Visi dan Karakter Utama Visi Daerah**  
**Dalam Rancangan RPJMD 2016-2021**



## **B. Misi**

### **Misi Kesatu: Mewujudkan Masyarakat Sehat, Cerdas dan Sejahtera.**

Merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin berkualitas melalui pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan sejahtera. Dengan pembangunan tersebut, diharapkan dapat tercipta sumberdaya manusia yang berkarakter dan mandiri serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah, bangsa dan negara.

### **Misi Kedua: Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Desa sebagai penopang pertumbuhan wilayah yang berbasis pelestarian lingkungan.**

Merupakan upaya keberlanjutan (percepatan) tahapan pembangunan daerah Bone Bolango dari periode sebelumnya (2010-2015) menuju periode akan datang (2016-2021) dengan memperkuat koneksitas dan sinergitas antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan desa sebagai pilar utama pertumbuhan wilayah yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan branding utama sebagai kota hijau (*Green City*). Pembangunan infrastruktur harus memberikan dukungan utama bagi pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan afirmatif melalui pembangunan desa khususnya desa-desa tertinggal diharapkan dapat semakin mempercepat pertumbuhan daerah dan kemajuan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

### **Misi Ketiga: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Merata dan Berkeadilan**

Merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui optimalisasi dan distribusi pendayagunaan sumber daya alam guna tercapainya pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Perekonomian daerah harus terus tumbuh tetapi tetap berkualitas yang menjamin pemerataan dan keadilan. Perekonomian daerah harus kompetitif yang tidak semata-mata dalam dimensi lokal tapi kompetitif dalam dimensi regional dan global. Perekonomian daerah harus semakin kreatif dan terintegrasi yang tidak semata-mata mengandalkan peran sektor primer

khususnya pertanian tetapi semakin membuka peran lebih besar pada sektor-sektor sekunder dan tersier.

### **Misi Keempat: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Moderen dan Berbudaya**

Adalah upaya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berpedoman pada prinsip-prinsip *Good and Clean Governance* dengan menekankan pada kemampuan adaptif terhadap perubahan dengan tetap berpegang teguh pada modernitas yang bercirikan nilai-nilai budaya.

Keempat misi pembangunan tersebut difokuskan dalam tiga dimensi pembangunan utama yakni:

#### **A. Dimensi Pembangunan Manusia**

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pembentukan karakter masyarakat cerdas yang religious, bermoral, berbudaya, unggul, produktif, innovative dan berdaya saing menjadi bagian penting yang harus di capai oleh setiap upaya pembangunan daerah. Oleh karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi prioritas, tidak hanya dilingkungan birokrasi pemerintahan tetapi juga dilingkungan masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dikembangkan seiring dengan peningkatan kinerja dan sikap mental aparatur. Membangun aparatur yang bersih, berwibawa, disiplin, berdedikasi, loyal, professional, kreatif, proaktif, responsive, innovative dan memiliki pengetahuan dan semangat juang yang tinggi masih akan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango dalam 2016-2021. Mewujudkan pemerintahan yang amanah dan masyarakat madani akan tetap menjadi penyemangat utama dalam pencapaian Bone Bolango Cemerlang 2021.

#### **B. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan**

Pengembangan sector unggulan menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan pembangunan 2016-2021. Pembangunan daerah keseluruhan membutuhkan lokomotif utama yang dapat menjadi "**Prime Mover**" pembangunan dan menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Sumberdaya daerah yang tersedia dan

berpotensi besar sebagai basis ekonomi harus memberikan daya dorong dan daya ungkit bagi akselerasi pembangunan daerah. Pembangunan sector unggulan yang berbasis sumber daya alam dikembangkan dengan focus utama pada pengembangan sector unggulan yang berbasis sumber daya alam, keunggulan lokasi, keunggulan sumber daya manusia serta arahan kebijakan spasial pada tingkat regional. Beberapa focus utama yang menjadi unggulan daerah kedepan yakni sector pariwisata, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pemerintahan, jasa pergudangan, sector pertanian tanaman pangan khususnya pertanian organik, usaha perkebunan, pengembangan peternakan dan usaha perikanan, sector sumberdaya air, serta industry pengolahan berbasis sumberdaya local antara lain Kopi Organik Pinogu dan Industri Aren, industry pengolahan hasil peternakan dan hasil perikanan. Sektor pertambangan dan energy menjadi sector penting yang diharapkan dapat menjadi penggerak dan basis pembangunan jangka panjang yang pengelolaannya akan dilakukan secara lebih hati-hati dengan mempertimbangkan terjaganya ekosistem lingkungan.

### **C. Dimensi Pemerataan dan Pengembangan Wilayah**

Pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan tersebar merata keseluruh wilayah. Pengurangan disparitas pembangunan antar wilayah menjadi focus prioritas yang akan dilaksanakan dalam periode 2016-2021 secara terarah, bertahap dan berkesinambungan. Oleh karena itu ketersediaan infrastruktur dasar wilayah menjadi penopang utama percepatan pembangunan daerah. Untuk mempercepat pemerataan dan memperkuat pembangunan hingga pada unit wilayah terkecil maka pembangunan desa menjadi agenda utama pembangunan dalam jangka menengah 2016-2021. Pembangunan wilayah-wilayah terisolir, terpencil, terkebelakang khususnya di wilayah Pinogu, sebagian Suwawa Timur dan Suwawa Selatan, Bulango Ulu, Bulango Utara dan sebagian wilayah di Bone Pesisir, serta penanganan daerah rawan bencana akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pembukaan akses lintas selatan yang menghubungkan pusat Ibu Kota Pemerintahan Suwawa dengan Wilayah Bone Pesisir akan menjadi program prioritas penguatan konektivitas wilayah disamping mendorong pembukaan akses lintas utara Tapa – Atinggola. Pengembangan kawasan-kawasan strategis serta simpul-simpul

ekonomi akan didisain dan diimplementasikan secara bertahap untuk mendorong percepatan pertumbuhan wilayah dan mendayagunakan sumberdaya alam lokal.

**Gambar 4.2.**  
**Dimensi Pembangunan dan Sasaran Utama Pembangunan**  
**Dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2016-2021**



#### 4.2. Prioritas Pembangunan 2018

##### A. Tema dan Sasaran RKP Tahun 2018

Penyusunan RKP 2018 yang mengusung tema **“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”** didasarkan pada kebijakan *money follows program* yang dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Pendekatan perencanaan tersebut perlu diperkuat dengan peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dengan tujuan untuk mewujudkan integrasi perencanaan antara pusat (RKP) dan daerah (RKPD), integrasi penganggaran antara pusat (APBN) dan daerah (APBD), serta penguatan perencanaan spasial (kesiapan dan keakuratan lokasi pembangunan).



Beberapa indikator ekonomi makro dan target pembangunan pada 2018, antara lain target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen, target tingkat kemiskinan sebesar 9-10 persen, target tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3-5,5 persen, dan target rasio gini sebesar 0,38. Fokus penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penduduk berpendapatan 40 persen terbawah. Tiga sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan adalah industri pengolahan, pariwisata, dan pertanian. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, akan mengimplementasikan dua upaya utama sebagai langkah konkret untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

*Pertama*, investasi pemerintah secara selektif dengan fokus pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta, yaitu infrastruktur transportasi dan logistik; dengan mempertimbangkan fokus wilayah pada kawasan-kawasan yang memiliki daya ungkit (*leverage*) yang besar untuk dikembangkan seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Pariwisata. Namun, dengan keterbatasan kapasitas fiskal menyebabkan investasi tidak bisa bergantung hanya pada investasi pemerintah. Salah satu terobosan yang perlu dilakukan adalah melalui mekanisme Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINAN) yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur lainnya, yaitu skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP), yang perlu didorong dan didukung semua pihak guna memacu percepatan penyediaan infrastruktur. *Kedua*, pemberian fasilitas kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penghapusan hambatan berkembangnya swasta di enam sektor utama, pembenahan iklim investasi di daerah, pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi, menjaga daya beli masyarakat, serta reformasi struktural.

Tema pembangunan tersebut disusun sebagai penjabaran operasional dari strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi arahan Nawa Cita, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara.
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Beberapa dimensi pembangunan yang menjadi agenda penting Nawa Cita yakni sebagai berikut :

1. Dimensi Pembangunan Manusia dengan prioritas : sektor pendidikan dengan melaksanakan program Indonesia pintar, sektor kesehatan dengan melaksanakan program Indonesia sehat, perumahan rakyat, melaksanakan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaaan dan memperkuat restorasi social Indonesia, dan melaksanakan revolusi mental.
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industry dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan dan prioritas pada upaya pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah.
4. Kondisi yang diperlukan memuat program untuk peningkatan kepastian dan penegakkan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi.

Untuk mempertegas target kinerja pada tahun 2018,beberapa sasaran makro pembangunan nasional yang menjadi target kinerja pemerintah, antara lain:

SASARAN MAKRO	REALISASI 2014	REALISASI 2015	TARGET 2016	TARGET 2018	AKHIR RPJMD
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0	4,8	6,6	7,1	8,0
Pengangguran (%)	5,94	6,18	5,2 – 5,5	5,2 – 5,5	4,0 – 5,0
Kemiskinan (%)	10,96	11,13	9,0 – 10,0	7,5 – 8,5	7,0 – 8,0
Gini Ratio (Indeks)	0,41	0,41	0,39	0,38	0,36
Index Pemb. Manusia (IPM)	73,8	74,8	75,3	75,7	76,3
Index Pemb. Masy. (IPMAS)	0,55	n.a	n.a	n.a	Naik

#### B. Tema dan Sasaran RKPD Provinsi 2018.

Dalam kerangka mendukung pembangunan nasional, Tema Utama Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 yakni **“Peningkatan Layanan Dasar Yang Berkualitas Dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Daerah Yang Ditunjang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat”** dengan prioritas pembangunan diarahkan pada :

##### a. Pendidikan

- 1) Meningkatkan layanan pendidikan dasar berkualitas.
- 2) Melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas, melalui: Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan kecamatan- yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, dengan pembangunan USB dan penambahan RKB; Penyediaan Prodira bagi seluruh siswa.
- 3) Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi daerah dan memperluas akses masyarakat miskin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.
- 4) Peningkatan kredibilitas sistem ujian nasional dan pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan.
- 5) Meningkatkan profesionalisme, kualitas, akuntabilitas dan kesejahteraan guru.

b. Kesehatan

- 1) Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 2) Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, melalui Peningkatan pelaksanaan STBM di kabupaten/Kota; Peningkatan mutu kesehatan lingkungan dan Peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku *hygiene*; Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja;
- 3) Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- 4) Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan dengan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta);
- 5) Meningkatkan Akses dan mutu fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan yang Berkualitas;
- 6) Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- 7) Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 8) Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, & Kualitas Farmasi & Alat Kesehatan;
- 9) Meningkatkan upaya pengurangan resiko krisis kesehatan
- 10) Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Keluarga, terutama Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas serta Pelayanan Gizi

c. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

- 1) Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi untuk penguatan konektivitas daerah, mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi (pertanian, perikanan, pariwisata);
- 2) Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kesadaran dalam penyelenggaraan transportasi;

- 3) Mempercepat implementasi e-Government diseluruh instansi pemerintah dan mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK di masyarakat;
  - 4) Mendorong percepatan dan pengembangan infrastruktur yang berorientasi nasional (jalan, bandara pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis, bus, dan kereta api ekonomi);
  - 5) Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan kawasan strategis serta Desa tertinggal melalui pembangunan sarana dan prasarana, seperti: peningkatan akses jalan, jembatan ke ke pusat pendidikan, kesehatan dan sentra produksi pertanian dan perikanan;
  - 6) Pembangunan Prasarana Dasar meliputi air minum, sanitasi, perumahan dan energy ketenagalistrikan;
  - 7) Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana
- d. Peningkatan Ekonomi
- 1) Penguatan sektor primer dan mendorong industrialisasi pengolahan komoditi pertanian dan perikanan;
  - 2) Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
  - 3) Pembangunan pariwisata, melalui peningkatan promosi pariwisata, pembangunan destinasi pariwisata serta memperkuat kelembagaan pariwisata;
  - 4) Meningkatkan ketahanan pangan yang bersumber dari pertanian, peternakan dan perikanan serta ketahanan air;
  - 5) Peningkatan daya saing tenaga kerja;
  - 6) Peningkatan Pertumbuhan investasi di daerah dan membaiknya proses perizinan investasi;
  - 7) Penanggulangan Kemiskinan melalui Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, mengurangi kesenjangan akses pelayanan dasar, dan Meningkatnya kapasitas penduduk miskin sehingga dapat meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif;
- e. Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintah Daerah
- 1) Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi;
  - 2) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif. melalui pengendalian jumlah dan distribusi pegawai;

penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit dan ICT; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi; penerapan sistem manajemen kinerja pegawai;

3) Peningkatan kualitas pelayanan public;

f. Pengembangan Budaya dan Keagamaan

1) Peningkatan potensi nilai informasi dan promosi warisan budaya serta pemanfaatannya;

2) Pendayagunaan warisan budaya untuk kesejahteraan rakyat;

3) Peningkatan fasilitasi terhadap kegiatan keagamaan dan dukungan terhadap fasilitas sarana tempat ibadah serta pusat pendidikan keagamaan;

g. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup

1) Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah dan penegakan hukum lingkungan;

2) Menjaga kualitas lingkungan hidup (i) pengendalian pencemaran limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air; (ii) penurunan beban pencemaran dari limbah domestik; (iii) peningkatan mutu dan kelas air; (iv) pemulihan badan air (sungai, situ/embung, waduk); (v) Revitalisasi danau Limboto (vi) pengendalian pencemaran udara dari sektor industri, transportasi dan pertambangan; (vii) peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca, dan (viii) pemantauan kualitas udara ambien Peningkatan tutupan lahan/hutan;

h. Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan (Prioritas Pembangunan Lintas Bidang)

1) Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif;

2) Berkurangnya kesenjangan akses pelayanan dasar;

3) Meningkatnya kapasitas penduduk miskin sehingga dapat meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif;

Prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo untuk tahun 2018, diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran makro sebagai berikut:

- Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan tumbuh 7,39% – 7,68%
- Laju inflasi ditargetkan pada kisaran 3 plus minus 1%
- Pengangguran terbuka ditargetkan pada kisaran 2,64%
- Angka Kemiskinan diharapkan dapat mencapai angka 13% – 10%
- PDRB Perkapita 32.603.020

### C. Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018

Memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2016-2021 sebagaimana digambarkan diatas, serta mencermati kebijakan strategis nasional dan regional serta permasalahan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango, maka Tema Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut : **“Percepatan Pengurangan Rakyat Miskin dengan Memantapkan Upaya Perlindungan Sosial, Pembangunan Ekonomi Desa dan Infrastruktur Dasar Wilayah”**. Tema pembangunan tahun 2018 merupakan kesinambungan rencana pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2017.

Seluruh stakeholders pembangunan dalam proses dan mekanisme perencanaan pembangunan tahun 2017 menyepakati bersama untuk perlu terus memantapkan upaya pengurangan rakyat miskin secara berkesinambungan. Pencapaian upaya tersebut dilaksanakan dengan menempatkan pembangunan desa sebagai basis pembangunan yang didukung oleh ketersediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur secara terus menerus dan terarah mendukung percepatan pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango dalam jangka menengah 2016-2021.

Dengan mengacu pada arahan rancangan RPJMD 2016-2021, maka spirit pembangunan yang menjadi tema utama pembangunan 2018 diarahkan pada 5 prioritas unggulan utama program pembangunan (*Leading Program*) serta 1 prioritas pendukung (*Supporting Program*).

#### a. Prioritas Utama sebagai Leading Program

##### 1. Pengurangan Rakyat Miskin dan Pengentasan Desa Tertinggal

Prioritas pengurangan rakyat miskin difokuskan pada 3 (tiga) bentuk intervensi. Intervensi *Pertama* Pemberian perlindungan sosial masyarakat melalui jaminan sosial kepada masyarakat miskin, anak

yatim, janda, penyandang cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Intervensi *kedua*, diarahkan Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar keluarga yang menjamin kelangsungan hidup keluarga berupa penyediaan hunian pantas baik melalui pembangunan rumah baru maupun peningkatan kualitas hunian, penyediaan air bersih, sanitasi, dan penerangan listrik. Intervensi *ketiga*, Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui penyediaan sarana prasarana usaha, bantuan/fasilitasi modal usaha, bantuan manajemen dan pemasaran, serta pendidikan dan pelatihan. Pada tahun 2018, akan mulai diterapkan program Kredit Cemerlang dengan dukungan APBD yang bekerja sama dengan lembaga keuangan atau perbankan dengan skema pinjaman lunak dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam upaya pengurangan rakyat miskin, akan diperkuat pula pembinaan budaya, perilaku dan kemandirian rumah tangga miskin yang dapat lebih memberikan jaminan berkelanjutan stimulus program yang dilakukan oleh Pemerintah.

Efektifitas dan dukungan program pembangunan desa melalui APBDes akan secara terintegrasi berperan besar dalam upaya pengurangan rakyat miskin.

Sedangkan pengentasan desa tertinggal diarahkan melalui 8 (delapan) fokus kebijakan; *pertama* yakni Percepatan pembangunan desa melalui pembiayaan dana desa dan ADD, *kedua* yakni Penguatan kelembagaan desa, *ketiga*; Pengembangan sarana prasarana desa, *keempat* yakni Pengembangan komoditas unggulan desa, *kelima* yakni Peningkatan partisipasi masyarakat desa, *keenam*; Peningkatan sarana prasarana pemerintah desa, *kertujuh*; Pengembangan program Afirmasi bidang infrastruktur bagi desa-desa tertinggal dan *kedelapan* yakni Peningkatan Kapasitas dan Peran Aparatur Pemerintahan Desa.

Pengelolaan setiap rupiah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa harus memberikan kontribusi nyata dalam mengintervensi rumah tangga miskin dengan tepat sasaran, tepat pemanfaatan dan tepat keberlanjutannya. Pemanfaatan APBDes untuk mengurangi rakyat miskin harus dilakukan



secara terukur dan terarah dengan disain program yang berbasikan data riil rumah tangga miskin.

## **2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan**

Pembangunan pendidikan ditujukan untuk Penyediaan sarana prasarana pendidikan secara terarah, bertahap dan merata hingga wilayah terpencil, peningkatan manajemen mutu pendidikan, peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan pendidikan non-formal bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan tenaga guru dan tenaga kependidikan khususnya pada daerah-daerah terpencil, Meningkatkan minat baca masyarakat melalui penyediaan sarana prasarana perpustakaan berbasis IT yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia dan sejahtera sehingga mampu bersaing dalam tingkat global.

Program Bone Bolango Cerdas yang telah dimulai sejak 2014 akan tetap menjadi bagian utama dalam peningkatan akses dan mutu pendidikan di Kabupaten Bone Bolango melalui bantuan beasiswa, peningkatan kesejahteraan guru terpencil, serta penyediaan sarana prasarana pendidikan. Pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa kurang mampu diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi siswa atau mahasiswa pada jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi.

## **3. Peningkatan Cakupan dan Kualitas Layanan Kesehatan**

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk Pengembangan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar hingga keseluruh wilayah terpencil, pengembangan sarana prasarana layanan kesehatan rujukan, peningkatan ketersediaan dan mutu tenaga kesehatan, pemenuhan ketersediaan obat baik pada layanan dasar maupun rujukan, peningkatan jaminan sosial kesehatan masyarakat secara merata dan menyeluruh (Universal Health Coverage), peningkatan layanan kesehatan ibu, anak dan balita, peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat pengembangan kemitraan layanan kesehatan dan revitalisasi Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.

Pengembangan sarana prasarana layanan kesehatan rujukan pada Tahun 2018 masih akan memberikan perhatian besar pada penyelesaian infrastruktur Rumah Sakit Toto. Sedangkan pengembangan rumah sakit Tombulilato akan lebih memfokuskan pada perbaikan manajemen layanan rumah sakit, penyediaan tenaga medis khususnya dokter spesialis, serta penataan layanannya sebagai rumah sakit jiwa dan pengguna NARKOBA. Pada tahun ketiga periode RPJMD 2016-2021, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan di tingkat layanan dasar PUSKESMAS akan ditingkatkan sesuai kemampuan fiskal daerah dan capaian kinerja layanan bidang kesehatan.

#### ***4. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah***

Untuk mewujudkan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah kemandirian diarahkan melalui (1) Pengembangan jasa pariwisata utamanya wisata alam dan wisata budaya sebagai keunggulan local, (2) penyediaan sarana dan prasarana produksi, pembinaan dan penyuluhan, penguatan manajemen usaha dan pemasaran produksi, serta penguatan kelembagaan usaha, (3) Pengembangan komoditas potensial unggulan, (4) Pengembangan usaha industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, (5) Pengembangan pasar harian, (6) Pengembangan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah, (7) Pengembangan investasi masyarakat dan dunia usaha, (8) Intensifikasi dan ekstensifikasi serta divesifikasi pangan, (9) Pendayagunaan lahan tidak produktif serta lahan kritis, (10) Peningkatan cadangan pangan daerah, (11) Pengembangan promosi potensi unggulan daerah, (12) peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.

#### ***5. Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan***

Pembangunan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi dan didukung oleh penataan ruang daerah yang terarah dan konsisten diarahkan untuk Peningkatan dan pemeliharaan kualitas jalan yang menjadi kewenangan daerah, Penyediaan sarana penunjang sistem transportasi darat,

Pembangunan sarana prasarana air bersih dan sanitasi, Penyediaan perumahan yang layak serta sarana prasarana lingkungan pemukiman yang sehat dan berkelanjutan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi, serta penyediaan ruang terbuka hijau buatan dan pengendalian kelestarian ruang terbuka hijau alami. Disamping itu, dukungan infrastruktur jalan pada kawasan pariwisata dan kawasan perdagangan serta kawasan strategis lainnya akan terus diperkuat secara bertahap dan berkelanjutan.

**b. Prioritas Pendukung sebagai Supporting Program**

***Agenda prioritas pendukung yakni difokuskan pada Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Penataan Aparatur Sipil Negara.***

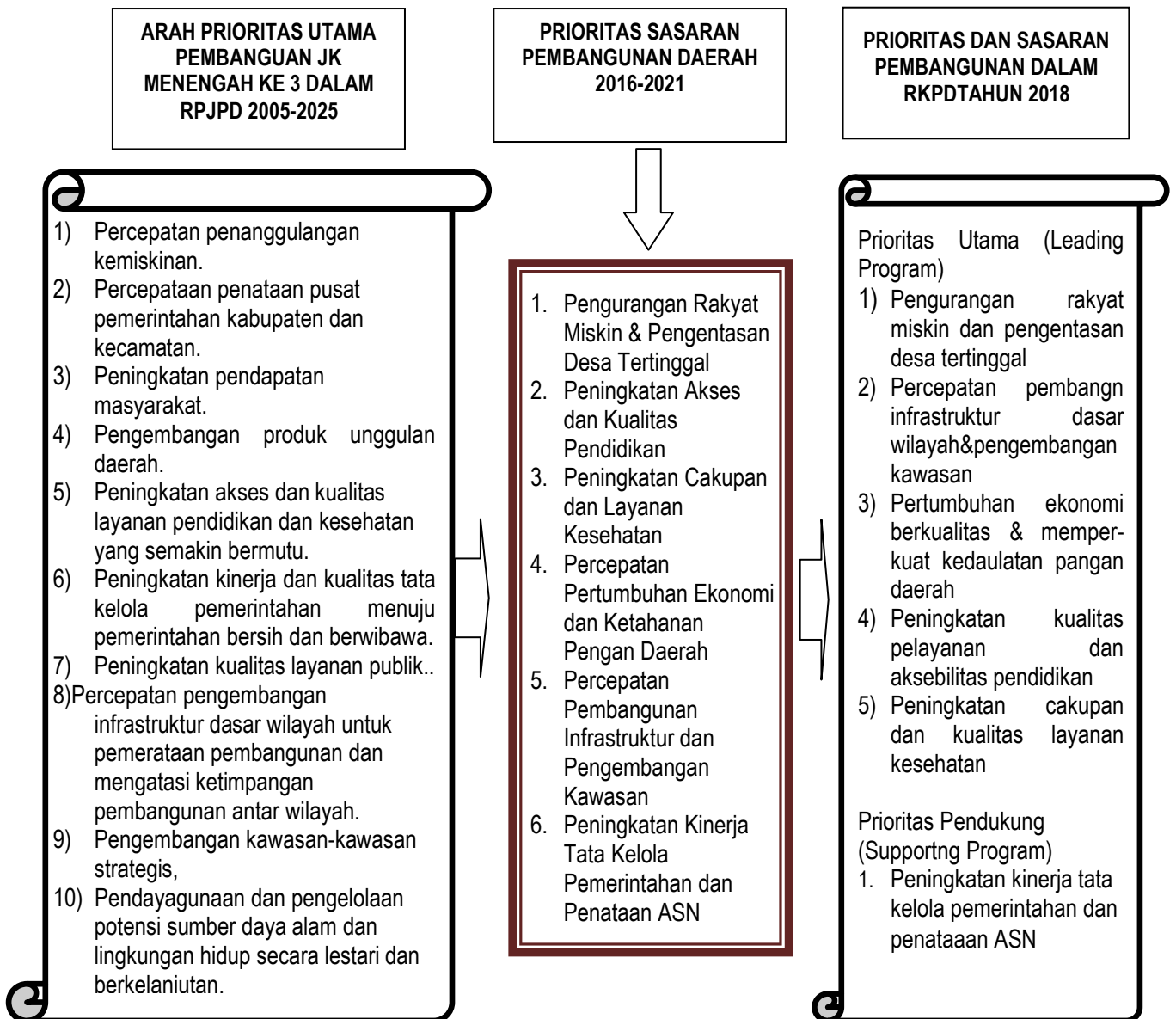
Pembangunan aparatur pemerintahan daerah dilakukan secara terarah dan komprehensif sejak tahapan perencanaan dan rekrutmen aparatur, pengembangan karir, peningkatan kompetensi, profesionalisme, disiplin, serta integritas etika dan moral penyelenggara pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas layanan publik. Untuk itu Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Penataan Aparatur Sipil Negara diarahkan pada; (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, (2) Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, (3) Meningkatkan kualitas dan ketepatan penyampaian LKIP, (4) Meningkatkan kualitas materi dan ketepatan penyampaian LPPD, (5) Implementasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), (6) Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran berdasarkan kriteria prioritas, (7) Penetapan standar pendidikan dan pelatihan aparatur (8) Peningkatan stabilitas daerah, (9) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang aspiratif, akomodatif, berkelanjutan dan berkualitas, (10) Meningkatkan percepatan proses melalui pelayanan berbasis IT (E-Government).

**Gambar 4.3**  
**Prioritas Pembangunan**  
**Kabupaten Bone Bolango 2016-2021**



Keterkaitan prioritas dan sasaran RKPDP tahun 2018 dalam mewujudkan arah kebijakan RPJMD ketiga (2016-2021) dalam RPJPD Kabupaten Bone Bolango tahun 2005-2025, diuraikan dalam skema berikut :

**Gambar 4.4**  
**Konektivitas Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Bone Bolango Tahun**



Berdasarkan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2018 serta agenda utama pembangunan 2018, maka beberapa upaya strategis yang menunjang agenda prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan upaya pengurangan rakyat miskin melalui program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi rakyat serta pengembangan asset masyarakat miskin. Strategi pengurangan

rakyat miskin tersebut antaranya dilakukan melalui bantuan jaminan kesehatan masyarakat miskin, bantuan pendidikan bagi 1000 siswa dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan anak yatim piatu, bantuan duka, bantuan usaha bagi 750 janda miskin, bantuan bagi disabilitas, bantuan usaha peternakan rakyat bagi 2500 masyarakat berpenghasilan rendah masing-masing 2 ekor per kepala keluarga, bantuan perbaikan dan pembangunan hunian pantas 1000, bantuan sanitasi bagi 1600 rumah tangga miskin, bantuan sambungan air minum bagi 2000 rumah tangga berpenghasilan rendah.

2. Melanjutkan pemberian bantuan modal bagi usaha mikro, usaha kecil dan menengah bagi keluarga yang kurang mampu serta kelompok usaha produktif lainnya termasuk 1000 wirausaha muda, bantuan usaha untuk kelompok rentan seperti para janda yang menjadi kepala keluarga, penyandang cacat, korban bencana serta korban PHK serta pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat miskin yang terintegrasi dengan program pengurangan rakyat miskin.
3. Melanjutkan program wirausaha ternak sapi untuk 2500 rumah tangga berpenghasilan rendah, bantuan alat pertanian, benih unggul, pupuk dan pembukaan lahan tidur serta bantuan sarana prasarana perikanan bagi masyarakat pesisir dan petani budidaya ikan air tawar.
4. Melanjutkan pembangunan desa dengan intervensi melalui ADD, dana desa serta program afirmatif lainnya yang berdampak pada membaiknya kelembagaan desa, infrastuktur desa serta peningkatan kesejahteraan rakyat dengan sasaran utama pengurangan desa tertinggal dan peningkatan jumlah desa mandiri. Program ADD affirmative diarahkan bagi 7 desa sangat tertinggal/tertinggal dengan target khusus percepatan pembangunan infrastruktur dasar desa melalui pemberdayaan masyarakat desa.
5. Meneruskan pembangunan infrastruktur dasar wilayah berupa pembangunan dan peningkatan kuaalitas jalan dan jembatan, pembangunan terminal, pasar, irigasi, jalan usaha tani, infrastruktur perumahan dan pemukiman, sarana air bersih dan jaringan listrik untuk rakyat serta sarana pengolah limbah dan sanitasi lingkungan lainnya.

6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, daerah terpencil dan tertinggal serta jaminan akses pendidikan bermutu bagi murid, siswa dan mahasiswa berprestasi melalui Program Bone Bolango Cerdas. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan akan dilakukan melalui peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan termasuk sarana pendukung bus sekolah, peningkatan ketersediaan dan kualitas guru, serta peningkatan manajemen dan pengawasan mutu pendidikan..
7. Meningkatkan cakupan layanan kesehatan gratis dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Bone Bolango (*Universal Health Coverage*) dengan memperkuat kapasitas pelayanan dasar serta pelayanan rujukan dengan prioritas utama Rumah Sakit Toto, serta didukung dengan pengembangan Rumah Sakit Tombulilato. Melanjutkan pembangunan infrastruktur Rumah Sakit Toto serta peningkatan kesejahteraan tenaga dokter layanan dasar merupakan prioritas khusus pada tahun 2018.
8. Meneruskan pembangunan peningkatan jalan, penghijauan, pembangunan drainase, lampu penerangan jalan umum, prasarana olahraga serta taman kota sebagai ruang publik yang multifungsi. Pengembangan kawasan termasuk pula perbaikan sarana prasarana pemerintahan serta merevitalisasi fasilitas Stadion Olahraga Bone Bolango di Kecamatan Suwawa, pembangunan 4 ruang terbuka hijau atau area publik, dan pembangunan monument Nani Wartabone, serta tugu Adipura.
9. Pengembangan kawasan pariwisata yang diprioritaskan pada penataan kawasan wisata Lombongo, pembangunan kawasan inti wisata Botutonuo, serta pembangunan kawasan wisata Danau Perintis. Pengembangan promosi wisata serta pelaksanaan event pariwisata unggulan menjadi prioritas pada 2018. Pengembangan pariwisata dilakukan pula melalui pengembangan desa wisata melalui pembiayaan utama APBDesa, serta pemberdayaan peran aktif masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan pariwisata daerah.
10. Memperkuat pengembangan komoditas unggulan daerah yang memiliki daya saing melalui pengembangan produktivitas pertanian, pengembangan usaha perkebunan serta pengembangan produktivitas perikanan yang

terintegrasi dengan pengembangan usaha industry, jasa perdagangan dan usaha koperasi, mikro kecil dan menengah serta pengembangan jasa kepariwisataan sebagai potensi utama daerah.

11. Meningkatkan profesionalisme aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, pembinaan moral dan dedikasi, pengelolaan keuangan daerah yang baik, penyampaian LAKIP, LPPD dan LKPJ tepat waktu, peningkatan stabilitas daerah, meningkatkan percepatan proses melalui peayanan berbasis IT, insentif khusus bagi aparatur pada wilayah terpencil khususnya tenaga kesehatan dan tenaga pendidik, serta peningkatan tunjangan bagi penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan, disamping pembinaan mental spiritual masyarakat.

Rencana pembangunan Daerah tahun 2018 dengan perencanaan pembangunan nasional tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dan saling bersinergi sehingga pencapaian sasaran pembangunan dapat lebih terarah dan berkesinambungan, sebagaimana nampak pada tabel berikut :

**Gambar 4.5.**  
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango**

No	Prioritas Pembangunan Nasional 9 (Sembilan) Agenda NAWACITA (RKP 2018)	No	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo (RKPD 2018)	No	Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Bone Bolango (RKPD 2018)
1.	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara.	1.	Peningkatan ekonomi daerah yang berkeadilan	1.	Pengurangan rakyat miskin dan pengentasan desa tertinggal
2.	Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.	2.	Pengembangan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah	.	
3.	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.	3.	Peningkatan akses, mutu & sarana prasarana pendidikan.	2.	Percepatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan (kedaulatan) pangan daerah
4.	Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.	4.	Peningkatan akses, pelayanan dan sarana prasarana kesehatan.	3.	Peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan



No	Prioritas Pembangunan Nasional 9 (Sembilan) Agenda NAWACITA (RKP 2018)	No	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo (RKPD 2018)	No	Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Bone Bolango (RKPD 2018)
5.	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.	5	Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian secara menyeluruh dan Pengembangan kawasan pertanian yang terintegrasi, serta penguatan kedaulatan pangan.	4.	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan
6.	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.	6	Pengelolaan lingkungan hidup dan bencana alam.	5.	Pembangunan infrastruktur dasar wilayah dan pengembangan kawasan  Supporting Program
7.	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.	7.	Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.	Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan dan penataan Aparatur Sipil Negara
8.	Melakukan revolusi karakter bangsa.	8.	Pengembangan budaya dan destinasi wisata		
9.	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social	9.	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		
		10.	Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pengembangan budaya dan prestasi olahraga.		
		11.	Pengembangan UMKM dan Koperasi.		
		12.	Penanggulangan Kemiskinan.		
		13.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government)		

#### **D. Sasaran Prioritas Utama Pembangunan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018**

Rumusan sasaran prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2018, yang didasarkan pada kendala dan permasalahan daerah yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat diuraikan dibawah ini:

<b>Prioritas Penurunan Angka Kemiskinan</b>	Sasaran	: Meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pengurangan angka kemiskinan.
	Indikator	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penurunan angka kemiskinan dari 18% menjadi 14%.</li> <li>- Indeks gini ratio(ketimpangan) ditekan 0,38</li> <li>- Peningkatan nilai tukar petani101 menjadi &gt; 104,6</li> </ul>
<b>Prioritas Pengentasan Desa Tertinggal</b>	Sasaran	: Pengurangan desa tertinggal-sangat tertinggal, meningkatnya desa maju (mandiri)dan bertambahnya jumlah Bumdes yang terbentuk
	Indikator	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurangan desa tertinggal dan sangat tertinggal dari 105 desa mejadi 65 desa.</li> <li>- Peningkatan desa maju menjadi 13 desa</li> <li>- Implementasi APBD Desa untuk semua desa</li> <li>- Peningkatan infrastruktur dasar desa</li> <li>- Terbentuknya jumlah Bumdes sebanyak 128 Bumdes.</li> <li>- Prasarana Pemerintahan Desa berkualitas baik</li> <li>- Bertambahnya lembaga ekonomi desa dan komoditas unggulan desa</li> </ul>
<b>Prioritas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan (Kedaulatan) Pangan Daerah</b>	Sasaran	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan produksi pangan strategis melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta divesifikasi pangan</li> </ul>
	Indikator	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertumbuhan Ekonomi menjadi 8,1%</li> <li>- Gini Rasio Membaik &lt; 0,38%</li> <li>- Tingkat Pengangguran Terbuka 5,12%</li> <li>- Meningkatnya jumlah kunjungan wisata 110.000 kunjungan</li> <li>- Meningkatnya Jumlah Populasi Ternak 42.075 ekor</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Produksi Perikanan 5% dari 14.485 Ton</li> <li>- Meningkatnya koperasi Sehat 42,86%</li> <li>- pertumbuhan UMKM 1% dari 19.210 UKM</li> <li>- Peningkatan Produksi Padi 28.000 Ton</li> <li>- Peningkatan Nilai Investasi PMA dan PMDN &gt; 50%</li> </ul>
<b>Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Aksebilitas Pendidikan</b>	Sasaran :	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan masyarakat melalui Peningkatkan kualitas layanan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
	Indikator :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunnya Angka Putus Sekolah jenjang SD/MI menjadi 0,10% sedangkan untuk jenjang SMP/MTS sebesar 0,14%</li> <li>- Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di targetkan sebesar 88,57% sedangkan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 59,20%</li> <li>- Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 88,57%</li> <li>- Angka Rata-Rata Lama Sekolah 7,56%</li> <li>- Peningkatan Angka Melek Huruf 99,01%</li> <li>- Peningkatan pertumbuhan pengunjung perpustakaan sebesar 100%</li> </ul>
<b>Prioritas Peningkatan Cakupan dan Kualitas Layanan Kesehatan</b>	Sasaran :	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan
	Indikator: :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angka harapan hidup yang ditargetkan sebesar 71,05</li> <li>- Angka Kematian Bayi dengan target 12,8% Per 1000 kelahiran 12,8%</li> <li>- Angka Prevalenci Gizi Buruk sebesar 0,37%</li> <li>- Angka Kematian Ibu melahirkan Per 100.000 kelahiran dengan target 278,6</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Cakupan Masyarakat Miskin Terlayani JKN 98,8%</li> <li>- Peningkatan cakupan BOR, LOS, TOI, BTO, NDR dan GDR melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana layanan kesehatan tingkat rujukan dengan prioritas utama pada Rumah Sakit Toto Kabila dan Rumah Sakit Tombulilato sebanyak 6500 pasien</li> <li>- Peningkatan cakupan pasien yang tertangani oleh dokter spesialis 16.000 Pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila dan Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato sebanyak 16.000 pasien.</li> <li>- Peningkatan cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin 100%</li> </ul>
<p><b>Prioritas Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan</b></p>	<p>Sasaran :</p> <p>Indikator</p>	<p>Meningkatnya aksesibilitas wilayah dan meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian, serta pengembangan infrastruktur pada kawasan strategis daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pertumbuhan kualitas jalan mantap/baik &gt;70% atau naik 35 km<sup>2</sup> dan pertumbuhan jalan baru sebesar 10 KM</li> <li>- Peningkatan akses layanan air bersih sebesar &gt; 70% bagi 3500 RT</li> <li>- Peningkatan akses sanitasi sebesar &gt; 60% bagi 3000 RT</li> <li>- Peningkatan ratio elektrifikasi sebesar &gt; 73% bagi 2500 RT</li> </ul>
<p><b>Prioritas Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Penataan ASN</b></p>	<p>Sasaran</p> <p>Indikator :</p>	<p>Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government) serta penataan aparatur daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Opini BPK terhadap LKPD dengan predikat WTP</li> <li>- Tingkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan Laporan LHE AKIP: mencapai predikat B.</li> </ul>

- Nilai LPPD Tinggi (Peringkat 100 Besar)

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat <72%

Indikator  
:

1. Kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan predikat WTP
2. Persentase penurunan jumlah kasus temuan yakni 40% dari tahun sebelumnya
3. Tingkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan (AKIP) mencapai predikat B.
4. Penataan pengembangan E-Government di lingkungan pemerintahan daerah
5. Persentase peningkatan ASN yang memenuhi syarat kompetensi jabatan baik diklat struktural, diklat teknis dan diklat fungsional mencapai 75 %.
6. Peningkatan disiplin, pembinaan karir dan mutasi aparatur sipil negara.
7. Persentase SKPD yang memenuhi kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan dan dokumen pengelolaan keuangan mencapai 100 %.
8. Peningkatan kapasitas perencanaan, koordinasi pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.
9. Peningkatan ketertiban, keamanan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. 100% SKPD Kabupaten telah memiliki bangunan kantor.
11. 100% Pemerintahan Kecamatan telah memiliki Rumah Dinas Camat.

12. 75% infrastruktur pemerintahan desa (kantor desa) ditingkatkan ketersediaan dan kualitasnya, utamanya bagi kantor desa pemekaran serta rehabilitasi bagi kantor desa yang rusak berat.
13. Peningkatan ketersediaan fasilitas penunjang operasional pemerintahan (kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor, serta infrastruktur teknologi informasi pemerintahan pada semua unit kerja SKPD..
14. Perbaikan manajemen dan infrastruktur penanggulangan bencana.
15. Peningkatan upaya perlindungan masyarakat, pengamanan aset pemerintahan dan penegakan peraturan daerah.
16. Peningkatan kesejahteraan aparatur bagi pemerintahan desa , serta perbaikan kesejahteraan tenaga honor/kontrak daerah.

## **BAB V**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga periode RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2016-2021, sehingga program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 diharapkan menjadi penguatan pondasi dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah 2016-2021. Program kegiatan prioritas ini merupakan rincian yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, lokasi kegiatan, target capaian kinerja dan kebutuhan dana atau pagu indikatif kegiatan. Program kegiatan SKPD yang termuat dalam dokumen RKPD 2018 disusun berdasarkan hasil analisis dan evaluasi program kegiatan tahun sebelumnya serta kebutuhan SKPD kedepan yang memperhatikan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2018 dan rancangan dokumen RKP Nasional Tahun 2018 sebagai upaya sinergitas arah kebijakan pembangunan daerah dan arah kebijakan pembangunan nasional.

Matriks Rencana Program dan Kegiatan yang digunakan dalam Bab V ini mengacu kepada: Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Penyusunan program kegiatan ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Arahan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018 berdasarkan pembagian urusan kewenangan yakni sebagai berikut:

### **1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**

Program kegiatan pendidikan difokuskan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten untuk mendukung Program Bone Bolango Cerdas. Penyelenggaraan program Bone Bolango Cerdas tersebut diarahkan pada

peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dalam rangka peningkatan angka partisipasi sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), pengurangan angka putus sekolah, peningkatan angka kelulusan serta angka melanjutkan pada jenjang pendidikan selanjutnya. Disamping itu pembangunan pendidikan diarahkan juga untuk peningkatan mutu lulusan serta kemampuan prestasi, minat bakat serta perilaku mental siswa. Urusan pendidikan tersebut dilakukan melalui kegiatan peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan manajemen layanan pendidikan, penyediaan sarana prasarana berupa penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi sarana prasarana pendidikan, pembangunan perpustakaan dan laboratorium sekolah, penyediaan buku, media pembelajaran serta fasilitas penunjang pembelajaran lainnya. Guna mendukung kinerja pendidikan, pemerintah daerah akan meningkatkan penyediaan layanan transportasi gratis bagi siswa khususnya wilayah-wilayah terpencil, pemberian beasiswa Bone Bolango Cerdas bagi siswa/mahasiswa berprestasi dan kurang mampu serta peningkatan sarana prasarana pendukung lainnya. Disamping itu, peningkatan kualitas mutu tenaga pendidik dan kependidikan berupa pemberian beasiswa kompetensi guru, peningkatan kesejahteraan guru pada wilayah terpencil dan penyediaan fasilitas penunjang bagi tenaga pendidik baik berupa mess atau rumah dinas guru pada wilayah terpencil akan terus ditingkatkan secara bertahap sesuai kebijakan nasional dan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan kualitas pengawasan tetap menjadi prioritas dalam mendukung mutu pendidikan pada seluruh jenis dan jenjang pendidikan. Dalam mempercepat dan meningkatkan target kinerja pendidikan, Pemerintah Daerah akan terus memperkuat kinerja manajemen kelembagaan pendidikan, serta juga mendorong berkembangnya partisipasi swasta dan lembaga lainnya dalam penyelenggaraan proses pendidikan di Kabupaten Bone Bolango.

## **2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**

Kebijakan program kegiatan untuk urusan kesehatan diprioritaskan pada peningkatan layanan kesehatan dasar dan layanan kesehatan rujukan yang semakin berkualitas dan terjangkau melalui pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat serta peningkatan layanan kesehatan baik promotif, preventif dan kuratif. Peningkatan layanan kesehatan dasar diselenggarakan dengan meningkatkan kapasitas manajemen layanan kesehatan, peningkatan ketersediaan



dan kualitas tenaga kesehatan, serta penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa alat dan perlengkapankesehatan dan obat-obatan, mobil layanan kesehatan, serta peningkatan kualitas sarana puskesmas dan peningkatan kualitas layanan Poskesdes. Pada Tahun 2018, keberlanjutan Program Mutiara Berlian menjadi salah satu pilar penting dalam rangka penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan serta perbaikan kualitas hidup kesehatan bayi dan balita.

Peningkatan kualitas layanan rujukan Rumah Sakit Toto akan menjadi prioritas utama pada Tahun 2018. Pengembangan rumah sakit tersebut diprioritaskan pada Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit berupa penambahan ruangan perawatan dan gedung VIP, pembangunan ruang laboratorium, ruang radiologi, ruang bedah, dan penataan lingkungan dalam kawasan RSUD Toto Kabila. Peningkatan kualitas manajemen layanan Rumah Sakit diarahkan pada pengembangan kerjasama kemitraan dalam penyediaan layanan spesialistik serta peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis melalui pemberian beasiswa pendidikan kesehatan termasuk pendidikan Dokter spesialis. Pengembangan Rumah Sakit Tombulilato diprioritaskan pada penguatan perannya untuk pelayanan rujukan masyarakat Bone pesisir dan kawasan sekitarnya, serta pelayanan penyakit Jiwa dan penyalahgunaan NARKOBA. Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit Tombulilalo serta penyediaan dokter spesialistik akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah.

### **3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Kebijakan program kegiatan ke PU-an diprioritaskan pada peningkatan aksesibilitas wilayah berupa penyiapan dokumen lingkungan dan pengadaan lahan untuk pembangunan jalan lintas selatan sepanjang 9 Kilometer yang menghubungkan Suwawa dan Kabila Bone serta peningkatan kualitas dan pemeliharaan jalan sepanjang kurang lebih 30 Kilometer yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan, pusat pemukiman dan sentra produksi, termasuk penataan kawasan pemerintahan, kawasan pariwisata serta peningkatan akses pada wilayah terpencil Kecamatan Pinogu dan Kecamatan Bulango Ulu. Pembangunan infrastruktur dasar diprioritaskan juga pada pembangunan sarana prasarana sanitasi lingkungan, penyediaan instalasi dan jaringan air bersih untuk mensupport wilayah rawan air bersih serta . Penataan kawasanstrategis yang diprioritaskan pada revitalisasi empat kecamatan yaitu Kecamatan Suwawa, Kecamatan Tapa,

Kecamatan Bonepantai, Kecamatan Kabila, serta melanjutkan penataan infrastruktur wilayah pada kawasan pemerintahan. Untuk mendukung kedaulatan pangan daerah, pembangunan infrastruktur dasar wilayah diarahkan pada peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan daerah. Pembangunan penataan ruang daerah diprioritaskan pada penyusunan rencana rinci tata ruang, perancangan revitalisasi kawasan perkotaan, design teknis pembangunan infrastruktur, penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau buatan atau taman kota serta pengendalian ruang daerah.

#### **4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Kebijakan program kegiatan bidang perumahan dan permukiman diarahkan pada penciptaan hunian layak dan sehat serta mendukung perbaikan lingkungan permukiman yang sehat. Pembangunan perumahan pada Tahun 2018 diprioritaskan pada pembangunan hunian pantas bagi masyarakat berpenghasilan rendah berupa 1000 unit pembangunan baru dan 1000 unit peningkatan kualitas hunian yang pelaksanaannya juga akan terintegrasi dengan . Pembangunan perumahan juga akan dilakukan melalui pengembangan permukiman terpadu yang akan dipusatkan pada tiap kecamatan untuk memecahkan backlog rumah yang cukup besar yang pelaksanaannya akan dimulai secara bertahap pada tahun 2018 melalui kerja sama dengan pengembang perumahan dan lembaga pembiayaan. Dalam rangka pencapaian universal akses di bidang sanitasi, maka secara bertahap pada Tahun 2018 diprogramkan pembangunan 2400 jamban sehat bagi masyarakat miskin yang terintegrasi pula dengan pembangunan rumah baru ataupun peningkatan kualitas hunian. Perbaikan lingkungan permukiman diprioritaskan pada pembangunan prasarana jalan lingkungan pada Kawasan Siap Bangun (KASIBA) Tilonkabila.

#### **5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.**

Kebijakan program kegiatan Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat diprioritaskan pada penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban daerah, serta penegakan peraturan daerah. Program kegiatan pada urusan ini pula diarahkan pada penanganan cepat dan tanggap penanggulangan bencana daerah serta pencegahan, pengendalian dan mitigasi bencana. Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan aparaturnya serta penyediaan

sarana prasarana penunjang tugas akan terus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### **6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

Kebijakan pada urusan sosial diarahkan padapencegahan dini dan penanganan korban bencana alam melalui pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam, penyediaan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana alam, peningkatan kualitas kader relawan siaga bencana serta penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana. Pembangunan bidang sosial diarahkan pula pada fasilitasi program-program nasional dibidang kesejahteraan sosial baik PKH, KUBE, Program RASKIN, bantuan BBR dan bantuan program sosial lainnya, penanganan masalah kesejahteraan sosial (fakir miskin, anak yatim piatu, anak terlantar, disabilitas, para janda miskin, para lansia miskin, penyandang kesejahteraan sosial lainnya), serta upaya pemantapan kesetiakawanan sosial. Peningkatan produktivitas karang taruna melalui bantuan usaha ekonomi produktif akan menjadi prioritas pada tahun 2018. Pemantapan data dan informasi masyarakat miskin menjadi fokus urusan sosial yang bekerja sama dengan urusan pemerintahan lainnya.

#### **7. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan**

Program kegiatan tahun 2018 pada urusan ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan, koordinasi perencanaan, penyaluran dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan usaha ketenagakerjaan. Penguatan kelembagaan ketegakerjaan dan pemantapan sistem informasi ketenagakerjaan.

#### **8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Program kegiatan pada urusan ini diprioritaskan pada peningkatan keberdayaan perempuan dalam kesetaraan gender (KG), perlindungan perempuan dan anak-anak dari tindakan kekerasan, serta fasilitasi bagi usaha bagi perempuan dan P2WKSS serta peningkatan pembinaan terhadap organisasi perempuan.

## **9. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Program kegiatan pada urusan ini diprioritaskan pada peningkatan kualitas pembinaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) serta pembangunan dan pembinaan keluarga menuju keluarga sejahtera. Pada urusan ini pula diarahkan pada peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi.

## **10. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**

Program kegiatan 2018 pada urusan ini diprioritaskan pada pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan akibat kegiatan pembangunan, peningkatan kualitas manajemen lingkungan melalui peningkatan kinerja pengelolaan limbah berupa penyediaan sarana prasarana persampahan, pembangunan dan pemeliharaan RTH buatan atau taman hijau, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kebersihan, peningkatan kapasitas tenaga pengelola lingkungan hidup, diseminasi lingkungan serta pembentukan kelompok masyarakat pengelola sampah.

## **11. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**

Urusan pertanahan pada Tahun 2018 diprioritaskan pada pembebasan lahan dalam rangka pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas wilayah utamanya untuk penyiapan pembangunan jalan lintas Suwawa – Kabila Bone. pembangunan beberapa fasilitas pemerintahan umum, pendidikan dan kesehatan, serta pembebasan lahan untuk fasilitas publik lainnya berupa pembangunan fasilitas pengelolaan limbah, pembangunan pasar, pembangunan terminal, pembangunan taman/RTH, koridor hijau, fasilitas air bersih dan beberapa infrastruktur dasar lainnya. Urusan pertanahan diprioritaskan pula untuk penyelesaian pembebasan lahan untuk infrastruktur akibat sengketa atau konflik kepemilikan lahan yang telah ditetapkan sah secara hukum untuk menjadi tanggung jawab pemerintah daerah serta lanjutan penyelesaian lahan untuk mendukung pembangunan kampus baru Universitas Negeri Gorontalo. Pembangunan bidang pertanahan diarahkan pula pada upaya penyediaan sertifikasi lahan bagi masyarakat kurang berpenghasilan rendah.

## **12. Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil**

Program kegiatan pada urusan ini diprioritaskan pada peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil dengan mengembangkan sistem pelayanan kependudukan yang dimulai dari desa dengan target seluruh masyarakat Bone Bolango dapat terlayani dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta administrasi kependudukan lainnya. Tahun 2018 pula akan dilakukan pemutakhiran data kependudukan yang akan dirangkum dalam profil kependudukan Kabupaten Bone Bolango.

## **13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Sesuai prioritas pembangunan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018, maka program kegiatan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa difokuskan pada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa, perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan desa termasuk pembinaan, fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan APBD Desa, peningkatan kualitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan urusan ini diarahkan pula pada penguatan koordinasi pemerintahan desa termasuk peningkatan kualitas proses pemilihan kepala desa. Peningkatan alokasi dana desa pada Tahun 2018 akan ditingkatkan secara signifikan seiring dengan rencana peningkatan dana desa yang berasal dari transfer APBN. Pemanfaatan APBD desa diarahkan untuk menunjang kegiatan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur dasar skala desa dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat desa termasuk untuk mendukung program unggulan dibidang peternakan, pengembangan BUMDES, peningkatan tunjangan kinerja aparatur desa, pembangunan dan rehabilitasi kantor desa serta penyediaan kendaraan roda dua operasional pemerintahan desa. Penyelenggaraan pembangunan desa akan diperkuat pula dengan pengembangan kerja sama antar desa untuk pembangunan kawasan pedesaan.

## **14. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**

Program kegiatan pada urusan ini di fokuskan pada penyiapan lokasi untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan berupa pembangunan Balai Uji Kendaraan Bermotor, penyiapan dokumen teknis, dokumen lingkungan serta penyiapan lahan untuk pembangunan terminal di Suwawa dan di wilayah Bone

Pesisir, pembangunan pos pengendalian lalu lintas serta pengadaan dan pemasangan peralatan rambu-rambu lalu lintas jalan. Pemasangan fasilitas rambu-rambu lalu lintas dan jalan raya diprioritaskan pada jalan-jalan utama pada pusat pemerintahan dan kawasan strategis lainnya yang menjadi kewenangan kabupaten. Untuk pengurangan angka kecelakaan di jalan raya, Tahun 2018 dilaksanakan program kegiatan berupa sosialisasi tertib lalu lintas bagi masyarakat dan pengetahuan lalu lintas dasar bagi pelajar mahasiswa, serta penyelenggaraan pengawasan kegiatan lalu lintas jalan yang bekerja sama dengan instansi terkait lainnya..

#### **15. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**

Arah program kegiatan pada urusan ini difokuskan pada pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, dan peningkatan kerja sama dengan media masa untuk peningkatan penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat, penyediaan sarana prasarana informasi serta penataan manajemen informasi daerah dengan memperkuat peran pejabat informasi publik daerah pada semua unit pemerintahan. Penataan berbagai aplikasi dan media informasi pemerintahan yang tersebar pada semua unit kerja akan dimulai dengan pengembangan master plan E-Government untuk memberikan arah dan keterpaduan sistem pengembangan E-Government pada semua lini pemerintahan daerah.

#### **16. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

Pada urusan ini diarahkan pada pengembangan data informasi statistik daerah serta updating data dan informasi, pengembangan kerja sama dalam penyediaan statistik daerah, serta penyediaan sarana prasarana pengembangan data dan informasi. Pengembangan statistik daerah diarahkan pula dengan memperkuat kapasitas dan ketersediaan data dan informasi wilayah dan informasi sektoral pada semua unit dan jenjang pemerintahan.

#### **17. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**

Pada urusan ini program kegiatannya diarahkan pada pengembangan nilai budaya daerah melalui promosi budaya daerah, penyusunan kebijakan budaya local daerah, pembinaan lembaga adat daerah (Gorontalo, Suwawa, Bulango), serta penguatan kelembagaan adat daerah serta pelestarian adat dan budaya daerah secara berkelanjutan. Pelestarian budaya dan adat daerah akan terus

dikembangkan dengan memperkuat peran kelembagaan adat daerah serta dukungan pembiayaan pemerintah daerah.

#### **18. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**

Program kegiatan pada urusan ini diarahkan pada pengembangan minat budaya baca dan pembinaan perpustakaan sekolah dan desa, penyediaan bahan pustaka perpustakaan desa dan perpustakaan umum daerah serta pengembangan sarana prasarana perpustakaan dan sistem informasi pustaka. Pengembangan perpustakaan daerah diarahkan pula melalui pengembangan kerja sama dengan perpustakaan atau lembaga lainnya baik dalam penguatan kapasitas manajemen layanan perpustakaan maupun pengayaan buku dan informasi kepustakaan. Disamping itu, upaya layanan perpustakaan mobile pada wilayah kecamatan atau sekolah tertentu terus diperkuat serta pengintegrasian layanan perpustakaan dengan program *Cyber City*.

#### **19. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**

Program kegiatan Tahun 2018 pada urusan ini diarahkan pada peningkatan kinerja bidang kearsipan melalui perbaikan system administrasi kearsipan, pengembangan peningkatan kualitas layanan Informasi kearsipan serta penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip. Pembinaan pengelolaan arsip daerah bagi seluruh unit kerja pemerintahan daerah akan terus ditingkatkan untuk menjamin pengelolaan administrasi pemerintahan yang tertata baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **20. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Program kegiatan Tahun 2018 pada urusan ini diarahkan pada pertumbuhan koperasi melalui fasilitasi, pembinaan dan pengawasan bagi koperasi yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Untuk pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Tahun 2018 dialokasikan anggaran untuk pemberian modal usaha mikro bagi 1000 rumah tangga berpenghasilan rendah, fasilitasi modal bagi 150 kelompok usaha kecil menengah yang berkembang, serta pengembangan UMKM yang menunjang pertumbuhan ekonomi lokal melalui pelatihan dan fasilitasi kemudahan ijin usaha. Peningkatan ketrampilan bagi pengrajin pada bidang tertentu akan dikembangkan melalui pelatihan ketrampilan dan pemagangan pada usaha atau daerah yang relevan dengan pengembangan usaha industri daerah. Penyelenggaraan program ini diselenggarakan secara terpadu dengan

pembiayaan program melalui APBD desa sesuai kebutuhan dan kemampuan pembiayaan desa`

### **21. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**

Pada Urusan ini program kegiatan diprioritaskan pada pembinaan usaha investasi untuk meningkatkan realisasi jumlah dan realisasi investasi, penyediaan database atau profil potensi investasi Kabupaten Bone Bolango untuk promosi investasi, peningkatan kinerja pelayanan perizinan secara terpadu, pengendalian dan pengawasan penanaman modal baik investasi dalam negeri maupun investasi asing serta pengembangan kerja sama investasi/penanaman modal untuk pembangunan daerah.

### **22. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

Tahun 2018 program kegiatan pada urusan ini diarahkan pada pembentukan dan fasilitasi kelompok pemuda, peningkatan prestasi olahraga melalui pembinaan dan fasilitasi kegiatan olahraga, revitalisasi Stadion Olahraga Bone Bolango, pembangunan lapangan olahraga di pusat-pusat kecamatan, pelaksanaan event olahraga serta pembinaan atlet dan pelatih khususnya atlet berprestasi. Pembinaan kepemudaan diarahkan pada peningkatan peran pemuda dalam pembangunan, penguatan peran KNPI sebagai wadah berhimpun serta pembinaan pemuda desa.

### **23. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**

Program Kelautan dan Perikanan diprioritaskan pada pembinaan usaha perikanan melalui pemberdayaan nelayan dan pengusaha perikanan, peningkatan pengelolaan TPI Inengo dan TPI Tihu, pemberian bantuan sarana prasarana perikanan tangkap serta pemberian bantuan sarana usaha perikanan berupa kendaraan motor dan cool box bagi nelayan. Pembinaan kegiatan usaha budidaya perikanan termasuk uji coba budidaya ikan vaname akan terus ditingkatkan melalui dukungan penyediaan benih/bibit, pakan, bantuan sarana prasarana, peningkatan ketrampilan para nelayan, serta fasilitasi manajemen dan bantuan pemasaran. Pengembangan sarana penunjang usaha perikanan berupa penyediaan cold storage, fasilitas pabrik es, fasilitas pemasaran hasil perikanan akan tetap menjadi perhatian pemerintah pada Tahun 2018.



#### **24. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**

Tahun 2018 diprioritaskan pada pengelolaan dan peningkatan sarana prasarana destinasi kawasan wisata alam Pantai Botutonuo (Botutonuo, Botubarani dan Molotabu) dan obyek Wisata Lombongo, serta pengembangan obyek wisata Danau Perintis. Disamping itu, pembangunan pariwisata diarahkan pada pembinaan usaha keparwisataan serta peningkatan promosi wisata melalui kegiatan-kegiatan kepariwisataan. Pengembangan obyek wisata lainnya akan dimulai dengan penyediaan rancangan teknis obyek wisata alam Pantai Bulawa, obyek wisata Air Terjun Taludaa, serta obyek wisata Meranti.

#### **25. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**

Sejalan dengan Program Nawacita Pemerintah Nasional, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memprioritaskan upaya peningkatan kedaulatan dan kemandirian pangan daerah berupa fasilitasi desa mandiri pangan, pengawasan keamanan pangan, penyediaan infrastruktur pengolahan hasil pangan dan penyediaan serta penyaluran bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat. Untuk memperkuat kelembagaan ketahanan pangan, pembangunan ketahanan pangan daerah diarahkan pada pembinaan kelompok petani berupa penyuluhan dan pembinaan teknis usaha pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan kegiatan usaha kehutanan.

#### **26. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

Untuk menjamin kedaulatan pangan, program kegiatan pertanian diprioritaskan pada pengembangan sarana dan prasarana pertanian termasuk penyediaan gudang dan lantai jemur, pemberian bantuan benih dan pupuk, bantuan alat mesin pertanian, konversi lahan kering termasuk pembukaan lahan tidur, pengembangan infrastruktur pendukung khususnya pembangunan jalan usaha tani dan pembangunan saluran irigasi dan infrastruktur sumber daya air pendukung usaha pertanian yang menjadi kewenangan daerah.

Disamping itu, program kegiatan pada urusan ini diprioritaskan pula pada pembinaan usaha peternakan melalui pengadaan bibit sapi unggul untuk kelompok usaha peternakan berbasis komunal, pengembangan inseminasi buatan, pengembangan kawasan peternakan melalui penyediaan lahan, disain dan prasarana dasar penyiapan pembangunan pasar hewan dan rumah potong hewan,

pembangunan failitas kesehatan hewan, pengawasan dan pengendalian peredaran hewan ternak.

## **27. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**

Program kegiatan pada urusan ini meliputi pembangunan sarana prasarana perdagangan berupa rehabilitasi dan pengembangan pasar tradisional, pengembangan Pasar Traditional Modern atau Bone Bolango Busines Center (BBC), peredaran dan pengawasan barang perdagangan, pelaksanaan kegiatan metrology (tera ulang) serta promosi hasil produksi unggulan daerah. Pada urusan perdagangan, diprioritaskan pula usaha-usaha pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi daerah. Pengembangan 4 (empat) pasar harian menjadi prioritas penting untuk memperkuat mobilisasi usaha dan produksi perekonomian masyarakat.

## **28. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**

Dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maka urusan perindustrian ini diharapkan dapat menjadi prioritas penunjang ekonomi daerah sehingga program kegiatan pada urusan ini diarahkan pada pengembangan industri kecil menengah melalui pengembangan komoditas unggulan daerah Kopi Organik Pinogu dan Gula Aren, pembinaan dan pelatihan usaha industri, serta fasilitasi kemudahan ijin usaha bagi industri kecil menengah dan penataan industri daerah.

## **29. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian**

Urusan ini dibagi menjadi beberapa sub urusan yang dijelaskan dibawah ini:

### **A. Sub Urusan Otonomi Daerah**

Pada sub urusan ini diprioritaskan pencapaian peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan public dengan program kegiatan berupa peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, penataan otonomi daerah serta peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.

### **B. Sub Urusan Pemerintahan Umum**

Sub urusan ini memprioritaskan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan peningkatan pelayanan umum bagi masyarakat diseluruh lini pemerintahan daerah baik pemerintah Umum, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa sehingga terciptanya pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.

C. Sub Urusan Administrasi Keuangan

Dalam sub urusan ini diharapkan pencapaian predikat pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dipertahankan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

D. Sub Urusan Perangkat Daerah

Program kegiatan pada sub urusan ini di prioritaskan pada peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, kemudian penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta penataan peraturan perundang-undangan daerah dalam mencapai good government.

E. Sub Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada sub urusan ini prioritas program dan kegiatan diarahkan pada penyediaan dokumen perencanaan dan informasi pembangunan daerah, penyelenggaraan musrenbang perencanaan pembangunan, penyusunan dokumen LKPJ Kepala Daerah, penyusunan dokumen rencana detail tata ruang daerah (RDTR), peningkatan kerja sama pembangunan daerah, pelaksanaan monitoring evaluasi perencanaan pembangunan daerah, perencanaan ekonomi daerah, serta peningkatan kapasitas aparatur perencana daerah.

F. Sub Urusan Kepegawaian Daerah

Program Kegiatan pada sub urusan ini di arahkan pada peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur melalui kegiatan diklat structural maupun diklat fungsional dan teknis, penataan dan pengembangan system administrasi dan informasi kepegawaian daerah, pembinaan pola karier ASN, pelaksanaan lelang jabatan ASN, serta ujian dinas bagi ASN.

Selanjutnya, berdasarkan prioritas pembangunan sektoral pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018, maka dirumuskan rencana program dan kegiatan yang menjadi fokus masing-masing SKPD yang didasarkan pada Rencana Kerja (Renja) SKPD pada Tahun Anggaran 2018 serta rencana program dan kegiatan prakiraan maju pada Tahun Anggaran 2018, dapat dilihat pada tabel sebagaimana terlampir dalam dokumen RKPD ini.

## BAB VI

### PENUTUP

Dengan tersusunnya RKPD Tahun 2018, kiranya dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan yang dituangkan Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 wajib menerapkan prinsip – prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta berorientasi pada pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan infrastruktur wilayah. Hal ini penting agar tema pembangunan “ **Memantapkan Pembangunan Desa dan Infrastruktur Untuk Mengurangi Kemiskinan**” bukan hanya menjadi slogan belaka tetapi menjadi acuan dan komitmen kita bersama dalam mewujudkan pemerintahan amanah demi tercapainya masyarakat madani.

Sehubungan dengan hal tersebut, RKPD Tahun 2018 memerlukan kaidah pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder, yakni:

1. Masyarakat bersama Dunia Usaha dapat berperan lebih aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan mulai dari perumusan perencanaan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
2. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango agar dapat mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam merumuskan rencana anggaran dan kegiatannya;
3. Sebagai pedoman penyusunan APBD Tahun 2018, maka RKPD perlu dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan prioritas dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018;
4. Terkait pelaksanaan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka penanggung jawab pelaksanaan program kegiatan pembangunan tahun 2018 dalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018 akan disesuaikan dengan penetapan organisasi perangkat daerah (OPD) baru yang sedang dirumuskan dan akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bone

Bolango.

5. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN dan sumber lainnya, setiap SKPD harus membuat Rencana Kerja (RENJA) yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran tersebut;
6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Bupati Bone Bolango melalui Kepala Bappeda Kabupaten Bone Bolango;
6. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan masing-masing Kepala SKPD pada tahun lalu dan tahun berjalan;
9. Pada akhir tahun anggaran 2018, setiap Kepala SKPD wajib melakukan evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2018.
10. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan Hasil evaluasi dari para Kepala SKPD, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.

Demikian dokumen RKPD Tahun 2018 ini disusun, semoga menjadi landasan berpijak dan acuan bertindak bagi pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan “ ***Bone Bolango Cemerlang 2021***”.

Bone Bolango, Mei 2017

**BUPATI BONE BOLANGO,**

**H A M I M P O U**

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN RENJA	KETERANGAN
	<b>Urusan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango</b>	<b>561.011.523.907</b>	
	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	<b>347.872.984.631</b>	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33.322.576.701	
2	Dinas Kesehatan	75.952.213.025	
3	Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila	89.413.885.538	
4	Rumah Sakit Umum Tombulilato	13.777.585.354	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	87.126.401.728	
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	32.244.033.775	
7	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	3.015.670.000	
8	Badan Kesbang-Pol	2.344.194.250	
9	Dinas Sosial	10.676.424.260	
	<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>	<b>53.840.407.490</b>	
1	Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.058.736.000	
2	Dinas Pangan	659.320.000	
3	Dinas Lingkungan Hidup	7.339.968.465	
4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.213.169.973	
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.828.646.289	
6	Dinas Perhubungan	9.696.527.500	
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.384.480.450	
8	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	3.920.838.813	
9	Dinas Pemuda dan Olahraga	9.545.620.000	
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.193.100.000	
	<b>Urusan Pilihan</b>	<b>66.834.995.750</b>	
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.665.594.600	
2	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	16.458.186.900	
3	Dinas Pertanian dan Peternakan	28.811.670.000	
4	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan	13.899.544.250	

	<b>Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>92.463.136.036</b>	
1	Sekretariat Daerah	21.059.416.597	
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8.609.065.875	
3	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	9.279.341.656	
4	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	8.221.590.004	
5	Sekretariat DPRD	19.574.335.000	
6	Inspektorat Daerah	4.056.311.000	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.850.126.233	
8	Kecamatan Bonepantai	1.039.704.150	
9	Kecamatan Kabila	2.744.327.429	
10	Kecamatan Tapa	921.088.250	
11	Kecamatan Suwawa	1.049.526.875	
12	Kecamatan Tilongkabila	917.259.950	
13	Kecamatan Kabila Bone	774.024.125	
14	Kecamatan Boneraya	687.212.301	
15	Kecamatan Bone	888.340.273	
16	Kecamatan Botupingge	761.376.340	
17	Kecamatan Suwawa Tengah	752.000.000	
18	Kecamatan Suwawa Selatan	921.545.263	
19	Kecamatan Suwawa Timur	947.931.501	
20	Kecamatan Bulango Utara	734.799.350	
21	Kecamatan Bulango Ulu	1.012.538.001	
22	Kecamatan Bulango Selatan	922.305.408	
23	Kecamatan Bulango Timur	865.140.917	
24	Kecamatan Bulawa	684.009.538	
25	Kecamatan Pinogu	1.189.820.000	